



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106/PMK.02/2016

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*).

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi:
 - a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga.
 - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Keluaran (*Sub Output*) Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
 - b. Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian.

Pasal 3

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2018; dan/atau

L
AGW

- d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*;
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian

AGN

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Abm

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIE BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 106/PMK.02/2016
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK BEBERAPA/SELURUH
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PERENCANAAN, PEMERIKSAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|----------|---|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L) | | | |
| a | SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat | | | |
| 1) | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I tanpa satker vertikal | 1 Dokumen | 57.660.000 | |
| 2) | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker | 1 Dokumen | 373.618.500 | |
| 3) | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker | 1 Dokumen | 686.906.250 | |
| 4) | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon II dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker | 1 Dokumen | 1.348.291.500 | |
| 5) | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon II dengan unit vertikal di atas 34 satker | 1 Dokumen | 1.557.150.000 | |
| b | SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L | | | |
| 1) | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Kementerian/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu satker | 1 Dokumen | 175.400.000 | |
| 2) | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di bawah 2 s.d. 6 unit | 1 Dokumen | 292.500.000 | |
| 3) | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit | 1 Dokumen | 438.900.000 | |
| 4) | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit | 1 Dokumen | 497.500.000 | |
| 2 | Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK Dokumen LAKIN) | | | |
| a | SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat | | | |
| 1) | Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal | 1 Dokumen | 19.320.000 | |
| 2) | Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker | 1 Dokumen | 124.639.500 | |
| 3) | Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker | 1 Dokumen | 229.068.750 | |
| 4) | Dokumen LAKIN 16 s.d. 34 satker | 1 Dokumen | 449.530.500 | |
| 5) | Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal di atas 34 satker | 1 Dokumen | 519.150.000 | |
| b | SBK Dokumen LAKIN untuk K/L | | | |
| 1) | Dokumen LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit dan satu satker | 1 Dokumen | 58.500.000 | |
| 2) | Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit | 1 Dokumen | 97.500.000 | |
| 3) | Dokumen LAKIN untuk K/L unit vertikal 7 s.d. 10 unit | 1 Dokumen | 146.300.000 | |
| 4) | Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal di atas 10 unit | 1 Dokumen | 165.820.000 | |
| 3 | Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural) | | | |
| a | Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi | 1 Per Peserta | 30.261.000 | |
| b | Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pimpinan Administrasi | 1 Per Peserta | 22.125.000 | |
| c | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pimpinan Administrasi | 1 Per Peserta | 20.230.000 | |
| 4 | Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan) | | | |
| a | Diklat Prajabatan Golongan I dan II | 1 Per Peserta | 9.296.000 | |
| b | Diklat Prajabatan Golongan III | 1 Per Peserta | 9.296.000 | |
| c | Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2 | 1 Per Peserta | 2.242.000 | |

Abu

(dalam rupiah)

| No. | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|----------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja) | | | |
| | a SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama | | | |
| | 1) Aceh | 1 LHA | 45.000.000 | |
| | 2) Sumatera Utara | 1 LHA | 43.400.000 | |
| | 3) Riau | 1 LHA | 39.700.000 | |
| | 4) Kepulauan Riau | 1 LHA | 41.300.000 | |
| | 5) Jambi | 1 LHA | 38.800.000 | |
| | 6) Sumatera Barat | 1 LHA | 40.800.000 | |
| | 7) Sumatera Selatan | 1 LHA | 40.000.000 | |
| | 8) Lampung | 1 LHA | 35.500.000 | |
| | 9) Bengkulu | 1 LHA | 39.700.000 | |
| | 10) Bangka Belitung | 1 LHA | 37.100.000 | |
| | 11) Banten | 1 LHA | 32.400.000 | |
| | 12) Jawa Barat | 1 LHA | 32.300.000 | |
| | 13) D.K.I. Jakarta | 1 LHA | 23.300.000 | |
| | 14) Jawa Tengah | 1 LHA | 37.100.000 | |
| | 15) D.I. Yogyakarta | 1 LHA | 41.200.000 | |
| | 16) Jawa Timur | 1 LHA | 40.700.000 | |
| | 17) Bali | 1 LHA | 46.300.000 | |
| | 18) Nusa Tenggara Barat | 1 LHA | 43.100.000 | |
| | 19) Nusa Tenggara Timur | 1 LHA | 47.500.000 | |
| | 20) Kalimantan Barat | 1 LHA | 40.100.000 | |
| | 21) Kalimantan Tengah | 1 LHA | 41.400.000 | |
| | 22) Kalimantan Selatan | 1 LHA | 40.700.000 | |
| | 23) Kalimantan Timur | 1 LHA | 44.900.000 | |
| | 24) Kalimantan Utara | 1 LHA | 43.200.000 | |
| | 25) Sulawesi Utara | 1 LHA | 47.100.000 | |
| | 26) Gorontalo | 1 LHA | 46.000.000 | |
| | 27) Sulawesi Barat | 1 LHA | 46.300.000 | |
| | 28) Sulawesi Selatan | 1 LHA | 44.300.000 | |
| | 29) Sulawesi Tengah | 1 LHA | 47.800.000 | |
| | 30) Sulawesi Tenggara | 1 LHA | 44.700.000 | |
| | 31) Maluku | 1 LHA | 54.800.000 | |
| | 32) Maluku Utara | 1 LHA | 52.200.000 | |
| | 33) Papua | 1 LHA | 60.700.000 | |
| | 34) Papua Barat | 1 LHA | 66.300.000 | |
| | b SBK Audit Kinerja Dalam Kota | | | |
| | 1) Aceh | 1 LHA | 57.900.000 | |
| | 2) Sumatera Utara | 1 LHA | 56.300.000 | |
| | 3) Riau | 1 LHA | 52.600.000 | |
| | 4) Kepulauan Riau | 1 LHA | 54.200.000 | |
| | 5) Jambi | 1 LHA | 51.700.000 | |
| | 6) Sumatera Barat | 1 LHA | 53.700.000 | |
| | 7) Sumatera Selatan | 1 LHA | 52.900.000 | |
| | 8) Lampung | 1 LHA | 48.400.000 | |
| | 9) Bengkulu | 1 LHA | 52.600.000 | |
| | 10) Bangka Belitung | 1 LHA | 50.000.000 | |
| | 11) Banten | 1 LHA | 45.300.000 | |
| | 12) Jawa Barat | 1 LHA | 45.200.000 | |
| | 13) D.K.I. Jakarta | 1 LHA | 36.200.000 | |
| | 14) Jawa Tengah | 1 LHA | 50.000.000 | |
| | 15) D.I. Yogyakarta | 1 LHA | 54.100.000 | |
| | 16) Jawa Timur | 1 LHA | 53.600.000 | |
| | 17) Bali | 1 LHA | 59.200.000 | |
| | 18) Nusa Tenggara Barat | 1 LHA | 56.000.000 | |
| | 19) Nusa Tenggara Timur | 1 LHA | 60.400.000 | |
| | 20) Kalimantan Barat | 1 LHA | 53.000.000 | |
| | 21) Kalimantan Tengah | 1 LHA | 54.300.000 | |
| | 22) Kalimantan Selatan | 1 LHA | 53.600.000 | |
| | 23) Kalimantan Timur | 1 LHA | 57.800.000 | |
| | 24) Kalimantan Utara | 1 LHA | 56.100.000 | |
| | 25) Sulawesi Utara | 1 LHA | 60.000.000 | |
| | 26) Gorontalo | 1 LHA | 58.900.000 | |
| | 27) Sulawesi Barat | 1 LHA | 59.200.000 | |
| | 28) Sulawesi Selatan | 1 LHA | 57.200.000 | |
| | 29) Sulawesi Tengah | 1 LHA | 60.700.000 | |
| | 30) Sulawesi Tenggara | 1 LHA | 57.600.000 | |
| | 31) Maluku | 1 LHA | 67.700.000 | |
| | 32) Maluku Utara | 1 LHA | 65.100.000 | |
| | 33) Papua | 1 LHA | 73.600.000 | |
| | 34) Papua Barat | 1 LHA | 79.200.000 | |
| | c SBK Audit Kinerja Luar Provinsi | | | |
| | 1) Aceh | 1 LHA | 124.100.000 | |
| | 2) Sumatera Utara | 1 LHA | 118.500.000 | |
| | 3) Riau | 1 LHA | 105.400.000 | |
| | 4) Kepulauan Riau | 1 LHA | 122.500.000 | |
| | 5) Jambi | 1 LHA | 106.900.000 | |
| | 6) Sumatera Barat | 1 LHA | 113.800.000 | |
| | 7) Sumatera Selatan | 1 LHA | 124.600.000 | |
| | 8) Lampung | 1 LHA | 93.000.000 | |
| | 9) Bengkulu | 1 LHA | 114.000.000 | |
| | 10) Bangka Belitung | 1 LHA | 98.700.000 | |
| | 11) Banten | 1 LHA | 107.500.000 | |
| | 12) Jawa Barat | 1 LHA | 100.300.000 | |
| | 13) Jawa Tengah | 1 LHA | 99.300.000 | |

Abw

| No. | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|-----|-------------------------|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 14) D.I. Yogyakarta | 1 LHA | 136.100.000 | |
| | 15) Jawa Timur | 1 LHA | 118.700.000 | |
| | 16) Bali | 1 LHA | 160.900.000 | |
| | 17) Nusa Tenggara Barat | 1 LHA | 127.400.000 | |
| | 18) Nusa Tenggara Timur | 1 LHA | 135.100.000 | |
| | 19) Kalimantan Barat | 1 LHA | 113.400.000 | |
| | 20) Kalimantan Tengah | 1 LHA | 123.400.000 | |
| | 21) Kalimantan Selatan | 1 LHA | 115.000.000 | |
| | 22) Kalimantan Timur | 1 LHA | 138.700.000 | |
| | 23) Kalimantan Utara | 1 LHA | 121.400.000 | |
| | 24) Sulawesi Utara | 1 LHA | 130.000.000 | |
| | 25) Gorontalo | 1 LHA | 122.300.000 | |
| | 26) Sulawesi Barat | 1 LHA | 120.600.000 | |
| | 27) Sulawesi Selatan | 1 LHA | 129.900.000 | |
| | 28) Sulawesi Tengah | 1 LHA | 138.400.000 | |
| | 29) Sulawesi Tenggara | 1 LHA | 125.900.000 | |
| | 30) Maluku | 1 LHA | 156.900.000 | |
| | 31) Maluku Utara | 1 LHA | 141.700.000 | |
| | 32) Papua | 1 LHA | 177.000.000 | |
| | 33) Papua Barat | 1 LHA | 186.600.000 | |

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

| No. | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|-----|--|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SBK Riset Pembinaan/Kapasitas | 1 Laporan | 20.000.000 | |
| 2 | SBK Riset Dasar | | | |
| | a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian | 1 Laporan | 98.000.000 | |
| | b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT | 1 Laporan | 118.500.000 | |
| | c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat | 1 Laporan | 317.000.000 | |
| | d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi | 1 Laporan | 178.400.000 | |
| | e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 1 Laporan | 93.900.000 | |
| | f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam | 1 Laporan | 245.000.000 | |
| | g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju | 1 Laporan | 162.100.000 | |
| | h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman | 1 Laporan | 151.100.000 | |
| | i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan | 1 Laporan | 133.800.000 | |
| | j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri | 1 Laporan | 130.000.000 | |
| | k SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri | 1 Laporan | 240.000.000 | |
| | l SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) | 1 Laporan | 300.000.000 | |
| | m SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) | 1 Laporan | 490.000.000 | |
| | n SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) | 1 Laporan | 675.000.000 | |
| | o SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri | 1 Laporan | 650.000.000 | |
| 3 | SBK Riset Terapan | | | |
| | a SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian | 1 Laporan | 226.000.000 | |
| | b SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT | 1 Laporan | 231.900.000 | |
| | c SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat | 1 Laporan | 458.800.000 | |
| | d SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi | 1 Laporan | 153.200.000 | |
| | e SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 1 Laporan | 218.400.000 | |
| | f SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam | 1 Laporan | 410.200.000 | |
| | g SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju | 1 Laporan | 380.800.000 | |
| | h SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman | 1 Laporan | 219.000.000 | |
| | i SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan | 1 Laporan | 337.500.000 | |
| | j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri | 1 Naskah Kebijakan | 100.000.000 | |
| | k SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri | 1 Naskah Kebijakan | 175.000.000 | |
| | l SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) | 1 Naskah Kebijakan | 300.000.000 | |
| | m SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) | 1 Naskah Kebijakan | 490.000.000 | |
| | n SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) | 1 Naskah Kebijakan | 675.000.000 | |
| | o SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri | 1 Naskah Kebijakan | 650.000.000 | |
| 4 | SBK Riset Pengembangan | | | |
| | a SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian | 1 Laporan | 578.100.000 | |
| | b SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT | 1 Laporan | 1.134.800.000 | |
| | c SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat | 1 Laporan | 1.058.100.000 | |
| | d SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi | 1 Laporan | 359.600.000 | |
| | e SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 1 Laporan | 412.500.000 | |
| | f SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam | 1 Laporan | 569.600.000 | |
| | g SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju | 1 Laporan | 433.500.000 | |
| | h SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman | 1 Laporan | 311.500.000 | |
| | i SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan | 1 Laporan | 1.093.700.000 | |
| | j SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan | 1 Laporan | 525.000.000 | |
| 5 | SBK Kajian Aktual Strategis | 1 Naskah Kebijakan | 70.000.000 | |

L. Agw

PENJELASAN

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) YANG BERLAKU UNTUK
BEBERAPA/SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

**A. SUB KELUARAN (*SUB OUTPUT*) PERENCANAAN, PEMERIKSAAN,
PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN**

**1. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)**

SBK Dokumen RKA-K/L adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat

SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.

b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L

SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh eselon I/setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.

**2. Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK
Dokumen LAKIN)**

SBK Dokumen LAKIN adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat

SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut.

b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L

SBK Dokumen LAKIN untuk K/L adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

3. Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)

SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Satuan biaya ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*, biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

4. Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)

SBK Diklat Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I/II, III, dan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*, biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

4 Aw

5. Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)

SBK Audit Kinerja adalah besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang didalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama
SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.
- b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota
SBK Audit Kinerja Dalam Kota adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.
- c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi
SBK Audit Kinerja Luar Provinsi adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berbeda provinsi dengan lokasi satuan kerja APIP.

B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

1. SBK Riset Pembinaan/Kapasitas

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final. Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

Abw

- a. Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- b. Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

2. SBK Riset Dasar

SBK Riset Dasar adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Dasar mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset

AGW

Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang energi-EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan

↳ Abw

segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Dasar Bidang Material Maju adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Dasar Bidang Kemaritiman adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Dasar Bidang Kebencanaan adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian guna mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.

k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi,

model, atau konsep atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.

- l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.
- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek

↳ Abw

penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.

3. SBK Riset Terapan

SBK Riset Terapan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Terapan mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi,

Abu

integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

- b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.
- c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
- d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
- f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam
SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah

Abw

sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif pendukung industri.

h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur

Abu

terhadap objek yang ada didalam negeri.

- k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literature terhadap objek yang ada di luar negeri.
- l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah

dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.

- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.
- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

4. **SBK Riset Pengembangan**

SBK Riset Pengembangan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe

Abw

sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri, perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan *veteriner*, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

Abu

- d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
- e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
- f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.
- g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.
- h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat

kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan.

- i. **SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan**
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non alam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. **SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan**
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

5. SBK Kajian Aktual Strategis

SBK Kajian Aktual Strategis adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Catatan Umum:

1. Terhadap SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;

Abu

- g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*; dan/atau
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri.
2. Terhadap SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. buku nasional;
 - f. buku internasional;
 - g. naskah kebijakan; dan/atau
 - h. artikel populer di media cetak.
3. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan; dan/atau
 - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru.
4. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;

Handwritten signature or mark.

- f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*; dan/atau
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri.
5. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
 - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
 - l. jenis hasil penangkaran;
 - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan; dan/atau
 - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru.
6. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi,

- domestikasi, *breeding*;
- p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/atau
 - r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
7. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/*strain* fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/atau
 - r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
8. Terhadap SBK Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;

- e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
 - k. galur perbaikan;
 - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
 - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
 - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
 - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding* (ornamental);
 - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
 - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
 - s. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
 - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
 - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
 - v. prototipe laik *preklinis*; dan/atau
 - w. herbal terstandar.
9. Terhadap SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri; dan/atau
 - j. taman tematik, kebun, koleksi.
10. Terhadap SBK Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-

Abw

Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
 - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
 - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
 - d. publikasi/artikel jurnal regional/Internasional terindeks;
 - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
 - f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
 - g. paten/hak cipta terdaftar;
 - h. paten/hak cipta *granted*;
 - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
 - j. taman tematik, kebun, koleksi;
 - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 1*;
 - l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 2*; dan/atau
 - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*.
11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

| No | Uraian | Besaran |
|----|---|------------|
| 1 | Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi | 3.000.000 |
| 2 | Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi | 10.000.000 |
| 3 | Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks | 15.000.000 |
| 4 | Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks | 50.000.000 |
| 5 | Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan | 60.000.000 |
| 6 | Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan | 65.000.000 |
| 7 | Paten/hak cipta terdaftar | 75.000.000 |
| 8 | Paten/hak cipta <i>granted</i> | 80.000.000 |
| 9 | Paten/hak cipta terpakai di industri | 90.000.000 |
| 10 | Buku nasional | 30.000.000 |
| 11 | Buku internasional | 65.000.000 |
| 12 | Naskah kebijakan | 25.000.000 |
| 13 | Artikel populer di media cetak | 2.000.000 |

Abu

| No | Uraian | Besaran |
|----|---|---------------|
| 14 | Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan | 50.000.000 |
| 15 | Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru | 75.000.000 |
| 16 | Material untuk produk biologi | 50.000.000 |
| 17 | Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan | 75.000.000 |
| 18 | Jenis hasil penangkaran | 100.000.000 |
| 19 | Temuan senyawa baru sintetis untuk obat | 100.000.000 |
| 20 | Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat | 150.000.000 |
| 21 | Temuan senyawa/ <i>squence</i> DNA penambahan | 100.000.000 |
| 22 | Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat | 150.000.000 |
| 23 | Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati) | 150.000.000 |
| 24 | Galur perbaikan | 150.000.000 |
| 25 | PVT/varietas terdaftar | 1.000.000.000 |
| 26 | PVT/varietas terdaftar ornamental | 100.000.000 |
| 27 | Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i> | 200.000.000 |
| 28 | Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i> | 600.000.000 |
| 29 | Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i> | 100.000.000 |
| 30 | Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i> | 500.000.000 |
| 31 | Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi | 200.000.000 |
| 32 | Jenis kehati sebagai <i>bioindicator</i> kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon | 350.000.000 |
| 33 | Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i> | 1.000.000.000 |

4 ABW

| No | Uraian | Besaran |
|----|---|----------------|
| 34 | Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi | 500.000.000 |
| 35 | Prototipe laik <i>preklinis</i> | 1.000.000.000 |
| 36 | Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i> | 1.000.000.000 |
| 37 | Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i> | 6.000.000.000 |
| 38 | Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i> | 10.000.000.000 |
| 39 | Herbal terstandar | 200.000.000 |
| 40 | Taman tematik, kebun, koleksi | 300.000.000 |

12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

- a. Ketersediaan alokasi anggaran;
- b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - 3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 106 /PMK.02/2016
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK SATU
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERTENTU

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 004.01 | Sekretariat Jenderal | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Penilaian Kompetensi | 500 Laporan | 4.475.892.000 | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Laporan Hasil Pemeriksaan dan Reviu | | | |
| | 2 Laporan Reviu SPM Kelembagaan | 4 Laporan | 1.344.158.000 | |
| | 3 Laporan Reviu atas Konsep Laporan Keuangan BPK | 3 Laporan | 3.353.449.000 | |
| | 4 Laporan Reviu Atas Konsep RKA-K/L BPK | 1 Laporan | 496.914.000 | |
| | 5 Laporan Hasil Penilaian Kualitas Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 1.950.066.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | 6 Laporan Pemberkasan | 1 Laporan | 127.025.000 | |
| | 7 Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Pemeriksaan | 1 Laporan | 198.447.000 | |
| | 8 LHP Inspektorat Utama | 1 Laporan | 210.800.000 | |
| | Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara | | | |
| | 9 Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa | 1 Angkatan | 767.788.000 | |
| | 10 Diklat Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Keuangan | 1 Angkatan | 184.390.000 | |
| | 11 Diklat Peningkatan Keterampilan Kelembagaan | 1 Angkatan | 183.756.000 | |
| | 12 Diklat Sertifikasi Akuntan Publik | 1 Angkatan | 97.943.000 | |
| | 13 Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara | 1 Angkatan | 95.855.000 | |
| | 14 Diklat Teknis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara | 1 Angkatan | 95.655.000 | |
| 004.02 | BPK Pusat | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 LHP LK Pemerintah Pusat | 1 LHP | 11.187.760.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 2 Laporan hasil evaluasi KAP | 1 Laporan | 182.465.000 | |
| | 3 LHP AKN I | 1 LHP | 990.000.000 | |
| | 4 LHP AKN II | 1 LHP | 1.491.703.000 | |
| | 5 LHP AKN III | 1 LHP | 790.913.000 | |
| | 6 LHP AKN IV | 1 LHP | 1.972.617.000 | |
| | 7 LHP AKN V | 1 LHP | 1.646.265.000 | |
| | 8 LHP AKN VI | 1 LHP | 1.907.926.000 | |
| | 9 LHP AKN VII | 1 LHP | 991.946.000 | |
| | 10 LHP Investigatif | 1 LHP | 793.629.000 | |
| | 11 LHP Tematik | 1 LHP | 8.034.014.000 | |
| | 12 LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh | 1 LHP | 473.311.000 | |
| | 13 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumut | 1 LHP | 394.690.000 | |
| | 14 LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau | 1 LHP | 390.793.000 | |
| | 15 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepri | 1 LHP | 366.627.000 | |
| | 16 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi | 1 LHP | 358.734.000 | |
| | 17 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumbar | 1 LHP | 361.855.000 | |
| | 18 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumsel | 1 LHP | 419.810.000 | |
| | 19 LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung | 1 LHP | 358.005.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu | 1 LHP | 380.700.000 | |
| 21 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel | 1 LHP | 410.000.000 | |
| 22 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten | 1 LHP | 401.322.000 | |
| 23 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Jabar | 1 LHP | 449.000.000 | |
| 24 | LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta | 1 LHP | 795.168.000 | |
| 25 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Jateng | 1 LHP | 420.000.000 | |
| 26 | LHP BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta | 1 LHP | 363.450.000 | |
| 27 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Jatim | 1 LHP | 422.956.000 | |
| 28 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali | 1 LHP | 478.227.000 | |
| 29 | LHP BPK Perwakilan Provinsi NTB | 1 LHP | 372.161.000 | |
| 30 | LHP BPK Perwakilan Provinsi NTT | 1 LHP | 426.591.000 | |
| 31 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalbar | 1 LHP | 429.031.000 | |
| 32 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalteng | 1 LHP | 388.392.000 | |
| 33 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalsel | 1 LHP | 434.097.000 | |
| 34 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kaltim | 1 LHP | 503.745.000 | |
| 35 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Kaltara | 1 LHP | 431.592.000 | |
| 36 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulut | 1 LHP | 450.550.000 | |
| 37 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo | 1 LHP | 363.691.000 | |
| 38 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulbar | 1 LHP | 385.718.000 | |
| 39 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulsel | 1 LHP | 443.961.000 | |
| 40 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulteng | 1 LHP | 399.605.000 | |
| 41 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Sultra | 1 LHP | 394.524.000 | |
| 42 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku | 1 LHP | 400.000.000 | |
| 43 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku | 1 LHP | 402.852.000 | |
| 44 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua | 1 LHP | 490.330.000 | |
| 45 | LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat | 1 LHP | 490.706.000 | |
| SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | | |
| Laporan Pemantauan AKN I | | | | |
| 46 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 48.059.000 | |
| 47 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 59.219.000 | |
| Laporan Pemantauan AKN II | | | | |
| 48 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 45.739.000 | |
| 49 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 59.219.000 | |
| Laporan Pemantauan AKN III | | | | |
| 50 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 45.413.000 | |
| 51 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 57.993.000 | |
| Laporan Pemantauan AKN IV | | | | |
| 52 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 46.426.000 | |
| 53 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 59.219.000 | |
| Laporan Pemantauan AKN V | | | | |
| 54 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 48.433.000 | |
| 55 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 126.473.000 | |
| Laporan Pemantauan AKN VI | | | | |
| 56 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 47.573.000 | |
| 57 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 57.897.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Pemantauan AKN VII | | | |
| 58 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 44.302.000 | |
| 59 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 59.219.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Aceh | | | |
| 60 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.973.000 | |
| 61 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 26.834.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumut | | | |
| 62 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.733.000 | |
| 63 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 28.058.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Riau | | | |
| 64 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.493.000 | |
| 65 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 25.070.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kepri | | | |
| 66 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 9.153.000 | |
| 67 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 28.238.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jambi | | | |
| 68 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.727.000 | |
| 69 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 26.264.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumbar | | | |
| 70 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.793.000 | |
| 71 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 27.230.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel | | | |
| 72 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.973.000 | |
| 73 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 30.122.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Lampung | | | |
| 74 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.793.000 | |
| 75 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 24.638.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu | | | |
| 76 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.793.000 | |
| 77 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 27.058.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel | | | |
| 78 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.673.000 | |
| 79 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 24.146.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Banten | | | |
| 80 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 9.213.000 | |
| 81 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 33.842.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jabar | | | |
| 82 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.973.000 | |
| 83 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 28.378.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta | | | |
| 84 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 30.890.000 | |
| 85 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 51.906.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jateng | | | |
| 86 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.373.000 | |
| 87 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 23.994.000 | |

h Aw

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta | | | |
| 88 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.193.000 | |
| 89 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 32.146.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jatim | | | |
| 90 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.913.000 | |
| 91 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 28.786.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bali | | | |
| 92 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.853.000 | |
| 93 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 36.634.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi NTB | | | |
| 94 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.673.000 | |
| 95 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 29.950.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi NTT | | | |
| 96 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.913.000 | |
| 97 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 27.594.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar | | | |
| 98 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.963.000 | |
| 99 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 27.822.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalteng | | | |
| 100 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 9.133.000 | |
| 101 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 30.002.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kalsel | | | |
| 102 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.793.000 | |
| 103 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 26.538.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kaltim | | | |
| 104 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.913.000 | |
| 105 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 36.138.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulut | | | |
| 106 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 9.093.000 | |
| 107 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 26.762.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo | | | |
| 108 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.673.000 | |
| 109 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 27.994.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulbar | | | |
| 110 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 9.113.000 | |
| 111 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 26.986.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulsel | | | |
| 112 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 9.153.000 | |
| 113 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 29.650.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sulteng | | | |
| 114 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.673.000 | |
| 115 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 29.054.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sultra | | | |
| 116 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.913.000 | |
| 117 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 28.486.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku | | | |
| 118 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 9.053.000 | |
| 119 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 39.618.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Malut | | | |
| 120 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 10.253.000 | |
| 121 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 33.514.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Papua | | | |
| 122 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 10.653.000 | |
| 123 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 45.338.000 | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat | | | |
| 124 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 10.413.000 | |
| 125 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 40.386.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kaltara | | | |
| 126 | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 1 Laporan | 8.673.000 | |
| 127 | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 1 Laporan | 30.960.000 | |

ABW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 005.02 | Kepaniteraan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Putusan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali | | | |
| | 1 Penyelesaian Perkara Pidana Umum | 1 Perkara | 1.460.766 | |
| | 2 Penyelesaian Perkara Pidana Khusus | 1 Perkara | 1.502.234 | |
| | 3 Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta rupiah | 1 Perkara | 1.102.920 | |
| | 4 Penyelesaian Perkara Pidana Militer | 1 Perkara | 1.205.333 | |
| 005.03 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan | | | |
| | 1 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kupang | 1 perkara | 925.000 | |
| | 2 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Ambon | 1 perkara | 775.000 | |
| | 3 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Maluku Utara | 1 perkara | 1.800.000 | |
| | 4 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Papua | 1 perkara | 2.350.000 | |
| | 5 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Aceh | 1 perkara | 1.450.000 | |
| | 6 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sumatera Utara | 1 perkara | 1.550.000 | |
| | 7 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sumatera Barat | 1 perkara | 1.550.000 | |
| | 8 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Riau | 1 perkara | 1.550.000 | |
| | 9 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Jambi | 1 perkara | 1.550.000 | |
| | 10 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sumatera Selatan | 1 perkara | 1.550.000 | |
| | 11 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Bengkulu | 1 perkara | 1.550.000 | |
| | 12 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Lampung | 1 perkara | 775.000 | |
| | 13 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Bangka Belitung | 1 perkara | 1.075.000 | |
| | 14 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kepulauan Riau | 1 perkara | 775.000 | |
| | 15 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah DKI Jakarta | 1 perkara | 875.000 | |
| | 16 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Jawa Barat | 1 perkara | 1.750.000 | |
| | 17 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah DI Yogyakarta | 1 perkara | 1.650.000 | |
| | 18 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Jawa Timur | 1 perkara | 1.550.000 | |
| | 19 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Banten | 1 perkara | 1.550.000 | |
| | 20 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Barat | 1 perkara | 1.450.000 | |
| | 21 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Tengah | 1 perkara | 1.550.000 | |
| | 22 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Selatan | 1 perkara | 1.750.000 | |
| | 23 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Timur | 1 perkara | | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sulawesi Utara | 1 perkara | 1.550.000 | |
| 25 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Gorontalo | 1 perkara | 1.550.000 | |
| 26 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sulawesi Tengah | 1 perkara | 1.550.000 | |
| 27 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sulawesi Selatan | 1 perkara | 1.750.000 | |
| 28 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sulawesi Tenggara | 1 perkara | 1.550.000 | |
| 29 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Bali | 1 perkara | 975.000 | |
| 30 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Nusa Tenggara Barat | 1 perkara | 875.000 | |
| | Perkara yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu | | | |
| 31 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur | 1 Perkara | 597.800 | |
| 32 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur | 1 Perkara | 944.300 | |
| 33 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur | 1 Perkara | 1.573.000 | |
| 34 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur | 1 Perkara | 796.000 | |
| 35 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur | 1 Perkara | 897.000 | |
| 36 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku | 1 Perkara | 569.000 | |
| 37 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku | 1 Perkara | 915.500 | |
| 38 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku | 1 Perkara | 1.521.000 | |
| 39 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku | 1 Perkara | 956.000 | |
| 40 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku | 1 Perkara | 1.057.000 | |
| 41 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara | 1 Perkara | 590.200 | |
| 42 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara | 1 Perkara | 936.700 | |
| 43 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara | 1 Perkara | 1.553.000 | |
| 44 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara | 1 Perkara | 876.000 | |
| 45 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara | 1 Perkara | 977.000 | |
| 46 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua | 1 Perkara | 689.800 | |
| 47 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua | 1 Perkara | 1.036.300 | |
| 48 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua | 1 Perkara | 1.665.000 | |
| 49 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua | 1 Perkara | 956.000 | |
| 50 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua | 1 Perkara | 1.057.000 | |
| 51 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Aceh | 1 Perkara | 672.800 | |
| 52 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Aceh | 1 Perkara | 1.004.900 | |
| 53 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Aceh | 1 Perkara | 1.497.000 | |
| 54 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Aceh | 1 Perkara | 816.000 | |
| 55 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Aceh | 1 Perkara | 1.042.000 | |
| 56 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Utara | 1 Perkara | 695.500 | |
| 57 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Utara | 1 Perkara | 1.028.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 58 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Utara | 1 Perkara | 1.507.000 | |
| | 59 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Utara | 1 Perkara | 816.000 | |
| | 60 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Utara | 1 Perkara | 1.042.000 | |
| | 61 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Barat | 1 Perkara | 694.500 | |
| | 62 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Barat | 1 Perkara | 1.027.000 | |
| | 63 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Barat | 1 Perkara | 1.503.000 | |
| | 64 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Barat | 1 Perkara | 816.000 | |
| | 65 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Barat | 1 Perkara | 1.042.000 | |
| | 66 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau | 1 Perkara | 694.000 | |
| | 67 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau | 1 Perkara | 1.026.500 | |
| | 68 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau | 1 Perkara | 1.501.000 | |
| | 69 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau | 1 Perkara | 816.000 | |
| | 70 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau | 1 Perkara | 1.042.000 | |
| | 71 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi | 1 Perkara | 694.000 | |
| | 72 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi | 1 Perkara | 1.026.500 | |
| | 73 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi | 1 Perkara | 1.501.000 | |
| | 74 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi | 1 Perkara | 816.000 | |
| | 75 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi | 1 Perkara | 1.042.000 | |
| | 76 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Selatan | 1 Perkara | 695.000 | |
| | 77 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Selatan | 1 Perkara | 1.027.500 | |
| | 78 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Selatan | 1 Perkara | 1.505.000 | |
| | 79 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Selatan | 1 Perkara | 816.000 | |
| | 80 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Selatan | 1 Perkara | 1.042.000 | |
| | 81 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu | 1 Perkara | 695.000 | |
| | 82 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu | 1 Perkara | 1.027.500 | |
| | 83 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu | 1 Perkara | 1.505.000 | |
| | 84 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu | 1 Perkara | 816.000 | |
| | 85 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu | 1 Perkara | 1.042.000 | |
| | 86 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung | 1 Perkara | 694.500 | |
| | 87 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung | 1 Perkara | 1.027.000 | |
| | 88 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung | 1 Perkara | 1.503.000 | |
| | 89 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung | 1 Perkara | 816.000 | |
| | 90 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung | 1 Perkara | 1.042.000 | |
| | 91 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung | 1 Perkara | 695.000 | |
| | 92 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung | 1 Perkara | 1.027.500 | |
| | 93 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung | 1 Perkara | 1.505.000 | |
| | 94 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung | 1 Perkara | 816.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 95 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung | 1 Perkara | 1.042.000 | |
| 96 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta | 1 Perkara | 593.700 | |
| 97 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta | 1 Perkara | 924.600 | |
| 98 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta | 1 Perkara | 1.495.000 | |
| 99 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta | 1 Perkara | 796.000 | |
| 100 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta | 1 Perkara | 1.022.000 | |
| 101 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jawa Barat | 1 Perkara | 543.200 | |
| 102 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat | 1 Perkara | 889.700 | |
| 103 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat | 1 Perkara | 1.376.000 | |
| 104 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat | 1 Perkara | 796.000 | |
| 105 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat | 1 Perkara | 897.000 | |
| 106 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah | 1 Perkara | 548.000 | |
| 107 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah | 1 Perkara | 896.500 | |
| 108 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah | 1 Perkara | 1.501.000 | |
| 109 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah | 1 Perkara | 796.000 | |
| 110 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah | 1 Perkara | 897.000 | |
| 111 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DI Yogyakarta | 1 Perkara | 542.200 | |
| 112 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DI Yogyakarta | 1 Perkara | 889.700 | |
| 113 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DI Yogyakarta | 1 Perkara | 1.533.000 | |
| 114 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DI Yogyakarta | 1 Perkara | 796.000 | |
| 115 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DI Yogyakarta | 1 Perkara | 897.000 | |
| 116 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur | 1 Perkara | 562.600 | |
| 117 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur | 1 Perkara | 909.100 | |
| 118 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur | 1 Perkara | 1.517.000 | |
| 119 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur | 1 Perkara | 796.000 | |
| 120 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur | 1 Perkara | 897.000 | |
| 121 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten | 1 Perkara | 549.500 | |
| 122 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten | 1 Perkara | 896.500 | |
| 123 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten | 1 Perkara | 1.533.000 | |
| 124 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten | 1 Perkara | 816.000 | |
| 125 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten | 1 Perkara | 897.000 | |
| 126 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat | 1 Perkara | 553.500 | |
| 127 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat | 1 Perkara | 890.000 | |
| 128 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat | 1 Perkara | 1.507.000 | |
| 129 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat | 1 Perkara | 836.000 | |
| 130 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat | 1 Perkara | 937.000 | |
| 131 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah | 1 Perkara | 533.400 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 132 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah | 1 Perkara | 885.100 | |
| | 133 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah | 1 Perkara | 1.501.000 | |
| | 134 Perkara Pidana yang Disampaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah | 1 Perkara | 796.000 | |
| | 135 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah | 1 Perkara | 937.000 | |
| | 136 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan | 1 Perkara | 538.000 | |
| | 137 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan | 1 Perkara | 886.500 | |
| | 138 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan | 1 Perkara | 1.501.000 | |
| | 139 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan | 1 Perkara | 796.000 | |
| | 140 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan | 1 Perkara | 897.000 | |
| | 141 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur | 1 Perkara | 547.200 | |
| | 142 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur | 1 Perkara | 895.700 | |
| | 143 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur | 1 Perkara | 1.533.000 | |
| | 144 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur | 1 Perkara | 796.000 | |
| | 145 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur | 1 Perkara | 897.000 | |
| | 146 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara | 1 Perkara | 538.000 | |
| | 147 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara | 1 Perkara | 886.500 | |
| | 148 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara | 1 Perkara | 1.501.000 | |
| | 149 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara | 1 Perkara | 796.000 | |
| | 150 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara | 1 Perkara | 897.000 | |
| | 151 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo | 1 Perkara | 555.000 | |
| | 152 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo | 1 Perkara | 896.500 | |
| | 153 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo | 1 Perkara | 1.517.000 | |
| | 154 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo | 1 Perkara | 776.000 | |
| | 155 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo | 1 Perkara | 877.000 | |
| | 156 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah | 1 Perkara | 560.500 | |
| | 157 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah | 1 Perkara | 902.000 | |
| | 158 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah | 1 Perkara | 1.515.000 | |
| | 159 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah | 1 Perkara | 836.000 | |
| | 160 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah | 1 Perkara | 937.000 | |
| | 161 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan | 1 Perkara | 583.200 | |
| | 162 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan | 1 Perkara | 929.700 | |
| | 163 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan | 1 Perkara | 1.541.000 | |
| | 164 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan | 1 Perkara | 836.000 | |
| | 165 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan | 1 Perkara | 937.000 | |
| | 166 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara | 1 Perkara | 549.500 | |
| | 167 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara | 1 Perkara | 896.000 | |
| | 168 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara | 1 Perkara | 1.515.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 169 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara | 1 Perkara | 776.000 | |
| 170 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara | 1 Perkara | 877.000 | |
| 171 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bali | 1 Perkara | 604.900 | |
| 172 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bali | 1 Perkara | 955.400 | |
| 173 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bali | 1 Perkara | 1.567.000 | |
| 174 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bali | 1 Perkara | 816.000 | |
| 175 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bali | 1 Perkara | 917.000 | |
| 176 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat | 1 Perkara | 554.200 | |
| 177 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat | 1 Perkara | 900.700 | |
| 178 | Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat | 1 Perkara | 1.537.000 | |
| 179 | Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat | 1 Perkara | 796.000 | |
| 180 | Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat | 1 Perkara | 897.000 | |
| | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara | | | |
| 181 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kupang | 1 Perkara | 810.000 | |
| 182 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Ambon | 1 Perkara | 750.000 | |
| 183 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara | 1 Perkara | 790.000 | |
| 184 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jayapura | 1 Perkara | 910.000 | |
| 185 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Aceh | 1 Perkara | 730.000 | |
| 186 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara | 1 Perkara | 730.000 | |
| 187 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Barat | 1 Perkara | 730.000 | |
| 188 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau | 1 Perkara | 730.000 | |
| 189 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi | 1 Perkara | 750.000 | |
| 190 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Selatan | 1 Perkara | 750.000 | |
| 191 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu | 1 Perkara | 750.000 | |
| 192 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung | 1 Perkara | 750.000 | |
| 193 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan Bangka Belitung | 1 Perkara | 750.000 | |
| 194 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan Kepulauan Riau | 1 Perkara | 750.000 | |
| 195 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan DKI Jakarta | 1 Perkara | 870.000 | |
| 196 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan Jawa Barat | 1 Perkara | 790.000 | |
| 197 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DI Yogyakarta | 1 Perkara | 790.000 | |
| 198 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Timur | 1 Perkara | 770.000 | |
| 199 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banten | 1 Perkara | 750.000 | |
| 200 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat | 1 Perkara | 750.000 | |
| 201 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah | 1 Perkara | 450.200 | |
| 202 | Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Selatan | 1 Perkara | 750.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 203 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Timur | 1 Perkara | 790.000 | |
| | 204 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Utara | 1 Perkara | 750.000 | |
| | 205 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Gorontalo | 1 Perkara | 750.000 | |
| | 206 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tengah | 1 Perkara | 750.000 | |
| | 207 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan | 1 Perkara | 790.000 | |
| | 208 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tenggara | 1 Perkara | 750.000 | |
| | 209 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bali | 1 Perkara | 830.000 | |
| | 210 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Barat | 1 Perkara | 790.000 | |
| 005.06 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Pendalaman Materi | | | |
| | 1 Diklat Tenaga Teknis Peradilan/Pendalaman Materi | 1 Orang | 12.469.325 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia (006)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 006.01 | Kejaksaan Republik Indonesia | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang Diselenggarakan | 1 Angkatan | 35.397.100.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 2 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah I | 1 Lapdu | 3.700.000 | |
| | 3 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah I | 1 Lapdu | 8.300.000 | |
| | 4 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah II | 1 Lapdu | 3.700.000 | |
| | 5 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah II | 1 Lapdu | 8.300.000 | |
| | 6 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah III | 1 Lapdu | 3.700.000 | |
| | 7 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah III | 1 Lapdu | 8.300.000 | |
| | 8 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah IV | 1 Lapdu | 3.700.000 | |
| | 9 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah IV | 1 Lapdu | 8.300.000 | |
| | 10 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah V | 1 Lapdu | 3.700.000 | |
| | 11 Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah V | 1 Lapdu | 8.300.000 | |

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Dalam Negeri (010)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 010.01 | Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Literatur | | | | |
| | 1 Penyusunan Literatur Pengajaran Program D4 dan S1 Semester Ganjil dan Genap | 50 | Literatur | 2.090.031.000 | |
| | GBPP/SAP | | | | |
| | 2 Penyusunan Garis Besar Pokok Pengajaran (GBPP)/ SAP/Syllabus (Program D4 dan S1) Semester Ganjil dan Genap | 15 | GBPP/SAP/ Syllabus | 546.660.000 | |
| | 3 Penyusunan Garis Besar Pokok Pelatihan (GBPP)/SAP/Syllabus (Program D4 dan S1) Semester Ganjil dan Genap | 12 | GBPP/SAP/ Syllabus | 249.895.000 | |
| 010.03 | Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Bantuan Keuangan Parpol | | | | |
| | 1 Jumlah Parpol yang Mendapatkan Bantuan Keuangan dan Peningkatan Kapasitas | 122.003.650 | Suara | 13.925.300.000 | |
| 010.06 | Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah | | | | |
| | 1 Evaluasi Raperda tentang APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran APBD Provinsi | 34 | Peraturan | 734.400.000 | |
| | 2 Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi | 34 | Peraturan | 734.400.000 | |
| | Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah | | | | |
| | 3 Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 34 | Peraturan | 734.400.000 | |
| 010.12 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Angkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Pembelajaran | | | | |
| | 1 Diklat 3 Hari | 1 | Angkatan | 54.135.000 | |
| | 2 Diklat 5 Hari | 1 | Angkatan | 74.965.000 | |
| | Diklat Teknis Bidang Keuangan Daerah | | | | |
| | 3 Diklat 5 Hari | 1 | Angkatan | 74.965.000 | |
| | Angkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kepamongprajaan | | | | |
| | 4 Diklat 5 Hari | 1 | Angkatan | 74.965.000 | |
| | Angkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Kompetensi Jabfung Kemendagri | | | | |
| | 5 Diklat 5 Hari | 1 | Angkatan | 74.965.000 | |
| | 6 Diklat 6 Hari | 1 | Angkatan | 84.025.000 | |
| | 7 Diklat 7 Hari | 1 | Angkatan | 92.385.000 | |
| | 8 Diklat 12 Hari | 1 | Angkatan | 138.715.000 | |
| | 9 Diklat 15 Hari | 1 | Angkatan | 176.990.000 | |
| | 10 Diklat 35 Hari | 1 | Angkatan | 309.765.000 | |
| | Angkatan Diklat Teknis Pemerintah Daerah | | | | |
| | 11 Diklat 5 Hari | 1 | Angkatan | 74.965.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 012.01 | Kementerian Pertahanan | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian | 1 Orang | 4.032.000 | |
| | 2 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah | 1 Orang | 4.032.000 | |
| | 3 Lulusan Kursus Intensif Dasar Instruktur Bahasa Inggris | 1 Orang | 4.032.000 | |
| | 4 Lulusan Kursus Persiapan Casis Sesko | 1 Orang | 5.732.000 | |
| | 5 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Menengah | 1 Orang | 5.732.000 | |
| | 6 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia PA SAF | 1 Orang | 5.732.000 | |
| | 7 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Asing (Non Inggris) | 1 Orang | 4.032.000 | |
| | 8 Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Tk. Pertama Pertahanan | 1 Orang | 4.154.783 | |
| | 9 Lulusan Kursus Dasar Manajemen Pertahanan | 1 Orang | 4.189.644 | |
| | 10 Lulusan Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan | 1 Orang | 5.930.955 | |
| | 11 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan | 1 Orang | 4.101.877 | |
| | 12 Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Tk. Muda Pertahanan | 1 Orang | 4.196.533 | |
| | 13 Lulusan Kursus Manajemen Bendaharawan Keuangan Pertahanan | 1 Orang | 4.044.433 | |
| | 14 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan | 1 Orang | 4.936.933 | |
| | 15 Lulusan Kursus Manajemen Penanggulangan Bencana | 1 Orang | 5.277.175 | |
| | 16 Lulusan Kursus Manajemen Pembangunan Karakter Bangsa | 1 Orang | 5.522.550 | |
| | 17 Lulusan Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan | 1 Orang | 3.921.433 | |
| | 18 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Penyusun dan Jabatan Setingkat | 1 Orang | 4.159.400 | |
| | 19 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pengolah dan Jabatan Setingkat | 1 Orang | 4.159.400 | |
| | 20 Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pengadministrasi dan Jabatan Setingkat | 1 Orang | 4.187.600 | |
| | 21 Lulusan Diklat Teknis Ahli Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS | 1 Orang | 3.972.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer | | | |
| | 22 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 5.832.000 | |
| | 23 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 6.252.000 | |
| | 24 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 6.552.000 | |
| | 25 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 5.952.000 | |
| | 26 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 14.652.000 | |
| | 27 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| | 28 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| | 29 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK | 1 Laporan | 2.626.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum | | | |
| | 30 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 11.856.000 | |
| | 31 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 13.536.000 | |
| | 32 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 14.736.000 | |
| | 33 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 12.336.000 | |
| | 34 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 47.136.000 | |
| | 35 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding | 1 Laporan | 4.105.000 | |
| | 36 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi | 1 Laporan | 3.150.000 | |
| | 37 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK | 1 Laporan | 5.699.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat | | | |
| | 38 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 25.524.000 | |
| | 39 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 29.374.000 | |
| | 40 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 32.124.000 | |
| | 41 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 26.624.000 | |

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 106.374.000 | |
| 43 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1 | 1 Laporan | 7.567.000 | |
| 44 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2 | 1 Laporan | 8.267.000 | |
| 45 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3 | 1 Laporan | 8.767.000 | |
| 46 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4 | 1 Laporan | 7.767.000 | |
| 47 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5 | 1 Laporan | 22.267.000 | |
| 48 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1 | 1 Laporan | 12.859.000 | |
| 49 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2 | 1 Laporan | 14.109.000 | |
| 50 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3 | 1 Laporan | 15.059.000 | |
| 51 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4 | 1 Laporan | 13.759.000 | |
| 52 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5 | 1 Laporan | 35.709.000 | |
| 53 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 10.774.000 | |
| 54 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2 | 1 Laporan | 11.524.000 | |
| 55 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3 | 1 Laporan | 12.074.000 | |
| 56 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4 | 1 Laporan | 11.124.000 | |
| 57 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5 | 1 Laporan | 25.674.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat | | | |
| 58 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 23.667.000 | |
| 59 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 27.867.000 | |
| 60 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 30.867.000 | |
| 61 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 24.867.000 | |
| 62 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 111.867.000 | |
| 63 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1 | 1 Laporan | 8.711.000 | |
| 64 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2 | 1 Laporan | 10.461.000 | |
| 65 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3 | 1 Laporan | 11.711.000 | |
| 66 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4 | 1 Laporan | 9.211.000 | |
| 67 | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5 | 1 Laporan | 45.461.000 | |
| 68 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1 | 1 Laporan | 13.243.000 | |
| 69 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2 | 1 Laporan | 15.193.000 | |
| 70 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3 | 1 Laporan | 16.643.000 | |
| 71 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4 | 1 Laporan | 14.343.000 | |
| 72 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5 | 1 Laporan | 50.793.000 | |
| 73 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 13.328.000 | |
| 74 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2 | 1 Laporan | 16.128.000 | |
| 75 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3 | 1 Laporan | 18.128.000 | |
| 76 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4 | 1 Laporan | 14.128.000 | |
| 77 | Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5 | 1 Laporan | 72.128.000 | |
| | Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar | | | |
| 78 | KIBINA Tk. Dasar Sesko Matra | 1 Orang | 5.732.000 | |
| 79 | KIBINA Tk. Dasar Sesko TNI | 1 Orang | 5.732.000 | |
| | Lulusan Kursus Intensif Inggris | | | |
| 80 | KIBI Reguler | 1 Orang | 4.032.000 | |
| 81 | KIBI Executive, PNS Kemhan, TOEFL, Alih Bahasa, IELTS | 1 Orang | 4.032.000 | |
| | Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan dan Pengelolaan BMN Pertahanan | | | |
| 82 | Kursus Manajemen Pengadaan Pertahanan | 1 Orang | 3.855.450 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 83 Kursus Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Pertahanan Lulusan Diklat Minu | 1 Orang | 4.037.200 | |
| | 84 Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat II | 1 Orang | 3.595.900 | |
| | 85 Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat III Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan | 1 Orang | 4.116.400 | |
| | 86 Diklat Teknis Administrasi Jabatan Operator Komputer dan Jabatan Agendaris/Jabatan Setingkat | 1 Orang | 3.596.800 | |
| 012.21 | Markas Besar TNI | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Peserta Penggelaran Satgas Operasi Tempur TNI | 1 Orang | 260.116 | |
| | 2 Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI | 1 Orang | 327.668 | |
| | 3 Peserta Operasi Rutin Integratif | 1 Orang | 57.988 | |
| | 4 Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI | 1 Orang | 423.600 | |
| | 5 Lulusan Sesko TNI | 1 Orang | 5.911.290 | |
| | 6 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri | 1 Orang | 1.245.270 | |
| | 7 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri | 1 Orang | 111.272 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Peserta Penggelaran Satgas Operasi Pemukul TNI | | | |
| | 8 Perbatasan/Pulau Terluar | 1 Orang | 250.018 | |
| | 9 Dacrah Rawan (Rahwan) Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia | 1 Orang | 267.518 | |
| | 10 Seleksi Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 1.679.673 | |
| | 11 Kegiatan Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 6.920.394 | |
| | 12 Seleksi Satgas Force Protection Company (FPC) TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 1.577.383 | |
| | 13 Kegiatan Satgas Force Protection Company (FPC) TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 9.206.766 | |
| | 14 Seleksi Satgas Military Police Unit (MPU) TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 2.205.366 | |
| | 15 Kegiatan Satgas Military Police Unit (MPU) TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 11.050.200 | |
| | 16 Seleksi Satgas FHQSU TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 2.690.150 | |
| | 17 Kegiatan Satgas FHQSU TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 12.722.260 | |
| | 18 Seleksi Satgas MCOU TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 2.819.833 | |
| | 19 Kegiatan Satgas MCOU TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 19.140.000 | |
| | 20 Seleksi Satgas CIMIC TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 5.657.333 | |
| | 21 Kegiatan Satgas CIMIC TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 38.630.500 | |
| | 22 Seleksi Satgas Level II Hospital TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 4.097.888 | |
| | 23 Kegiatan Satgas Level II Hospital TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 27.923.000 | |
| | 24 Seleksi Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 2.304.855 | |
| | 25 Kegiatan Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI KONGA UNIFIL Lebanon | 1 Giat | 7.794.803 | |
| | 26 Seleksi Yon Komposit TNI KONGA UNAMID Darfur | 1 Giat | 1.691.328 | |
| | 27 Kegiatan Satgas Yon Komposit TNI KONGA UNAMID Darfur | 1 Giat | 6.687.753 | |
| | 28 Seleksi Satgas Yon Komposit TNI KONGA MINUSCA Central African Republic | 1 Giat | 1.681.028 | |
| | 29 Kegiatan Satgas Yon Komposit TNI KONGA MINUSCA Central African Republic | 1 Giat | 6.566.318 | |
| | 30 Seleksi Satgas KIZI TNI KONGA Monusco Kongo | 1 Giat | 1.671.271 | |
| | 31 Kegiatan Satgas KIZI TNI KONGA Monusco Kongo | 1 Giat | 7.771.360 | |
| | 32 Seleksi Satgas KIZI TNI KONGA MINUSCA Central African Republic | 1 Giat | 1.582.037 | |
| | 33 Kegiatan Satgas KIZI TNI KONGA MINUSCA Central African Republic | 1 Giat | 7.665.725 | |
| | 34 Seleksi Satgas KI Passus TNI KONGA MINUSCA CAR | 1 Giat | 1.698.200 | |
| | 35 Kegiatan Satgas KI Passus TNI KONGA MINUSCA CAR | 1 Giat | 9.673.500 | |
| | 36 Seleksi Satgas IMT Filipina | 1 Giat | 1.861.833 | |
| | 37 Kegiatan Satgas IMT Filipina | 1 Giat | 534.832.666 | |
| | Peserta Operasi Intelijen Rutin | | | |
| | 38 Rayon I | 1 Orang | 150.148 | |
| | 39 Rayon II | 1 Orang | 153.148 | |
| | 40 Rayon III | 1 Orang | 159.148 | |
| | 41 Rayon IV | 1 Orang | 160.148 | |
| | 42 Rayon V | 1 Orang | 168.148 | |
| | Calon Perwira Karier (PAPK) | | | |
| | 43 Seleksi Penerimaan (<i>Werving</i>) Calon Perwira Prajurit Karier TNI | 1 Orang | 16.420.000 | |
| | Calon PSDP Penerbang | | | |
| | 44 Seleksi penerimaan (<i>Werving</i>) Calon Perwira PSDP Pnb TNI | 1 Orang | 29.563.000 | |
| | Calon Mahasiswa Beasiswa PAPK | | | |
| | 45 Seleksi Penerimaan (<i>Werving</i>) Mahasiswa Beasiswa Calon PA PK TNI | 1 Orang | 16.216.000 | |
| | Lulusan Dikma Candradimuka Capratar | | | |
| | 46 Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Pria) | 1 Orang | 8.287.866 | |
| | 47 Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Wanita) | 1 Orang | 9.030.946 | |

AGW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Lulusan Dikma Candradimuka Pratar | | | |
| 48 | Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar | 1 Orang | 5.040.694 | |
| | Lulusan Dikma Candradimuka Koptar | | | |
| 49 | Lulusan Dikma Candradimuka Koptar | 1 Orang | 5.304.413 | |
| | Lulusan Dikma PSDP Penerbang | | | |
| 50 | Pendidikan Pertama (Dikma) PSDP Penerbang TNI | 1 Orang | 9.592.413 | |
| | Lulusan Diklan PSDP Penerbang | | | |
| 51 | Pendidikan Lanjutan PSDP Penerbang TNI | 1 Orang | 8.638.716 | |
| | Lulusan Dikma P A P K Pria | | | |
| 52 | Pendidikan Pertama (Dikma) PA PK Pria TNI | 1 Orang | 8.140.102 | |
| | Lulusan Dikma P A P K Wanita | | | |
| 53 | Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI | 1 Orang | 8.277.482 | |
| | Peserta Sesko TNI | | | |
| 54 | Seleksi Dikreg Sesko TNI | 1 Orang | 1.000.000 | |
| | Lulusan Pendidikan Spesialisasi/Pengembangan Profesi TNI | | | |
| 55 | Lulusan Dikbangspes Sus Pa TNI | 1 Orang | 3.995.783 | |
| 56 | Lulusan Dikbangspes Sus Ba TNI | 1 Orang | 3.390.183 | |
| 57 | Lulusan Dik SIP TNI | 1 Orang | 11.359.094 | |
| 58 | Lulusan Susjab Kimil | 1 Orang | 4.166.240 | |
| 59 | Lulusan Susjab Ormil TNI | 1 Orang | 4.166.240 | |
| 60 | Lulusan Suspa Minlakhara | 1 Orang | 4.146.240 | |
| 61 | Lulusan Suspa Masmil | 1 Orang | 4.146.240 | |
| 62 | Kursus Perwira Dasar Intelijen | 1 Orang | 4.377.000 | |
| 63 | Kursus Perwira Kontra Intelijen | 1 Orang | 4.667.000 | |
| 64 | Kursus Perwira Intelijen Strategis Tk.I | 1 Orang | 4.458.000 | |
| 65 | Kursus Perwira Sandi dan Intelijen TNI | 1 Orang | 4.269.111 | |
| 66 | Kursus Bintara Sandi dan Intelijen TNI | 1 Orang | 3.967.500 | |
| 67 | Kursus Bintara Dasar Intelijen TNI | 1 Orang | 4.001.666 | |
| 68 | Skolah Perwira Manajemen dan Analisis Intelijen | 1 Orang | 7.487.985 | |
| 69 | Seleksi Kursus Perwira Manajemen dan Analisis Intelijen | 1 Orang | 1.723.852 | |
| 70 | Seleksi Kursus Perwira Intelijen | 1 Orang | 1.400.787 | |
| 71 | Seleksi Kursus Bintara Intelijen | 1 Orang | 1.352.825 | |
| | Laporan Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer | | | |
| 72 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1 | 1 Laporan | 21.614.000 | |
| 73 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2 | 1 Laporan | 22.104.000 | |
| 74 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 3 | 1 Laporan | 22.454.000 | |
| 75 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4 | 1 Laporan | 21.754.000 | |
| 76 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5 | 1 Laporan | 31.904.000 | |
| 77 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 1 | 1 Laporan | 24.534.000 | |
| 78 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2 | 1 Laporan | 28.104.000 | |
| 79 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3 | 1 Laporan | 30.654.000 | |
| 80 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4 | 1 Laporan | 25.554.000 | |
| 81 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5 | 1 Laporan | 99.504.000 | |
| 82 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer | 1 Laporan | 1.342.000 | |
| 83 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1 | 1 Laporan | 3.397.000 | |
| 84 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2 | 1 Laporan | 3.957.000 | |
| 85 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3 | 1 Laporan | 4.357.000 | |
| 86 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4 | 1 Laporan | 3.557.000 | |
| 87 | Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5 | 1 Laporan | 15.157.000 | |
| 88 | Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer | 1 Laporan | 1.719.000 | |
| 89 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1 | 1 Laporan | 957.000 | |
| 90 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2 | 1 Laporan | 1.027.000 | |
| 91 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3 | 1 Laporan | 1.077.000 | |
| 92 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4 | 1 Laporan | 977.000 | |
| 93 | Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5 | 1 Laporan | 2.427.000 | |
| | Laporan Pembinaan Napi | | | |
| 94 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1 | 1 Laporan | 106.200 | |
| 95 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2 | 1 Laporan | 109.311 | |
| 96 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3 | 1 Laporan | 111.533 | |
| 97 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4 | 1 Laporan | 107.088 | |
| 98 | Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5 | 1 Laporan | 171.533 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer | | | |
| 99 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 5.832.000 | |
| 100 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 6.252.000 | |
| 101 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 6.552.000 | |
| 102 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 5.952.000 | |
| 103 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 14.652.000 | |
| 104 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| 105 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| 106 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK | 1 Laporan | 2.626.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum | | | |
| 107 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 11.856.000 | |
| 108 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 13.536.000 | |
| 109 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 14.736.000 | |
| 110 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 12.336.000 | |
| 111 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 47.136.000 | |
| 112 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding | 1 Laporan | 4.105.000 | |
| 113 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi | 1 Laporan | 3.150.000 | |
| 114 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK | 1 Laporan | 5.699.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat | | | |
| 115 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 25.524.000 | |
| 116 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 29.374.000 | |
| 117 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 32.124.000 | |
| 118 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 26.624.000 | |
| 119 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 106.374.000 | |
| 120 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1 | 1 Laporan | 7.567.000 | |
| 121 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2 | 1 Laporan | 8.267.000 | |
| 122 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3 | 1 Laporan | 8.767.000 | |
| 123 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4 | 1 Laporan | 7.767.000 | |
| 124 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5 | 1 Laporan | 22.267.000 | |
| 125 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1 | 1 Laporan | 12.859.000 | |
| 126 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2 | 1 Laporan | 14.109.000 | |
| 127 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3 | 1 Laporan | 15.059.000 | |
| 128 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4 | 1 Laporan | 13.759.000 | |
| 129 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5 | 1 Laporan | 35.709.000 | |
| 130 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 10.774.000 | |
| 131 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 11.524.000 | |
| 132 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 12.074.000 | |
| 133 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 11.124.000 | |
| 134 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 25.674.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat | | | |
| 135 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 23.667.000 | |
| 136 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 27.867.000 | |
| 137 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 30.867.000 | |

AGW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|---------------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 138 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 24.867.000 | |
| | 139 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 111.867.000 | |
| | 140 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 1 | 1 Laporan | 8.711.000 | |
| | 141 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 2 | 1 Laporan | 10.461.000 | |
| | 142 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 3 | 1 Laporan | 11.711.000 | |
| | 143 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 4 | 1 Laporan | 9.211.000 | |
| | 144 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 5 | 1 Laporan | 45.461.000 | |
| | 145 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1 | 1 Laporan | 13.243.000 | |
| | 146 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2 | 1 Laporan | 15.193.000 | |
| | 147 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3 | 1 Laporan | 16.643.000 | |
| | 148 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4 | 1 Laporan | 14.343.000 | |
| | 149 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5 | 1 Laporan | 50.793.000 | |
| | 150 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 13.328.000 | |
| | 151 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2 | 1 Laporan | 16.128.000 | |
| | 152 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3 | 1 Laporan | 18.128.000 | |
| | 153 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4 | 1 Laporan | 14.128.000 | |
| | 154 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5 | 1 Laporan | 72.128.000 | |
| 012.22 | Markas Besar TNI AD | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Calon Taruna Matra Darat | 1 Orang | 23.200.000 | |
| | 2 Calon Bintara Matra Darat | 1 Orang | 5.800.000 | |
| | 3 Calon Tamtama Matra Darat | 1 Orang | 4.200.000 | |
| | 4 Lulusan Dik Secapa Reguler Matra Darat | 1 Orang | 3.503.575 | |
| | 5 Lulusan Diksargolan Secapa | 1 Orang | 4.352.187 | |
| | 6 Lulusan Seskoad | 1 Orang | 4.434.702 | |
| | 7 Lulusan Selapa Matra Darat | 1 Orang | 3.619.445 | |
| | 8 Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Darat | 1 Orang | 3.354.070 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Peserta Operasi Intelijen Taktis TNI | | | |
| | 9 Rayon I | 1 Orang | 294.833 | |
| | 10 Rayon II | 1 Orang | 302.788 | |
| | 11 Rayon III | 1 Orang | 321.322 | |
| | 12 Rayon IV | 1 Orang | 331.588 | |
| | 13 Rayon V | 1 Orang | 345.933 | |
| | Peserta Latihan Kematraan | | | |
| | 14 Latihan Perorangan Rayon I | 1 Orang | 72.743 | |
| | 15 Latihan Perorangan Rayon II | 1 Orang | 74.278 | |
| | 16 Latihan Perorangan Rayon III | 1 Orang | 77.089 | |
| | 17 Latihan Perorangan Rayon IV | 1 Orang | 80.380 | |
| | 18 Latihan Perorangan Rayon V | 1 Orang | 86.969 | |
| | 19 Latihan Satuan Rayon I | 1 Orang | 50.528 | |
| | 20 Latihan Satuan Rayon II | 1 Orang | 52.896 | |
| | 21 Latihan Satuan Rayon III | 1 Orang | 54.561 | |
| | 22 Latihan Satuan Rayon IV | 1 Orang | 57.047 | |
| | 23 Latihan Satuan Rayon V | 1 Orang | 61.229 | |
| | 24 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon I | 1 Orang | 418.277 | |
| | 25 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon II | 1 Orang | 447.921 | |
| | 26 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon III | 1 Orang | 479.481 | |
| | 27 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon IV | 1 Orang | 511.644 | |
| | 28 Latihan antar Kecabangan Tk. Batalyon Rayon V | 1 Orang | 573.549 | |
| | 29 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon I | 1 Orang | 998.012 | |
| | 30 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon II | 1 Orang | 1.038.159 | |
| | 31 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon III | 1 Orang | 1.069.363 | |
| | 32 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon IV | 1 Orang | 1.123.306 | |
| | 33 Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon V | 1 Orang | 1.198.185 | |
| | Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri | | | |
| | 34 Latma Internasional di Luar Negeri GUN Pesawat Komersial | 1 Orang | 3.340.985 | |
| | 35 Latma Internasional di Luar Negeri GUN Pesawat TNI AU | 1 Orang | 1.726.641 | |
| | Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri | | | |
| | 36 Latma Internasional di dalam Negeri dengan Pelibatan Alutsista | 1 Orang | 295.376 | |
| | 37 Latma Internasional di dalam Negeri tanpa Alutsista | 1 Orang | 170.956 | |

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Lulusan Dikma Sertar | | | |
| 38 | Sersan Taruna Pria | 1 Orang | 6.128.133 | |
| 39 | Sersan Taruna Wanita | 1 Orang | 6.370.466 | |
| | Lulusan Dikma Sermadatar | | | |
| 40 | Sermadatar Pria | 1 Orang | 6.327.210 | |
| 41 | Sermadatar Wanita | 1 Orang | 6.631.876 | |
| | Lulusan Dikma Sermatutar | | | |
| 42 | Sermatutar Pria | 1 Orang | 6.815.820 | |
| 43 | Sermatutar Wanita | 1 Orang | 7.029.097 | |
| | Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Darat | | | |
| 44 | Secaba Pria Rayon I | 1 Orang | 5.664.480 | |
| 45 | Secaba Pria Rayon II | 1 Orang | 5.728.900 | |
| 46 | Secaba Pria Rayon III | 1 Orang | 5.878.900 | |
| 47 | Secaba Pria Rayon IV | 1 Orang | 5.913.320 | |
| 48 | Secaba Pria Rayon V | 1 Orang | 6.097.740 | |
| | Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Darat | | | |
| 49 | Secaba Wanita | 1 Orang | 6.492.880 | |
| | Lulusan Dikma Secatam Matra Darat | | | |
| 50 | Secata Rayon I | 1 Orang | 5.539.340 | |
| 51 | Secata Rayon II | 1 Orang | 5.603.100 | |
| 52 | Secata Rayon III | 1 Orang | 5.753.100 | |
| 53 | Secata Rayon IV | 1 Orang | 5.786.860 | |
| 54 | Secata Rayon V | 1 Orang | 5.970.620 | |
| | Lulusan Diksargolan Perwira Matra Darat | | | |
| 55 | Diksargolan Perwira | 1 Orang | 5.081.700 | |
| | Lulusan Diksargolan Bintara Matra Darat | | | |
| 56 | Diksargolan Bintara Pria Rayon I | 1 Orang | 2.960.000 | |
| 57 | Diksargolan Bintara Pria Rayon II | 1 Orang | 3.023.330 | |
| 58 | Diksargolan Bintara Pria Rayon III | 1 Orang | 3.112.730 | |
| 59 | Diksargolan Bintara Pria Rayon IV | 1 Orang | 3.147.460 | |
| 60 | Diksargolan Bintara Pria Rayon V | 1 Orang | 3.330.790 | |
| | Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Darat | | | |
| 61 | Diksargolan Tamtama Rayon I | 1 Orang | 2.802.433 | |
| 62 | Diksargolan Tamtama Rayon II | 1 Orang | 2.868.850 | |
| 63 | Diksargolan Tamtama Rayon III | 1 Orang | 2.952.433 | |
| 64 | Diksargolan Tamtama Rayon IV | 1 Orang | 2.993.516 | |
| 65 | Diksargolan Tamtama Rayon V | 1 Orang | 3.074.243 | |
| | Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat | | | |
| 66 | Rayon I | 1 Orang | 3.196.343 | |
| 67 | Rayon II | 1 Orang | 3.258.725 | |
| 68 | Rayon III | 1 Orang | 3.356.787 | |
| 69 | Rayon IV | 1 Orang | 3.416.106 | |
| 70 | Rayon V | 1 Orang | 3.573.487 | |
| | Peserta Secapareg Matra Darat | | | |
| 71 | Rayon I | 1 Orang | 1.568.950 | |
| 72 | Rayon II | 1 Orang | 1.578.390 | |
| 73 | Rayon III | 1 Orang | 1.589.030 | |
| 74 | Rayon IV | 1 Orang | 1.593.750 | |
| 75 | Rayon V | 1 Orang | 1.597.270 | |
| | Peserta Secabareg Matra Darat | | | |
| 76 | Rayon I | 1 Orang | 1.171.400 | |
| 77 | Rayon II | 1 Orang | 1.185.440 | |
| 78 | Rayon III | 1 Orang | 1.219.640 | |
| 79 | Rayon IV | 1 Orang | 1.227.560 | |
| 80 | Rayon V | 1 Orang | 1.268.480 | |
| | Peserta Seskoad | | | |
| 81 | Rayon I | 1 Orang | 5.896.770 | |
| 82 | Rayon II | 1 Orang | 5.923.170 | |
| 83 | Rayon III | 1 Orang | 5.898.570 | |
| 84 | Rayon IV | 1 Orang | 5.915.370 | |
| 85 | Rayon V | 1 Orang | 5.996.970 | |
| | Peserta Selapa Matra Darat | | | |
| 86 | Rayon I | 1 Orang | 3.920.910 | |
| 87 | Rayon II | 1 Orang | 3.946.590 | |
| 88 | Rayon III | 1 Orang | 4.013.990 | |
| 89 | Rayon IV | 1 Orang | 4.025.310 | |
| 90 | Rayon V | 1 Orang | 4.053.870 | |
| | Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Darat | | | |
| 91 | Rayon I | 1 Orang | 2.801.900 | |
| 92 | Rayon II | 1 Orang | 2.861.900 | |
| 93 | Rayon III | 1 Orang | 3.011.900 | |
| 94 | Rayon IV | 1 Orang | 3.044.600 | |
| 95 | Rayon V | 1 Orang | 3.203.500 | |
| | Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Darat | | | |
| 96 | Rayon I | 1 Orang | 2.699.200 | |
| 97 | Rayon II | 1 Orang | 2.762.450 | |
| 98 | Rayon III | 1 Orang | 2.846.750 | |
| 99 | Rayon IV | 1 Orang | 2.882.000 | |
| 100 | Rayon V | 1 Orang | 3.078.950 | |

Abw

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Peserta Dikbangspes Matra Darat | | | |
| 101 | Rayon I | 1 Orang | 1.113.560 | |
| 102 | Rayon II | 1 Orang | 1.159.940 | |
| 103 | Rayon III | 1 Orang | 1.162.640 | |
| 104 | Rayon IV | 1 Orang | 1.170.560 | |
| 105 | Rayon V | 1 Orang | 1.211.480 | |
| | Lulusan Pendidikan Keahlian | | | |
| 106 | Rayon I | 1 Orang | 3.460.070 | |
| 107 | Rayon II | 1 Orang | 3.573.600 | |
| 108 | Rayon III | 1 Orang | 3.573.600 | |
| 109 | Rayon IV | 1 Orang | 3.607.130 | |
| 110 | Rayon V | 1 Orang | 3.790.660 | |
| | Lulusan Dik Iptek | | | |
| 111 | Dik. Iptek S-1 | 1 Orang | 3.363.020 | |
| 112 | Dik. Iptek D-3 (Rayon I) | 1 Orang | 2.866.050 | |
| 113 | Dik. Iptek D-3 (Rayon II) | 1 Orang | 2.929.440 | |
| 114 | Dik. Iptek D-3 (Rayon III) | 1 Orang | 2.979.440 | |
| 115 | Dik. Iptek D-3 (Rayon IV) | 1 Orang | 3.012.830 | |
| 116 | Dik. Iptek D-3 (Rayon V) | 1 Orang | 3.196.220 | |
| 117 | Dik. Iptek SMK (Rayon I) | 1 Orang | 2.798.230 | |
| 118 | Dik. Iptek SMK (Rayon II) | 1 Orang | 2.861.480 | |
| 119 | Dik. Iptek SMK (Rayon III) | 1 Orang | 2.911.480 | |
| 120 | Dik. Iptek SMK (Rayon IV) | 1 Orang | 2.944.730 | |
| 121 | Dik. Iptek SMK (Rayon V) | 1 Orang | 3.131.480 | |
| | Peserta Dik Profesi dan Keahlian | | | |
| 122 | Rayon I | 1 Orang | 1.707.760 | |
| 123 | Rayon II | 1 Orang | 1.722.640 | |
| 124 | Rayon III | 1 Orang | 1.746.000 | |
| 125 | Rayon IV | 1 Orang | 1.753.560 | |
| 126 | Rayon V | 1 Orang | 1.766.400 | |
| | Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit | | | |
| 127 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I | 1 Laporan | 7.964.000 | |
| 128 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II | 1 Laporan | 8.524.000 | |
| 129 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III | 1 Laporan | 8.924.000 | |
| 130 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV | 1 Laporan | 8.124.000 | |
| 131 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V | 1 Laporan | 19.724.000 | |
| | Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit | | | |
| 128 | Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I | 1 Laporan | 1.972.000 | |
| 129 | Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II | 1 Laporan | 2.112.000 | |
| 130 | Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III | 1 Laporan | 2.212.000 | |
| 131 | Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV | 1 Laporan | 2.012.000 | |
| 132 | Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V | 1 Laporan | 4.912.000 | |
| | Laporan Pengurusan Tahanan Sementara | | | |
| 133 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I | 1 Laporan | 44.570 | |
| 134 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II | 1 Laporan | 45.640 | |
| 135 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III | 1 Laporan | 50.690 | |
| 136 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV | 1 Laporan | 45.590 | |
| 137 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V | 1 Laporan | 58.040 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer | | | |
| 138 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I | 1 Laporan | 5.832.000 | |
| 139 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II | 1 Laporan | 6.252.000 | |
| 140 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III | 1 Laporan | 6.552.000 | |
| 141 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV | 1 Laporan | 5.952.000 | |
| 142 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V | 1 Laporan | 14.652.000 | |
| 143 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| 144 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| 145 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK | 1 Laporan | 2.626.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum | | | |
| 146 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I | 1 Laporan | 11.856.000 | |
| 147 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II | 1 Laporan | 13.536.000 | |
| 148 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III | 1 Laporan | 14.736.000 | |
| 149 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV | 1 Laporan | 12.336.000 | |
| 150 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V | 1 Laporan | 47.136.000 | |
| 151 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding | 1 Laporan | 4.105.000 | |
| 152 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi | 1 Laporan | 3.150.000 | |
| 153 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK | 1 Laporan | 5.699.000 | |

ABW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat | | | |
| 154 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I | 1 Laporan | 25.524.000 | |
| 155 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II | 1 Laporan | 29.374.000 | |
| 156 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III | 1 Laporan | 32.124.000 | |
| 157 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV | 1 Laporan | 26.624.000 | |
| 158 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V | 1 Laporan | 106.374.000 | |
| 159 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon I | 1 Laporan | 7.567.000 | |
| 160 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon II | 1 Laporan | 8.267.000 | |
| 161 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon III | 1 Laporan | 8.767.000 | |
| 162 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon IV | 1 Laporan | 7.767.000 | |
| 163 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN PembandingTk. Banding Rayon V | 1 Laporan | 22.267.000 | |
| 164 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I | 1 Laporan | 12.859.000 | |
| 165 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II | 1 Laporan | 14.109.000 | |
| 166 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III | 1 Laporan | 15.059.000 | |
| 167 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV | 1 Laporan | 13.759.000 | |
| 168 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V | 1 Laporan | 35.709.000 | |
| 169 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I | 1 Laporan | 10.774.000 | |
| 170 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II | 1 Laporan | 11.524.000 | |
| 171 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III | 1 Laporan | 12.074.000 | |
| 172 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV | 1 Laporan | 11.124.000 | |
| 173 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V | 1 Laporan | 25.674.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat | | | |
| 174 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I | 1 Laporan | 23.667.000 | |
| 175 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II | 1 Laporan | 27.867.000 | |
| 176 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III | 1 Laporan | 30.867.000 | |
| 177 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV | 1 Laporan | 24.867.000 | |
| 178 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V | 1 Laporan | 111.867.000 | |
| 179 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I | 1 Laporan | 8.711.000 | |
| 180 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II | 1 Laporan | 10.461.000 | |
| 181 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III | 1 Laporan | 11.711.000 | |
| 182 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV | 1 Laporan | 9.211.000 | |
| 183 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V | 1 Laporan | 45.461.000 | |
| 184 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I | 1 Laporan | 13.243.000 | |
| 185 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II | 1 Laporan | 15.193.000 | |
| 186 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III | 1 Laporan | 16.643.000 | |
| 187 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV | 1 Laporan | 14.343.000 | |
| 188 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V | 1 Laporan | 50.793.000 | |
| 189 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I | 1 Laporan | 13.328.000 | |
| 190 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II | 1 Laporan | 16.128.000 | |

AGN

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 191 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III | 1 Laporan | 18.128.000 | |
| | 192 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV | 1 Laporan | 14.128.000 | |
| | 193 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V | 1 Laporan | 72.128.000 | |
| 012.23 | Markas Besar TNI AL | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Calon Kadet | 1 Orang | 23.200.000 | |
| | 2 Calon Bintara Matra Laut | 1 Orang | 5.800.000 | |
| | 3 Calon Tamtama Matra Laut | 1 Orang | 4.200.000 | |
| | 4 Peserta Diklapa | 1 Orang | 3.554.720 | |
| | 5 Peserta Diktukpa | 1 Orang | 2.840.030 | |
| | 6 Peserta Diktukba | 1 Orang | 3.224.300 | |
| | 7 Peserta Dikspespa | 1 Orang | 2.494.460 | |
| | 8 Peserta Dikspesba | 1 Orang | 2.409.460 | |
| | 9 Peserta Penerbang TNI AL | 1 Orang | 3.948.225 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Taktis TNI | | | |
| | 10 Penggelaran Satgas Operasi Intel Taktis TNI | 1 Orang | 401.065 | |
| | Peserta Latihan Operasi Matra TNI AL | | | |
| | 11 Latihan Matra Laut (Rayon I) | 1 Orang | 81.769 | |
| | 12 Latihan Matra Laut (Rayon II) | 1 Orang | 82.969 | |
| | 13 Latihan Matra Laut (Rayon III) | 1 Orang | 85.369 | |
| | 14 Latihan Matra Laut (Rayon IV) | 1 Orang | 87.769 | |
| | 15 Latihan Matra Laut (Rayon V) | 1 Orang | 93.769 | |
| | Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri | | | |
| | 16 Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri | 1 Orang | 1.260.347 | |
| | Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri | | | |
| | 17 Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri | 1 Orang | 111.333 | |
| | Lulusan Dikma Serkad | | | |
| | 18 Dikma Sertar Pria | 1 Orang | 7.271.100 | |
| | 19 Dikma Sertar Wanita | 1 Orang | 7.557.266 | |
| | Lulusan Dikma Sermadakad | | | |
| | 20 Dikma Sermadatar Pria | 1 Orang | 7.484.383 | |
| | 21 Dikma Sermadatar Wanita | 1 Orang | 7.779.466 | |
| | Lulusan Dikma Sermatukad | | | |
| | 22 Dikma Sermatukar Pria | 1 Orang | 8.328.300 | |
| | 23 Dikma Sermatukar Wanita | 1 Orang | 8.575.550 | |
| | Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Laut | | | |
| | 24 Diksargolan Perwira Pa PK Matra Laut | 1 Orang | 4.723.912 | |
| | Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Laut | | | |
| | 25 Dikma Bintara Pria Matra Laut | 1 Orang | 7.189.816 | |
| | Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Laut | | | |
| | 26 Dikma Bintara Wanita Matra Laut | 1 Orang | 7.457.316 | |
| | Lulusan Diksargolan Bintara Matra Laut | | | |
| | 27 Diksargolan Bintara Matra Laut | 1 Orang | 3.345.533 | |
| | Lulusan Dikma Secatam Matra Laut | | | |
| | 28 Dikma Tamtama Matra Laut | 1 Orang | 7.041.413 | |
| | Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Laut | | | |
| | 29 Diksargolan Tamtama Matra Laut | 1 Orang | 3.112.150 | |
| | Lulusan Dik Seskoal | | | |
| | 30 Dik. Seskoal | 1 Orang | 5.446.604 | |
| | Lulusan Diklapa | | | |
| | 31 Diklapa Matra Laut | 1 Orang | 3.669.408 | |
| | Lulusan Diktukpa | | | |
| | 32 Diktukpa Matra Laut | 1 Orang | 4.197.472 | |
| | Lulusan Diktukba | | | |
| | 33 Diktukba Matra Laut | 1 Orang | 3.986.588 | |
| | Lulusan Dikbangspes Perwira/PNS Sederajat Matra Laut | | | |
| | 34 Dikbangsus Perwira Matra Laut | 1 Orang | 3.776.514 | |
| | Lulusan Dikbangspes Bintara/PNS Sederajat Matra Laut | | | |
| | 35 Dikbangsus Bintara Matra Laut | 1 Orang | 3.250.760 | |
| | Lulusan Dikbangspes Tamtama/PNS Sederajat Matra Laut | | | |
| | 36 Dikbangsus Tamtama Matra Laut | 1 Orang | 3.029.966 | |
| | Lulusan Diksus Manajemen Strategik Matra Laut | | | |
| | 37 Diksus Manajemen Strategik Matra Laut | 1 Orang | 4.217.575 | |
| | Lulusan Diksus Penerbang Matra Laut | | | |
| | 38 Diksus Penerbang Matra Laut | 1 Orang | 5.284.808 | |
| | Lulusan Diksus Brevet Matra Laut | | | |
| | 39 Diksus Brevet Matra Laut | 1 Orang | 4.528.040 | |
| | Lulusan Dik Lainnya | | | |
| | 40 Dik STTAL D-3 | 1 Orang | 3.138.437 | |
| | 41 Dik STTAL S-1 | 1 Orang | 3.449.930 | |
| | 42 Dik STTAL S-2 | 1 Orang | 3.817.930 | |

Abw

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Peserta Kursus Manajemen Strategik | | | |
| 43 | Peserta Kursus Manajemen Strategik | 1 Orang | 4.360.960 | |
| 44 | Peserta Seskoal | 1 Orang | 4.586.620 | |
| | Peserta STTAL | | | |
| 45 | Seleksi Dik D-3 STTAL | 1 Orang | 3.379.760 | |
| 46 | Seleksi Dik S-1 STTAL | 1 Orang | 3.513.260 | |
| | Peserta Dik Brevet | | | |
| 47 | Peserta Dik Brevet | 1 Orang | 3.948.250 | |
| | Laporan Pembinaan Hukum | | | |
| 48 | Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer | 1 Laporan | 44.814.000 | |
| 49 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 5.832.000 | |
| 50 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 6.252.000 | |
| 51 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 6.552.000 | |
| 52 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 5.952.000 | |
| 53 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 14.652.000 | |
| 54 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| 55 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| 56 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK | 1 Laporan | 2.626.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum | | | |
| 57 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 11.856.000 | |
| 58 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 13.536.000 | |
| 59 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 14.736.000 | |
| 60 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 12.336.000 | |
| 61 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 47.136.000 | |
| 62 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding | 1 Laporan | 4.105.000 | |
| 63 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi | 1 Laporan | 3.150.000 | |
| 64 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK | 1 Laporan | 5.699.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat | | | |
| 65 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 25.524.000 | |
| 66 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 29.374.000 | |
| 67 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 32.124.000 | |
| 68 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 26.624.000 | |
| 69 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 106.374.000 | |
| 70 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1 | 1 Laporan | 7.567.000 | |
| 71 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2 | 1 Laporan | 8.267.000 | |
| 72 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3 | 1 Laporan | 8.767.000 | |
| 73 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4 | 1 Laporan | 7.767.000 | |
| 74 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5 | 1 Laporan | 22.267.000 | |
| 75 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1 | 1 Laporan | 12.859.000 | |
| 76 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2 | 1 Laporan | 14.109.000 | |
| 77 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3 | 1 Laporan | 15.059.000 | |
| 78 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4 | 1 Laporan | 13.759.000 | |
| 79 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5 | 1 Laporan | 35.709.000 | |
| 80 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 10.774.000 | |
| 81 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2 | 1 Laporan | 11.524.000 | |
| 82 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3 | 1 Laporan | 12.074.000 | |

6 ABW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 83 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4 | 1 Laporan | 11.124.000 | |
| | 84 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5 | 1 Laporan | 25.674.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat | | | |
| | 85 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 23.667.000 | |
| | 86 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 27.867.000 | |
| | 87 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 30.867.000 | |
| | 88 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 24.867.000 | |
| | 89 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 111.867.000 | |
| | 90 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1 | 1 Laporan | 8.711.000 | |
| | 91 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2 | 1 Laporan | 10.461.000 | |
| | 92 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3 | 1 Laporan | 11.711.000 | |
| | 93 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4 | 1 Laporan | 9.211.000 | |
| | 94 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5 | 1 Laporan | 45.461.000 | |
| | 95 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1 | 1 Laporan | 13.243.000 | |
| | 96 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2 | 1 Laporan | 15.193.000 | |
| | 97 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3 | 1 Laporan | 16.643.000 | |
| | 98 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4 | 1 Laporan | 14.343.000 | |
| | 99 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5 | 1 Laporan | 50.793.000 | |
| | 100 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 13.328.000 | |
| | 101 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2 | 1 Laporan | 16.128.000 | |
| | 102 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3 | 1 Laporan | 18.128.000 | |
| | 103 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4 | 1 Laporan | 14.128.000 | |
| | 104 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5 | 1 Laporan | 72.128.000 | |
| | Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit | | | |
| | 105 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1 | 1 Laporan | 7.964.000 | |
| | 106 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2 | 1 Laporan | 8.524.000 | |
| | 107 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3 | 1 Laporan | 8.924.000 | |
| | 108 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4 | 1 Laporan | 8.124.000 | |
| | 109 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5 | 1 Laporan | 19.724.000 | |
| | Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit | | | |
| | 110 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1 | 1 Laporan | 1.972.000 | |
| | 111 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2 | 1 Laporan | 2.112.000 | |
| | 112 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3 | 1 Laporan | 2.212.000 | |
| | 113 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4 | 1 Laporan | 2.012.000 | |
| | 114 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5 | 1 Laporan | 4.912.000 | |
| | Pengurusan Tahanan Sementara | | | |
| | 115 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1 | 1 Laporan | 44.570 | |
| | 116 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2 | 1 Laporan | 45.640 | |
| | 117 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3 | 1 Laporan | 50.690 | |
| | 118 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4 | 1 Laporan | 45.590 | |
| | 119 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5 | 1 Laporan | 58.040 | |
| 012.24 | Markas Besar TNI AU | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Operasi Bhakti TNI | 1 Frekuensi | 94.541 | |
| | 2 Peserta Operasi Intelijen Taktis TNI | 1 Orang | 313.427 | |
| | 3 Peserta Latihan Kematraan | 1 Orang | 77.807 | |
| | 4 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri | 1 Orang | 6.600.812 | |
| | 5 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri | 1 Orang | 152.277 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Peserta Sesko Matra Udara | | | |
| | 6 Seleksi Seskoau dan Susstaf Matra Udara | 1 Orang | 2.316.500 | |
| | Peserta Sekkau | | | |
| | 7 Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara | 1 Orang | 1.591.500 | |
| | Peserta Setukpa | | | |
| | 8 Seleksi Setukpa Matra udara | 1 Orang | 1.439.000 | |
| | Peserta Setukba | | | |
| | 9 Seleksi Setukba Matra Udara | 1 Orang | 1.240.020 | |

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Lulusan Dikma Sertar | | | |
| 10 | Pendidikan Sertar Pria | 1 Orang | 6.643.509 | |
| 11 | Pendidikan Sertar Wanita | 1 Orang | 6.796.775 | |
| | Lulusan Dikma Sermadatar | | | |
| 12 | Pendidikan Sermadatar Pria | 1 Orang | 6.898.856 | |
| 13 | Pendidikan Sermadatar Wanita | 1 Orang | 7.052.795 | |
| | Lulusan Dikma Sermatutar | | | |
| 14 | Pendidikan Sermatutar Pria | 1 Orang | 7.830.531 | |
| 15 | Pendidikan Sermatutar Wanita | 1 Orang | 7.983.573 | |
| | Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara | | | |
| 16 | Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara | 1 Orang | 5.126.310 | |
| | Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Udara | | | |
| 17 | Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara | 1 Orang | 4.560.030 | |
| | Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Udara | | | |
| 18 | Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara | 1 Orang | 4.730.030 | |
| | Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara | | | |
| 19 | Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD | 1 Orang | 3.047.608 | |
| 20 | Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD | 1 Orang | 3.047.608 | |
| | Lulusan Dikma Secatam Matra Udara | | | |
| 21 | Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara | 1 Orang | 4.356.760 | |
| | Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara | | | |
| 22 | Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara | 1 Orang | 2.776.575 | |
| | Lulusan Dikma Sekbang/Seknav | | | |
| 23 | Pendidikan Pertama Sekbang/Seknav | 1 Orang | 9.063.958 | |
| | Lulusan Dikma SIN/SIP | | | |
| 24 | Pendidikan SIP/SIN | 1 Orang | 11.484.705 | |
| | Lulusan Seskoau | | | |
| 25 | Pendidikan Seskoau | 1 Orang | 4.786.872 | |
| 26 | Pendidikan Susstaf | 1 Orang | 4.673.800 | |
| | Lulusan Sekkau | | | |
| 27 | Pendidikan Sekkau | 1 Orang | 3.695.883 | |
| 28 | Pendidikan Suspajemen | 1 Orang | 3.652.280 | |
| | Lulusan Setukpa | | | |
| 29 | Pendidikan Setukpa | 1 Orang | 3.470.703 | |
| | Lulusan Setukba | | | |
| 30 | Pendidikan Setukba | 1 Orang | 3.137.245 | |
| | Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Udara | | | |
| 31 | Dikbangspes Perwira Matra Udara | 1 Orang | 3.470.875 | |
| | Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Udara | | | |
| 32 | Dikbangspes Bintara Matra Udara | 1 Orang | 2.853.975 | |
| | Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Udara | | | |
| 33 | Dikbangspes Tamtama Matra Udara | 1 Orang | 2.753.100 | |
| | Peserta Dikbangspes Perwira | | | |
| 34 | Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara | 1 Orang | 736.680 | |
| | Peserta Dikbangspes Bintara Tamtama | | | |
| 35 | Seleksi Dikbangspes Bintara/Tamtama Matra Udara | 1 Orang | 633.980 | |
| | Calon Karbol | | | |
| 36 | Werving Taruna/Taruni | 1 Orang | 23.200.120 | |
| | Calon Bintara Matra Udara | | | |
| 37 | Werving Bintara Matra Udara | 1 Orang | 5.800.100 | |
| | Calon Tamtama Matra Udara | | | |
| 38 | Werving Tamtama Matra Udara | 1 Orang | 4.200.011 | |
| | Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit | | | |
| 39 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1 | 1 Laporan | 7.964.000 | |
| 40 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2 | 1 Laporan | 8.524.000 | |
| 41 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3 | 1 Laporan | 8.924.000 | |
| 42 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4 | 1 Laporan | 8.124.000 | |
| 43 | Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5 | 1 Laporan | 19.724.000 | |
| | Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit | | | |
| 44 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1 | 1 Laporan | 1.972.000 | |
| 45 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2 | 1 Laporan | 2.112.000 | |
| 46 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3 | 1 Laporan | 2.212.000 | |
| 47 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4 | 1 Laporan | 2.012.000 | |
| 48 | Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5 | 1 Laporan | 4.912.000 | |
| | Pengurusan Tahanan Sementara | | | |
| 49 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1 | 1 Laporan | 44.570 | |
| 50 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2 | 1 Laporan | 45.640 | |
| 51 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3 | 1 Laporan | 50.690 | |
| 52 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4 | 1 Laporan | 45.590 | |
| 53 | Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5 | 1 Laporan | 58.040 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer | | | |
| 54 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 5.832.000 | |
| 55 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 6.252.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 56 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 6.552.000 | |
| | 57 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 5.952.000 | |
| | 58 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 14.652.000 | |
| | 59 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara pidana militer Tk. Banding | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| | 60 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi | 1 Laporan | 2.216.000 | |
| | 61 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK | 1 Laporan | 2.626.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum | | | |
| | 62 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 11.856.000 | |
| | 63 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 13.536.000 | |
| | 64 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 14.736.000 | |
| | 65 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 12.336.000 | |
| | 66 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 47.136.000 | |
| | 67 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding | 1 Laporan | 4.105.000 | |
| | 68 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi | 1 Laporan | 3.150.000 | |
| | 69 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK | 1 Laporan | 5.699.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat | | | |
| | 70 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 25.524.000 | |
| | 71 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 29.374.000 | |
| | 72 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 32.124.000 | |
| | 73 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 26.624.000 | |
| | 74 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 106.374.000 | |
| | 75 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pcmbanding Tk. Banding Rayon 1 | 1 Laporan | 7.567.000 | |
| | 76 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pcmbanding Tk. Banding Rayon 2 | 1 Laporan | 8.267.000 | |
| | 77 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pcmbanding Tk. Banding Rayon 3 | 1 Laporan | 8.767.000 | |
| | 78 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pcmbanding Tk. Banding Rayon 4 | 1 Laporan | 7.767.000 | |
| | 79 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pcmbanding Tk. Banding Rayon 5 | 1 Laporan | 22.267.000 | |
| | 80 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1 | 1 Laporan | 12.859.000 | |
| | 81 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2 | 1 Laporan | 14.109.000 | |
| | 82 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3 | 1 Laporan | 15.059.000 | |
| | 83 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4 | 1 Laporan | 13.759.000 | |
| | 84 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5 | 1 Laporan | 35.709.000 | |
| | 85 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 10.774.000 | |
| | 86 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2 | 1 Laporan | 11.524.000 | |
| | 87 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3 | 1 Laporan | 12.074.000 | |
| | 88 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4 | 1 Laporan | 11.124.000 | |
| | 89 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5 | 1 Laporan | 25.674.000 | |
| | Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat | | | |
| | 90 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1 | 1 Laporan | 23.667.000 | |
| | 91 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2 | 1 Laporan | 27.867.000 | |
| | 92 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3 | 1 Laporan | 30.867.000 | |
| | 93 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4 | 1 Laporan | 24.867.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 94 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5 | 1 Laporan | 111.867.000 | |
| 95 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1 | 1 Laporan | 8.711.000 | |
| 96 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2 | 1 Laporan | 10.461.000 | |
| 97 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3 | 1 Laporan | 11.711.000 | |
| 98 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4 | 1 Laporan | 9.211.000 | |
| 99 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5 | 1 Laporan | 45.461.000 | |
| 100 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1 | 1 Laporan | 13.243.000 | |
| 101 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2 | 1 Laporan | 15.193.000 | |
| 102 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3 | 1 Laporan | 16.643.000 | |
| 103 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4 | 1 Laporan | 14.343.000 | |
| 104 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5 | 1 Laporan | 50.793.000 | |
| 105 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1 | 1 Laporan | 13.328.000 | |
| 106 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2 | 1 Laporan | 16.128.000 | |
| 107 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3 | 1 Laporan | 18.128.000 | |
| 108 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4 | 1 Laporan | 14.128.000 | |
| 109 | Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5 | 1 Laporan | 72.128.000 | |

h An

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 013.05 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Pembinaan UPT Pemasyarakatan | | | |
| | 1 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Aceh | 27 UPT | 711.590.000 | |
| | 2 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Utara | 40 UPT | 970.538.000 | |
| | 3 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Barat | 25 UPT | 638.350.000 | |
| | 4 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Riau | 19 UPT | 629.316.000 | |
| | 5 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah kepulauan Riau | 10 UPT | 546.770.000 | |
| | 6 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jambi | 13 UPT | 632.418.000 | |
| | 7 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Bengkulu | 8 UPT | 510.268.000 | |
| | 8 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan | 24 UPT | 680.862.000 | |
| | 9 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Lampung | 21 UPT | 566.090.000 | |
| | 10 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Bangka Belitung | 7 UPT | 460.368.000 | |
| | 11 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta | 17 UPT | 279.556.000 | |
| | 12 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Banten | 13 UPT | 580.755.000 | |
| | 13 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat | 38 UPT | 758.806.000 | |
| | 14 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah | 58 UPT | 911.750.000 | |
| | 15 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur | 51 UPT | 973.156.000 | |
| | 16 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta | 13 UPT | 701.211.000 | |
| | 17 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Bali | 13 UPT | 814.345.000 | |
| | 18 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Barat | 17 UPT | 626.600.000 | |
| | 19 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Selatan | 16 UPT | 646.942.000 | |
| | 20 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Tengah | 13 UPT | 669.852.000 | |
| | 21 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Timur | 14 UPT | 788.808.000 | |
| | 22 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Maluku | 15 UPT | 1.017.680.000 | |
| | 23 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Maluku Utara | 10 UPT | 748.702.000 | |
| | 24 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Gorontalo | 5 UPT | 502.216.000 | |
| | 25 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Timur | 21 UPT | 663.283.000 | |
| | 26 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Papua | 12 UPT | 986.182.000 | |
| | 27 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Papua Barat | 9 UPT | 890.544.000 | |
| | 28 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Tenggara | 9 UPT | 502.404.000 | |
| | 29 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Selatan | 28 UPT | 700.680.000 | |
| | 30 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Utara | 15 UPT | 661.530.000 | |
| | 31 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Tengah | 13 UPT | 716.207.000 | |
| | 32 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Barat | 6 UPT | 423.390.000 | |
| | 33 Pembinaan UPT Pemasyarakatan wilayah Nusa Tenggara Barat | 12 UPT | 496.626.000 | |
| | Layanan Bimbingan Kegiatan Keterampilan dan Kegiatan Kerja | | | |
| | 34 Pembinaan Kemandirian Narapidana | 20 Napi dan klien | 38.300.000 | |
| | Layanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak | | | |
| | 35 Pelatihan Keterampilan Anak | 30 Napi Anak | 46.100.000 | |

AGV

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|---------------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Tindak Lanjut Mou | | | |
| 36 | Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Mou Kebijakan Dan Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik | 1 Dokumen | 38.868.000 | |
| 37 | Rekomendasi Pengakuan Kode Etik | 1 Dokumen/Laporan | 5.880.000 | |
| | Pembinaan Layanan Pengaduan Dan Intelijen | | | |
| 38 | Penyelesaian Pengaduan Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan | 1 UPT | 10.824.000 | |
| 39 | Pembimbingan Dan Pengawasan Oleh Bapas Layanan Pendidikan, Perlindungan Dan Pengentasan Anak | 1 Klien PAS | 2.495.000 | |
| 40 | Pendampingan Peradilan Anak | 1 Napi Anak | 2.045.000 | |
| 013.06 | Direktorat Jenderal Imigrasi | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Operasi Intelijen Keimigrasian | | | |
| 1 | Operasi Intelijen Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi | 1 LHK | 65.466.000 | |
| | Penyidikan Keimigrasian | | | |
| 2 | Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian | 1 LHK | 150.119.000 | |
| | Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian | | | |
| 3 | Pendeportasian Oleh Ditjen Imigrasi | 1 Orang | 4.912.000 | |
| | Pengawasan Keimigrasian | | | |
| 4 | Pengawasan Orang Asing Dan WNI | 1 LHK | 65.466.000 | |
| | Pengawasan Keimigrasian | | | |
| 5 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Aceh | 1 LHK | 34.740.000 | |
| 6 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Sumatera Utara | 1 LHK | 33.740.000 | |
| 7 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Riau | 1 LHK | 30.570.000 | |
| 8 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Kepulauan Riau | 1 LHK | 30.060.000 | |
| 9 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Jambi | 1 LHK | 31.810.000 | |
| 10 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Sumatera Barat | 1 LHK | 30.570.000 | |
| 11 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Sumatera Selatan | 1 LHK | 33.050.000 | |
| 12 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Lampung | 1 LHK | 30.570.000 | |
| 13 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Bengkulu | 1 LHK | 32.530.000 | |
| 14 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Bangka Belitung | 1 LHK | 30.770.000 | |
| 15 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Banten | 1 LHK | 31.260.000 | |
| 16 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Jawa Barat | 1 LHK | 32.070.000 | |
| 17 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Jakarta | 1 LHK | 36.340.000 | |
| 18 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Jawa Tengah | 1 LHK | 30.560.000 | |
| 19 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Yogyakarta | 1 LHK | 31.570.000 | |
| 20 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Jawa Timur | 1 LHK | 31.865.000 | |
| 21 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Bali | 1 LHK | 33.960.000 | |
| 22 | Operasi Intelijen Keimigrasian di NTB | 1 LHK | 31.250.000 | |
| 23 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Nusa Tenggara Timur | 1 LHK | 32.860.000 | |
| 24 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Barat | 1 LHK | 36.620.000 | |
| 25 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Tengah | 1 LHK | 36.445.000 | |
| 26 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Selatan | 1 LHK | 31.650.000 | |
| 27 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Timur | 1 LHK | 60.030.000 | |
| 28 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Utara | 1 LHK | 58.930.000 | |
| 29 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Utara | 1 LHK | 31.820.000 | |
| 30 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Gorontalo | 1 LHK | 38.685.000 | |
| 31 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Barat | 1 LHK | 32.670.000 | |
| 32 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Selatan | 1 LHK | 34.070.000 | |
| 33 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tengah | 1 LHK | 35.540.000 | |
| 34 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tenggara | 1 LHK | 34.405.000 | |
| 35 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Maluku | 1 LHK | 41.085.000 | |
| 36 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Maluku Utara | 1 LHK | 51.530.000 | |
| 37 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Papua | 1 LHK | 81.640.000 | |
| 38 | Operasi Intelijen Keimigrasian di Papua Barat | 1 LHK | 80.690.000 | |
| 39 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Aceh | 1 LHK | 34.740.000 | |
| 40 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumatera Utara | 1 LHK | 33.740.000 | |
| 41 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Riau | 1 LHK | 33.000.000 | |
| 42 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kepulauan Riau | 1 LHK | 29.960.000 | |
| 43 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jambi | 1 LHK | 31.810.000 | |
| 44 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumatera Barat | 1 LHK | 30.570.000 | |
| 45 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumatera Selatan | 1 LHK | 33.050.000 | |
| 46 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Lampung | 1 LHK | 30.570.000 | |
| 47 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Bengkulu | 1 LHK | 32.530.000 | |
| 48 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Bangka Belitung | 1 LHK | 30.770.000 | |
| 49 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Banten | 1 LHK | 31.260.000 | |
| 50 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jawa Barat | 1 LHK | 32.070.000 | |
| 51 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jakarta | 1 LHK | 36.340.000 | |
| 52 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jawa Tengah | 1 LHK | 30.560.000 | |

h
AN

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Yogyakarta | 1 LHK | 31.570.000 | |
| 54 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Jawa Timur | 1 LHK | 31.805.000 | |
| 55 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Bali | 1 LHK | 33.960.000 | |
| 56 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di NTB | 1 LHK | 31.250.000 | |
| 57 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Nusa Tenggara Timur | 1 LHK | 32.860.000 | |
| 58 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Barat | 1 LHK | 36.620.000 | |
| 59 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Tengah | 1 LHK | 36.445.000 | |
| 60 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Selatan | 1 LHK | 31.650.000 | |
| 61 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Timur | 1 LHK | 60.030.000 | |
| 62 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Kalimantan Utara | 1 LHK | 58.930.000 | |
| 63 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Utara | 1 LHK | 31.820.000 | |
| 64 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Gorontalo | 1 LHK | 38.685.000 | |
| 65 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Barat | 1 LHK | 32.670.000 | |
| 66 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Tengah | 1 LHK | 35.540.000 | |
| 67 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara | 1 LHK | 34.405.000 | |
| 68 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Maluku | 1 LHK | 41.085.000 | |
| 69 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Maluku Utara | 1 LHK | 51.530.000 | |
| 70 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Papua | 1 LHK | 81.640.000 | |
| 71 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Papua Barat | 1 LHK | 80.690.000 | |
| 72 | Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sulawesi Selatan | 1 LHK | 34.070.000 | |
| 73 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Aceh | 1 LHK | 68.112.000 | |
| 74 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera Utara | 1 LHK | 66.800.000 | |
| 75 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Riau | 1 LHK | 64.980.000 | |
| 76 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kepulauan Riau | 1 LHK | 60.426.000 | |
| 77 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jambi | 1 LHK | 63.040.000 | |
| 78 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera Barat | 1 LHK | 60.930.000 | |
| 79 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera Selatan | 1 LHK | 66.920.000 | |
| 80 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Lampung | 1 LHK | 59.958.000 | |
| 81 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Bengkulu | 1 LHK | 64.954.000 | |
| 82 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Bangka Belitung | 1 LHK | 61.460.000 | |
| 83 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Banten | 1 LHK | 63.396.000 | |
| 84 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jawa Barat | 1 LHK | 65.940.000 | |
| 85 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jakarta | 1 LHK | 78.184.000 | |
| 86 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jawa Tengah | 1 LHK | 60.380.000 | |
| 87 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Yogyakarta | 1 LHK | 72.376.000 | |
| 88 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jawa Timur | 1 LHK | 64.691.000 | |
| 89 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Bali | 1 LHK | 74.160.000 | |
| 90 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di NTB | 1 LHK | 65.390.000 | |
| 91 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Nusa Tenggara Timur | 1 LHK | 67.330.000 | |
| 92 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Barat | 1 LHK | 72.596.000 | |
| 93 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah | 1 LHK | 72.343.000 | |
| 94 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Selatan | 1 LHK | 63.150.000 | |
| 95 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Timur | 1 LHK | 119.946.000 | |
| 96 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Utara | 1 LHK | 116.650.000 | |
| 97 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Utara | 1 LHK | 63.200.000 | |
| 98 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Gorontalo | 1 LHK | 75.963.000 | |

ASW

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 99 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Barat | 1 LHK | 64.872.000 | |
| 100 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Selatan | 1 LHK | 69.800.000 | |
| 101 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Tengah | 1 LHK | 71.216.000 | |
| 102 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara | 1 LHK | 68.431.000 | |
| 103 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Maluku | 1 LHK | 76.909.000 | |
| 104 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Maluku Utara | 1 LHK | 101.810.000 | |
| 105 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Papua | 1 LHK | 165.160.000 | |
| 106 | Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Papua Barat | 1 LHK | 160.010.000 | |
| | Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian | | | |
| 107 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Aceh | 1 Orang | 22.992.000 | |
| 108 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Utara | 1 Orang | 21.662.000 | |
| 109 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Riau | 1 Orang | 19.137.000 | |
| 110 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kepulauan Riau | 1 Orang | 8.500.000 | |
| 111 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jambi | 1 Orang | 12.112.000 | |
| 112 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Barat | 1 Orang | 18.929.000 | |
| 113 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Selatan | 1 Orang | 17.666.000 | |
| 114 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Bengkulu | 1 Orang | 14.942.000 | |
| 115 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Lampung | 1 Orang | 15.746.000 | |
| 116 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Bangka Belitung | 1 Orang | 17.965.000 | |
| 117 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Banten | 1 Orang | 15.684.000 | |
| 118 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Barat | 1 Orang | 16.631.000 | |
| 119 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jakarta | 1 Orang | 16.058.000 | |
| 120 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Tengah | 1 Orang | 16.716.000 | |
| 121 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Yogyakarta | 1 Orang | 17.264.000 | |
| 122 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Timur | 1 Orang | 18.557.000 | |
| 123 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Bali | 1 Orang | 20.176.000 | |
| 124 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di NTB | 1 Orang | 19.783.000 | |
| 125 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di NTT | 1 Orang | 27.639.000 | |
| 126 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Barat | 1 Orang | 19.516.000 | |
| 127 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Tengah | 1 Orang | 19.822.000 | |
| 128 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Selatan | 1 Orang | 19.269.000 | |
| 129 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Timur | 1 Orang | 26.354.000 | |
| 130 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Utara | 1 Orang | 24.920.000 | |
| 131 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Utara | 1 Orang | 23.821.000 | |
| 132 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Gorontalo | 1 Orang | 22.588.000 | |
| 133 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Barat | 1 Orang | 23.458.000 | |
| 134 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Selatan | 1 Orang | 21.456.000 | |
| 135 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Tengah | 1 Orang | 18.438.000 | |
| 136 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Tenggara | 1 Orang | 22.344.000 | |
| 137 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Maluku | 1 Orang | 26.721.000 | |
| 138 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Maluku Utara | 1 Orang | 29.951.000 | |
| 139 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Papua | 1 Orang | 42.025.000 | |
| 140 | Pemindahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Papua Barat | 1 Orang | 34.882.000 | |
| 141 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Riau | 1 Orang | 19.137.000 | |

AGW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 142 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jakarta | 1 | Orang | 16.058.000 | |
| 143 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jawa Tengah | 1 | Orang | 16.716.000 | |
| 144 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jawa Timur | 1 | Orang | 18.557.000 | |
| 145 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Bali | 1 | Orang | 20.176.000 | |
| 146 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di NTT | 1 | Orang | 27.639.000 | |
| 147 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kalimantan Barat | 1 | Orang | 19.516.000 | |
| 148 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kalimantan Timur | 1 | Orang | 26.354.000 | |
| 149 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sulawesi Utara | 1 | Orang | 23.821.000 | |
| 150 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sulawesi Selatan | 1 | Orang | 21.456.000 | |
| 151 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Papua | 1 | Orang | 42.025.000 | |
| 152 | Pemindahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sumatera Utara | 1 | Orang | 21.662.000 | |
| 153 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Aceh | 1 | Orang | 20.284.000 | |
| 154 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Utara | 1 | Orang | 18.794.000 | |
| 155 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Riau | 1 | Orang | 16.082.000 | |
| 156 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kepri | 1 | Orang | 15.372.000 | |
| 157 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jambi | 1 | Orang | 14.664.000 | |
| 158 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Barat | 1 | Orang | 15.846.000 | |
| 159 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sumatera Selatan | 1 | Orang | 14.398.000 | |
| 160 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Lampung | 1 | Orang | 12.315.000 | |
| 161 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Bengkulu | 1 | Orang | 15.086.000 | |
| 162 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Bangka Belitung | 1 | Orang | 13.433.000 | |
| 163 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Banten | 1 | Orang | 6.292.000 | |
| 164 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Barat | 1 | Orang | 7.061.000 | |
| 165 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jakarta | 1 | Orang | 4.912.000 | |
| 166 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Tengah | 1 | Orang | 13.421.000 | |
| 167 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Yogyakarta | 1 | Orang | 13.996.000 | |
| 168 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Timur | 1 | Orang | 15.394.000 | |
| 169 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Bali | 1 | Orang | 17.173.000 | |
| 170 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Nusa Tenggara Barat | 1 | Orang | 16.753.000 | |
| 171 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Nusa Tenggara Timur | 1 | Orang | 21.258.000 | |
| 172 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Barat | 1 | Orang | 16.380.000 | |
| 173 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Tengah | 1 | Orang | 16.739.000 | |
| 174 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Selatan | 1 | Orang | 15.913.000 | |
| 175 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Timur | 1 | Orang | 23.486.000 | |
| 176 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Utara | 1 | Orang | 27.004.000 | |
| 177 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Utara | 1 | Orang | 21.273.000 | |
| 178 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Gorontalo | 1 | Orang | 22.185.000 | |
| 179 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Barat | 1 | Orang | 21.407.000 | |
| 180 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Selatan | 1 | Orang | 18.588.000 | |
| 181 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Tengah | 1 | Orang | 21.842.000 | |
| 182 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Sulawesi Tenggara | 1 | Orang | 18.893.000 | |
| 183 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Maluku | 1 | Orang | 27.975.000 | |
| 184 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Maluku Utara | 1 | Orang | 29.438.000 | |
| 185 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Papua | 1 | Orang | 40.252.000 | |
| 186 | Pendeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Papua Barat | 1 | Orang | 45.664.000 | |
| 187 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sumatera Utara | 1 | Orang | 18.794.000 | |
| 188 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Riau | 1 | Orang | 16.082.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 189 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kepulauan Riau | 1 Orang | 15.372.000 | |
| 190 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jakarta | 1 Orang | 4.912.000 | |
| 191 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jawa Tengah | 1 Orang | 13.421.000 | |
| 192 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jawa Timur | 1 Orang | 15.394.000 | |
| 193 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Bali | 1 Orang | 17.173.000 | |
| 194 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Nusa Tenggara Timur | 1 Orang | 21.258.000 | |
| 195 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kalimantan Barat | 1 Orang | 16.380.000 | |
| 196 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Kalimantan Timur | 1 Orang | 23.486.000 | |
| 197 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sulawesi Utara | 1 Orang | 21.273.000 | |
| 198 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Sulawesi Selatan | 1 Orang | 18.588.000 | |
| 199 | Pendeportasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Papua | 1 Orang | 40.252.000 | |
| | Penyidikan Keimigrasian | | | |
| 200 | Penyidikan Keimigrasian di Aceh | 1 LHK | 113.474.000 | |
| 201 | Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Utara | 1 LHK | 110.042.000 | |
| 202 | Penyidikan Keimigrasian di Riau | 1 LHK | 107.400.000 | |
| 203 | Penyidikan Keimigrasian di Kepri | 1 LHK | 95.419.000 | |
| 204 | Penyidikan Keimigrasian di Jambi | 1 LHK | 102.603.000 | |
| 205 | Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Barat | 1 LHK | 98.146.000 | |
| 206 | Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Selatan | 1 LHK | 106.102.000 | |
| 207 | Penyidikan Keimigrasian di Lampung | 1 LHK | 98.530.000 | |
| 208 | Penyidikan Keimigrasian di Bengkulu | 1 LHK | 105.098.000 | |
| 209 | Penyidikan Keimigrasian di Bangka Belitung | 1 LHK | 99.476.000 | |
| 210 | Penyidikan Keimigrasian di Banten | 1 LHK | 99.964.000 | |
| 211 | Penyidikan Keimigrasian di Jawa Barat | 1 LHK | 103.361.000 | |
| 212 | Penyidikan Keimigrasian di Jakarta | 1 LHK | 118.691.000 | |
| 213 | Penyidikan Keimigrasian di Jawa Tengah | 1 LHK | 98.223.000 | |
| 214 | Penyidikan Keimigrasian di Yogyakarta | 1 LHK | 99.104.000 | |
| 215 | Penyidikan Keimigrasian di Jawa Timur | 1 LHK | 102.573.000 | |
| 216 | Penyidikan Keimigrasian di Bali | 1 LHK | 107.488.000 | |
| 217 | Penyidikan Keimigrasian di NTB | 1 LHK | 99.855.000 | |
| 218 | Penyidikan Keimigrasian di Nusa Tenggara Timur | 1 LHK | 106.163.000 | |
| 219 | Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Barat | 1 LHK | 120.262.000 | |
| 220 | Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Tengah | 1 LHK | 118.609.000 | |
| 221 | Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Selatan | 1 LHK | 102.035.000 | |
| 222 | Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Timur | 1 LHK | 207.050.000 | |
| 223 | Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Utara | 1 LHK | 202.944.000 | |
| 224 | Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Utara | 1 LHK | 102.696.000 | |
| 225 | Penyidikan Keimigrasian di Gorontalo | 1 LHK | 123.501.000 | |
| 226 | Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Barat | 1 LHK | 107.023.000 | |
| 227 | Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Selatan | 1 LHK | 110.836.000 | |
| 228 | Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tengah | 1 LHK | 115.413.000 | |
| 229 | Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara | 1 LHK | 111.975.000 | |
| 230 | Penyidikan Keimigrasian di Maluku | 1 LHK | 126.602.000 | |
| 231 | Penyidikan Keimigrasian di Maluku Utara | 1 LHK | 177.289.000 | |
| 232 | Penyidikan Keimigrasian di Papua | 1 LHK | 292.812.000 | |
| 233 | Penyidikan Keimigrasian di Papua Barat | 1 LHK | 284.112.000 | |
| 013.08 | Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Pembahasan Rancangan Undang-Undang Di DPR RI | | | |
| 1 | Pembahasan RUU Dan Penyusunan DIM | 1 RUU | 622.075.000 | |
| | Rancangan Peraturan Presiden Dan Rancangan Peraturan Menteri | | | |
| 2 | Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden | 1 Rperpres & Rpermen | 200.904.000 | |
| 013.09 | Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Pembangunan HAM di Wilayah | | | |
| 1 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil DKI Jakarta | 1 Laporan | 34.340.000 | |
| 2 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jawa Barat | 1 Laporan | 33.370.000 | |

6 ABW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|---------------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Jawa Tengah | 1 Laporan | 31.400.000 | |
| 4 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jawa Timur | 1 Laporan | 33.170.000 | |
| 5 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Utara | 1 Laporan | 32.620.000 | |
| 6 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Sulawesi Selatan | 1 Laporan | 34.160.000 | |
| 7 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Aceh | 1 Laporan | 33.400.000 | |
| 8 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Sumatera Barat | 1 Laporan | 32.790.000 | |
| 9 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Riau | 1 Laporan | 31.800.000 | |
| 10 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Sumatera Selatan | 1 Laporan | 33.380.000 | |
| 11 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Lampung | 1 Laporan | 32.750.000 | |
| 12 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Kalimantan Barat | 1 Laporan | 32.390.000 | |
| 13 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kalimantan Selatan | 1 Laporan | 32.800.000 | |
| 14 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Kalimantan Timur | 1 Laporan | 33.150.000 | |
| 15 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Sulawesi Utara | 1 Laporan | 33.740.000 | |
| 16 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Bali | 1 Laporan | 32.980.000 | |
| 17 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil NTT | 1 Laporan | 33.140.000 | |
| 18 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Maluku | 1 Laporan | 33.960.000 | |
| 19 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Papua | 1 Laporan | 38.840.000 | |
| 20 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil | 1 Laporan | 31.980.000 | |
| 21 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Yogyakarta | 1 Laporan | 30.810.000 | |
| 22 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Bengkulu | 1 Laporan | 32.790.000 | |
| 23 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Palangkaraya | 1 Laporan | 31.800.000 | |
| 24 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 33.150.000 | |
| 25 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Palu | 1 Laporan | 32.380.000 | |
| 26 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil NTB | 1 Laporan | 32.380.000 | |
| 27 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Banten | 1 Laporan | 34.160.000 | |
| 28 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Bangka Belitung | 1 Laporan | 32.370.000 | |
| 29 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Gorontalo | 1 Laporan | 32.410.000 | |
| 30 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Maluku Utara | 1 Laporan | 37.920.000 | |
| 31 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Papua Barat | 1 Laporan | 38.100.000 | |
| 32 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Kepri | 1 Laporan | 33.900.000 | |
| 33 | Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif IIAM Kanwil Sulawesi Barat | 1 Laporan | 34.150.000 | |
| 013.10 | Badan Pembinaan Hukum Nasional | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | 1. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi | | | |
| 1 | Perkara Hukum Pidana DKI Jakarta | 1 Orang | 13.520.000 | |
| 2 | Perkara Hukum Perdata DKI Jakarta | 1 Orang | 12.810.000 | |
| 3 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara DKI Jakarta | 1 Orang | 12.810.000 | |
| 4 | Perkara Hukum Pidana Jawa Barat | 1 Orang | 13.928.000 | |
| 5 | Perkara Hukum Perdata Jawa Barat | 1 Orang | 13.184.000 | |
| 6 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Jawa Barat | 1 Orang | 13.184.000 | |
| 7 | Perkara Hukum Pidana Jawa Tengah | 1 Orang | 13.400.000 | |
| 8 | Perkara Hukum Perdata Jawa Tengah | 1 Orang | 12.700.000 | |
| 9 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Jawa Tengah | 1 Orang | 12.700.000 | |
| 10 | Perkara Hukum Pidana Jawa Timur | 1 Orang | 13.400.000 | |
| 11 | Perkara Hukum Perdata Jawa Timur | 1 Orang | 12.700.000 | |
| 12 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Jawa Timur | 1 Orang | 12.700.000 | |
| 13 | Perkara Hukum Pidana Sumatera Utara | 1 Orang | 15.656.000 | |
| 14 | Perkara Hukum Perdata Sumatera Utara | 1 Orang | 14.768.000 | |
| 15 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sumatera Utara | 1 Orang | 14.768.000 | |

Handwritten signature or initials.

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 16 | Perkara Hukum Pidana Sulawesi Selatan | 1 | Orang | 13.400.000 | |
| 17 | Perkara Hukum Perdata Sulawesi Selatan | 1 | Orang | 12.700.000 | |
| 18 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi Selatan | 1 | Orang | 12.700.000 | |
| 19 | Perkara Hukum Pidana Aceh | 1 | Orang | 14.540.000 | |
| 20 | Perkara Hukum Perdata Aceh | 1 | Orang | 13.745.000 | |
| 21 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Aceh | 1 | Orang | 13.745.000 | |
| 22 | Perkara Hukum Pidana Sumatera Barat | 1 | Orang | 13.400.000 | |
| 23 | Perkara Hukum Perdata Sumatera Barat | 1 | Orang | 12.700.000 | |
| 24 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sumatera Barat | 1 | Orang | 12.700.000 | |
| 25 | Perkara Hukum Pidana Riau | 1 | Orang | 15.500.000 | |
| 26 | Perkara Hukum Perdata Riau | 1 | Orang | 14.625.000 | |
| 27 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Riau | 1 | Orang | 14.625.000 | |
| 28 | Perkara Hukum Pidana Sumatera Selatan | 1 | Orang | 15.500.000 | |
| 29 | Perkara Hukum Perdata Sumatera Selatan | 1 | Orang | 14.625.000 | |
| 30 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sumatera Selatan | 1 | Orang | 14.625.000 | |
| 31 | Perkara Hukum Pidana Lampung | 1 | Orang | 13.400.000 | |
| 32 | Perkara Hukum Perdata Lampung | 1 | Orang | 12.700.000 | |
| 33 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Lampung | 1 | Orang | 12.700.000 | |
| 34 | Perkara Hukum Pidana Kalimantan Barat | 1 | Orang | 14.576.000 | |
| 35 | Perkara Hukum Perdata Kalimantan Barat | 1 | Orang | 13.778.000 | |
| 36 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kalimantan Barat | 1 | Orang | 13.778.000 | |
| 37 | Perkara Hukum Pidana Kalimantan Selatan | 1 | Orang | 13.520.000 | |
| 38 | Perkara Hukum Perdata Kalimantan Selatan | 1 | Orang | 12.810.000 | |
| 39 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kalimantan Selatan | 1 | Orang | 12.810.000 | |
| 40 | Perkara Hukum Pidana Kalimantan Timur | 1 | Orang | 17.156.000 | |
| 41 | Perkara Hukum Perdata Kalimantan Timur | 1 | Orang | 16.143.000 | |
| 42 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kalimantan Timur | 1 | Orang | 16.143.000 | |
| 43 | Perkara Hukum Pidana Sulawesi Utara | 1 | Orang | 14.600.000 | |
| 44 | Perkara Hukum Perdata Sulawesi Utara | 1 | Orang | 13.800.000 | |
| 45 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi Utara | 1 | Orang | 13.800.000 | |
| 46 | Perkara Hukum Pidana Bali | 1 | Orang | 14.480.000 | |
| 47 | Perkara Hukum Perdata Bali | 1 | Orang | 13.690.000 | |
| 48 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Bali | 1 | Orang | 13.690.000 | |
| 49 | Perkara Hukum Pidana Nusa Tenggara Timur | 1 | Orang | 14.600.000 | |
| 50 | Perkara Hukum Perdata Nusa Tenggara Timur | 1 | Orang | 13.800.000 | |
| 51 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Nusa Tenggara Timur | 1 | Orang | 13.800.000 | |
| 52 | Perkara Hukum Pidana Maluku | 1 | Orang | 15.680.000 | |
| 53 | Perkara Hukum Perdata Maluku | 1 | Orang | 14.790.000 | |
| 54 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Maluku | 1 | Orang | 14.790.000 | |
| 55 | Perkara Hukum Pidana Papua | 1 | Orang | 17.300.000 | |
| 56 | Perkara Hukum Perdata Papua | 1 | Orang | 16.275.000 | |
| 57 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Papua | 1 | Orang | 16.275.000 | |
| 58 | Perkara Hukum Pidana Jambi | 1 | Orang | 13.520.000 | |
| 59 | Perkara Hukum Perdata Jambi | 1 | Orang | 12.810.000 | |
| 60 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Jambi | 1 | Orang | 12.810.000 | |
| 61 | Perkara Hukum Pidana Bengkulu | 1 | Orang | 13.520.000 | |
| 62 | Perkara Hukum Perdata Bengkulu | 1 | Orang | 12.810.000 | |
| 63 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Bengkulu | 1 | Orang | 12.810.000 | |
| 64 | Perkara Hukum Pidana Di Yogyakarta | 1 | Orang | 14.588.000 | |
| 65 | Perkara Hukum Perdata Di Yogyakarta | 1 | Orang | 13.789.000 | |
| 66 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Di Yogyakarta | 1 | Orang | 13.789.000 | |
| 67 | Perkara Hukum Pidana Kalimantan Tengah | 1 | Orang | 16.328.000 | |
| 68 | Perkara Hukum Perdata Kalimantan Tengah | 1 | Orang | 15.384.000 | |
| 69 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kalimantan Tengah | 1 | Orang | 15.384.000 | |
| 70 | Perkara Hukum Pidana Sulawesi Tenggara | 1 | Orang | 14.240.000 | |
| 71 | Perkara Hukum Perdata Sulawesi Tenggara | 1 | Orang | 13.470.000 | |
| 72 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi | 1 | Orang | 13.470.000 | |
| 73 | Perkara Hukum Pidana Sulawesi Tengah | 1 | Orang | 14.240.000 | |
| 74 | Perkara Hukum Perdata Sulawesi Tengah | 1 | Orang | 13.470.000 | |
| 75 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah | 1 | Orang | 13.470.000 | |
| 76 | Perkara Hukum Pidana Nusa Tenggara Barat | 1 | Orang | 14.480.000 | |
| 77 | Perkara Hukum Perdata Nusa Tenggara Barat | 1 | Orang | 13.690.000 | |
| 78 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Nusa Tenggara Barat | 1 | Orang | 13.690.000 | |
| 79 | Perkara Hukum Pidana Banten | 1 | Orang | 13.400.000 | |
| 80 | Perkara Hukum Perdata Banten | 1 | Orang | 12.700.000 | |
| 81 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Banten | 1 | Orang | 12.700.000 | |
| 82 | Perkara Hukum Pidana Bangka Belitung | 1 | Orang | 16.124.000 | |
| 83 | Perkara Hukum Perdata Bangka Belitung | 1 | Orang | 15.197.000 | |
| 84 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Bangka Belitung | 1 | Orang | 15.197.000 | |
| 85 | Perkara Hukum Pidana Gorontalo | 1 | Orang | 13.880.000 | |
| 86 | Perkara Hukum Perdata Gorontalo | 1 | Orang | 13.140.000 | |
| 87 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Gorontalo | 1 | Orang | 13.140.000 | |
| 88 | Perkara Hukum Pidana Maluku Utara | 1 | Orang | 15.800.000 | |
| 89 | Perkara Hukum Perdata Maluku Utara | 1 | Orang | 14.900.000 | |
| 90 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Maluku Utara | 1 | Orang | 14.900.000 | |
| 91 | Perkara Hukum Pidana Papua Barat | 1 | Orang | 16.760.000 | |

ABW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | Perkara Hukum Perdata Papua Barat | 1 Orang | 15.780.000 | |
| 93 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Papua Barat | 1 Orang | 15.780.000 | |
| 94 | Perkara Hukum Pidana Kepulauan Riau | 1 Orang | 14.840.000 | |
| 95 | Perkara Hukum Perdata Kepulauan Riau | 1 Orang | 14.020.000 | |
| 96 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kepulauan Riau | 1 Orang | 14.020.000 | |
| 97 | Perkara Hukum Pidana Sulawesi Barat | 1 Orang | 13.520.000 | |
| 98 | Perkara Hukum Perdata Sulawesi Barat | 1 Orang | 12.810.000 | |
| 99 | Perkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi Barat | 1 Orang | 12.810.000 | |
| | 2. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi | | | |
| 100 | Penyuluhan Hukum DKI Jakarta | 1 Kegiatan | 4.840.000 | |
| 101 | Konsultasi Hukum DKI Jakarta | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 102 | Investigasi Perkara DKI Jakarta | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 103 | Penelitian Hukum DKI Jakarta | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 104 | Mediasi DKI Jakarta | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 105 | Negosiasi DKI Jakarta | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 106 | Pemberdayaan Masyarakat DKI Jakarta | 1 Kegiatan | 4.160.000 | |
| 107 | Pendampingan Di Luar Pengadilan DKI Jakarta | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 108 | Drafting Dokumen Hukum DKI Jakarta | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 109 | Penyuluhan Hukum Jawa Barat | 1 Kegiatan | 4.690.000 | |
| 110 | Konsultasi Hukum Jawa Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 111 | Investigasi Perkara Jawa Barat | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 112 | Penelitian Hukum Jawa Barat | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 113 | Mediasi Jawa Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 114 | Negosiasi Jawa Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 115 | Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat | 1 Kegiatan | 4.060.000 | |
| 116 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Jawa Barat | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 117 | Drafting Dokumen Hukum Jawa Barat | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 118 | Penyuluhan Hukum Jawa Tengah | 1 Kegiatan | 4.390.000 | |
| 119 | Konsultasi Hukum Jawa Tengah | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 120 | Investigasi Perkara Jawa Tengah | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 121 | Penelitian Hukum Jawa Tengah | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 122 | Mediasi Jawa Tengah | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 123 | Negosiasi Jawa Tengah | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 124 | Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah | 1 Kegiatan | 3.860.000 | |
| 125 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Jawa Tengah | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 126 | Drafting Dokumen Hukum Jawa Tengah | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 127 | Penyuluhan Hukum Jawa Timur | 1 Kegiatan | 4.660.000 | |
| 128 | Konsultasi Hukum Jawa Timur | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 129 | Investigasi Perkara Jawa Timur | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 130 | Penelitian Hukum Jawa Timur | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 131 | Mediasi Jawa Timur | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 132 | Negosiasi Jawa Timur | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 133 | Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur | 1 Kegiatan | 4.040.000 | |
| 134 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Jawa Timur | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 135 | Drafting Dokumen Hukum Jawa Timur | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 136 | Penyuluhan Hukum Sumatera Utara | 1 Kegiatan | 4.570.000 | |
| 137 | Konsultasi Hukum Sumatera Utara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 138 | Investigasi Perkara Sumatera Utara | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 139 | Penelitian Hukum Sumatera Utara | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 140 | Mediasi Sumatera Utara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 141 | Negosiasi Sumatera Utara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 142 | Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Utara | 1 Kegiatan | 3.980.000 | |
| 143 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Sumatera Utara | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 144 | Drafting Dokumen Hukum Sumatera Utara | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 145 | Penyuluhan Hukum Sulawesi Selatan | 1 Kegiatan | 4.810.000 | |
| 146 | Konsultasi Hukum Sulawesi Selatan | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 147 | Investigasi Perkara Sulawesi Selatan | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 148 | Penelitian Hukum Sulawesi Selatan | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 149 | Mediasi Sulawesi Selatan | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 150 | Negosiasi Sulawesi Selatan | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 151 | Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan | 1 Kegiatan | 4.140.000 | |
| 152 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Selatan | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 153 | Drafting Dokumen Hukum Sulawesi Selatan | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 154 | Penyuluhan Hukum Aceh | 1 Kegiatan | 4.690.000 | |
| 155 | Konsultasi Hukum Aceh | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 156 | Investigasi Perkara Aceh | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 157 | Penelitian Hukum Aceh | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 158 | Mediasi Aceh | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 159 | Negosiasi Aceh | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 160 | Pemberdayaan Masyarakat Aceh | 1 Kegiatan | 4.060.000 | |
| 161 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Aceh | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 162 | Drafting Dokumen Hukum Aceh | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 163 | Penyuluhan Hukum Sumatera Barat | 1 Kegiatan | 4.600.000 | |
| 164 | Konsultasi Hukum Sumatera Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 165 | Investigasi Perkara Sumatera Barat | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 166 | Penelitian Hukum Sumatera Barat | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 167 | Mediasi Sumatera Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 168 | Negosiasi Sumatera Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 169 | Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Barat | 1 Kegiatan | 4.000.000 | |
| 170 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Sumatera Barat | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 171 | Drafting Dokumen Hukum Sumatera Barat | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 172 | Penyuluhan Hukum Riau | 1 Kegiatan | 4.450.000 | |
| 173 | Konsultasi Hukum Riau | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 174 | Investigasi Perkara Riau | 1 Kegiatan | 600.000 | |

Handwritten signature/initials

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 175 | Penelitian Hukum Riau | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 176 | Mediasi Riau | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 177 | Negosiasi Riau | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 178 | Pemberdayaan Masyarakat Riau | 1 Kegiatan | 3.900.000 | |
| 179 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Riau | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 180 | Drafting Dokumen Hukum Riau | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 181 | Penyuluhan Hukum Sumatera Selatan | 1 Kegiatan | 4.690.000 | |
| 182 | Konsultasi Hukum Sumatera Selatan | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 183 | Investigasi Perkara Sumatera Selatan | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 184 | Penelitian Hukum Sumatera Selatan | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 185 | Mediasi Sumatera Selatan | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 186 | Negosiasi Sumatera Selatan | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 187 | Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan | 1 Kegiatan | 4.060.000 | |
| 188 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Sumatera Selatan | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 189 | Drafting Dokumen Hukum Sumatera Selatan | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 190 | Penyuluhan Hukum Lampung | 1 Kegiatan | 4.600.000 | |
| 191 | Konsultasi Hukum Lampung | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 192 | Investigasi Perkara Lampung | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 193 | Penelitian Hukum Lampung | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 194 | Mediasi Lampung | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 195 | Negosiasi Lampung | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 196 | Pemberdayaan Masyarakat Lampung | 1 Kegiatan | 4.000.000 | |
| 197 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Lampung | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 198 | Drafting Dokumen Hukum Lampung | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 199 | Penyuluhan Hukum Kalimantan Barat | 1 Kegiatan | 4.540.000 | |
| 200 | Konsultasi Hukum Kalimantan Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 201 | Investigasi Perkara Kalimantan Barat | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 202 | Penelitian Hukum Kalimantan Barat | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 203 | Mediasi Kalimantan Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 204 | Negosiasi Kalimantan Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 205 | Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Barat | 1 Kegiatan | 3.960.000 | |
| 206 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Kalimantan Barat | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 207 | Drafting Dokumen Hukum Kalimantan Barat | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 208 | Penyuluhan Hukum Kalimantan Selatan | 1 Kegiatan | 4.600.000 | |
| 209 | Konsultasi Hukum Kalimantan Selatan | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 210 | Investigasi Perkara Kalimantan Selatan | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 211 | Penelitian Hukum Kalimantan Selatan | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 212 | Mediasi Kalimantan Selatan | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 213 | Negosiasi Kalimantan Selatan | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 214 | Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Selatan | 1 Kegiatan | 4.000.000 | |
| 215 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Kalimantan Selatan | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 216 | Drafting Dokumen Hukum Kalimantan Selatan | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 217 | Penyuluhan Hukum Kalimantan Timur | 1 Kegiatan | 4.660.000 | |
| 218 | Konsultasi Hukum Kalimantan Timur | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 219 | Investigasi Perkara Kalimantan Timur | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 220 | Penelitian Hukum Kalimantan Timur | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 221 | Mediasi Kalimantan Timur | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 222 | Negosiasi Kalimantan Timur | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 223 | Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Timur | 1 Kegiatan | 4.040.000 | |
| 224 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Kalimantan Timur | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 225 | Drafting Dokumen Hukum Kalimantan Timur | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 226 | Penyuluhan Hukum Sulawesi Utara | 1 Kegiatan | 4.750.000 | |
| 227 | Konsultasi Hukum Sulawesi Utara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 228 | Investigasi Perkara Sulawesi Utara | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 229 | Penelitian Hukum Sulawesi Utara | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 230 | Mediasi Sulawesi Utara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 231 | Negosiasi Sulawesi Utara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 232 | Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Utara | 1 Kegiatan | 4.100.000 | |
| 233 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Utara | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 234 | Drafting Dokumen Hukum Sulawesi Utara | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 235 | Penyuluhan Hukum Bali | 1 Kegiatan | 4.630.000 | |
| 236 | Konsultasi Hukum Bali | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 237 | Investigasi Perkara Bali | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 238 | Penelitian Hukum Bali | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 239 | Mediasi Bali | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 240 | Negosiasi Bali | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 241 | Pemberdayaan Masyarakat Bali | 1 Kegiatan | 4.020.000 | |
| 242 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Bali | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 243 | Drafting Dokumen Hukum Bali | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 244 | Penyuluhan Hukum Nusa Tenggara Timur | 1 Kegiatan | 4.660.000 | |
| 245 | Konsultasi Hukum Nusa Tenggara Timur | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 246 | Investigasi Perkara Nusa Tenggara Timur | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 247 | Penelitian Hukum Nusa Tenggara Timur | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 248 | Mediasi Nusa Tenggara Timur | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 249 | Negosiasi Nusa Tenggara Timur | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 250 | Pemberdayaan Masyarakat Nusa Tenggara Timur | 1 Kegiatan | 4.040.000 | |
| 251 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Nusa Tenggara Timur | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 252 | Drafting Dokumen Hukum Nusa Tenggara Timur | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 253 | Penyuluhan Hukum Maluku | 1 Kegiatan | 4.780.000 | |
| 254 | Konsultasi Hukum Maluku | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |

6 ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 255 | Investigasi Perkara Maluku | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 256 | Penelitian Hukum Maluku | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 257 | Mediasi Maluku | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 258 | Negosiasi Maluku | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 259 | Pemberdayaan Masyarakat Maluku | 1 Kegiatan | 4.120.000 | |
| 260 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Maluku | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 261 | Drafting Dokumen Hukum Maluku | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 262 | Penyuluhan Hukum Papua | 1 Kegiatan | 5.530.000 | |
| 263 | Konsultasi Hukum Papua | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 264 | Investigasi Perkara Papua | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 265 | Penelitian Hukum Papua | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 266 | Mediasi Papua | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 267 | Negosiasi Papua | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 268 | Pemberdayaan Masyarakat Papua | 1 Kegiatan | 4.620.000 | |
| 269 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Papua | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 270 | Drafting Dokumen Hukum Papua | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 271 | Penyuluhan Hukum Jambi | 1 Kegiatan | 4.480.000 | |
| 272 | Konsultasi Hukum Jambi | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 273 | Investigasi Perkara Jambi | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 274 | Penelitian Hukum Jambi | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 275 | Mediasi Jambi | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 276 | Negosiasi Jambi | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 277 | Pemberdayaan Masyarakat Jambi | 1 Kegiatan | 3.920.000 | |
| 278 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Jambi | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 279 | Drafting Dokumen Hukum Jambi | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 280 | Penyuluhan Hukum Bengkulu | 1 Kegiatan | 4.600.000 | |
| 281 | Konsultasi Hukum Bengkulu | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 282 | Investigasi Perkara Bengkulu | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 283 | Penelitian Hukum Bengkulu | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 284 | Mediasi Bengkulu | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 285 | Negosiasi Bengkulu | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 286 | Pemberdayaan Masyarakat Bengkulu | 1 Kegiatan | 4.000.000 | |
| 287 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Bengkulu | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 288 | Drafting Dokumen Hukum Bengkulu | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 289 | Penyuluhan Hukum Di Yogyakarta | 1 Kegiatan | 4.300.000 | |
| 290 | Konsultasi Hukum Di Yogyakarta | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 291 | Investigasi Perkara Di Yogyakarta | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 292 | Penelitian Hukum Di Yogyakarta | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 293 | Mediasi Di Yogyakarta | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 294 | Negosiasi Di Yogyakarta | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 295 | Pemberdayaan Masyarakat Di Yogyakarta | 1 Kegiatan | 3.800.000 | |
| 296 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Di Yogyakarta | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 297 | Drafting Dokumen Hukum Di Yogyakarta | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 298 | Penyuluhan Hukum Kalimantan Tengah | 1 Kegiatan | 4.450.000 | |
| 299 | Konsultasi Hukum Kalimantan Tengah | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 300 | Investigasi Perkara Kalimantan Tengah | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 301 | Penelitian Hukum Kalimantan Tengah | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 302 | Mediasi Kalimantan Tengah | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 303 | Negosiasi Kalimantan Tengah | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 304 | Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Tengah | 1 Kegiatan | 3.900.000 | |
| 305 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Kalimantan Tengah | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 306 | Drafting Dokumen Hukum Kalimantan Tengah | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 307 | Penyuluhan Hukum Sulawesi Tenggara | 1 Kegiatan | 4.660.000 | |
| 308 | Konsultasi Hukum Sulawesi Tenggara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 309 | Investigasi Perkara Sulawesi Tenggara | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 310 | Penelitian Hukum Sulawesi Tenggara | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 311 | Mediasi Sulawesi Tenggara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 312 | Negosiasi Sulawesi Tenggara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 313 | Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tenggara | 1 Kegiatan | 4.040.000 | |
| 314 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Tenggara | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 315 | Drafting Dokumen Hukum Sulawesi Tenggara | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 316 | Penyuluhan Hukum Sulawesi Tengah | 1 Kegiatan | 4.540.000 | |
| 317 | Konsultasi Hukum Sulawesi Tengah | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 318 | Investigasi Perkara Sulawesi Tengah | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 319 | Penelitian Hukum Sulawesi Tengah | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 320 | Mediasi Sulawesi Tengah | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 321 | Negosiasi Sulawesi Tengah | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 322 | Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tengah | 1 Kegiatan | 3.960.000 | |
| 323 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Tengah | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 324 | Drafting Dokumen Hukum Sulawesi Tengah | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 325 | Penyuluhan Hukum Nusa Tenggara Barat | 1 Kegiatan | 4.540.000 | |
| 326 | Konsultasi Hukum Nusa Tenggara Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 327 | Investigasi Perkara Nusa Tenggara Barat | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| 328 | Penelitian Hukum Nusa Tenggara Barat | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| 329 | Mediasi Nusa Tenggara Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 330 | Negosiasi Nusa Tenggara Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| 331 | Pemberdayaan Masyarakat Nusa Tenggara Barat | 1 Kegiatan | 3.960.000 | |
| 332 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Nusa Tenggara Barat | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| 333 | Drafting Dokumen Hukum Nusa Tenggara Barat | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 334 | Penyuluhan Hukum Banten | 1 Kegiatan | 4.810.000 | |
| 335 | Konsultasi Hukum Banten | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan | |
|---------------|--|---|------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 336 | Investigasi Perkara Banten | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| | 337 | Penelitian Hukum Banten | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| | 338 | Mediasi Banten | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 339 | Negosiasi Banten | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 340 | Pemberdayaan Masyarakat Banten | 1 Kegiatan | 4.140.000 | |
| | 341 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Banten | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| | 342 | Drafting Dokumen Hukum Banten | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| | 343 | Penyuluhan Hukum Bangka Belitung | 1 Kegiatan | 4.540.000 | |
| | 344 | Konsultasi Hukum Bangka Belitung | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 345 | Investigasi Perkara Bangka Belitung | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| | 346 | Penelitian Hukum Bangka Belitung | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| | 347 | Mediasi Bangka Belitung | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 348 | Negosiasi Bangka Belitung | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 349 | Pemberdayaan Masyarakat Bangka Belitung | 1 Kegiatan | 3.960.000 | |
| | 350 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Bangka Belitung | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| | 351 | Drafting Dokumen Hukum Bangka Belitung | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| | 352 | Penyuluhan Hukum Gorontalo | 1 Kegiatan | 4.540.000 | |
| | 353 | Konsultasi Hukum Gorontalo | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 354 | Investigasi Perkara Gorontalo | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| | 355 | Penelitian Hukum Gorontalo | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| | 356 | Mediasi Gorontalo | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 357 | Negosiasi Gorontalo | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 358 | Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo | 1 Kegiatan | 3.960.000 | |
| | 359 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Gorontalo | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| | 360 | Drafting Dokumen Hukum Gorontalo | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| | 361 | Penyuluhan Hukum Maluku Utara | 1 Kegiatan | 5.380.000 | |
| | 362 | Konsultasi Hukum Maluku Utara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 363 | Investigasi Perkara Maluku Utara | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| | 364 | Penelitian Hukum Maluku Utara | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| | 365 | Mediasi Maluku Utara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 366 | Negosiasi Maluku Utara | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 367 | Pemberdayaan Masyarakat Maluku Utara | 1 Kegiatan | 4.520.000 | |
| | 368 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Maluku Utara | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| | 369 | Drafting Dokumen Hukum Maluku Utara | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| | 370 | Penyuluhan Hukum Papua Barat | 1 Kegiatan | 5.410.000 | |
| | 371 | Konsultasi Hukum Papua Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 372 | Investigasi Perkara Papua Barat | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| | 373 | Penelitian Hukum Papua Barat | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| | 374 | Mediasi Papua Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 375 | Negosiasi Papua Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 376 | Pemberdayaan Masyarakat Papua Barat | 1 Kegiatan | 4.540.000 | |
| | 377 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Papua Barat | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| | 378 | Drafting Dokumen Hukum Papua Barat | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| | 379 | Penyuluhan Hukum Kepulauan Riau | 1 Kegiatan | 4.780.000 | |
| | 380 | Konsultasi Hukum Kepulauan Riau | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 381 | Investigasi Perkara Kepulauan Riau | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| | 382 | Penelitian Hukum Kepulauan Riau | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| | 383 | Mediasi Kepulauan Riau | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 384 | Negosiasi Kepulauan Riau | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 385 | Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau | 1 Kegiatan | 4.120.000 | |
| | 386 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Kepulauan Riau | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| | 387 | Drafting Dokumen Hukum Kepulauan Riau | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| | 388 | Penyuluhan Hukum Sulawesi Barat | 1 Kegiatan | 4.810.000 | |
| | 389 | Konsultasi Hukum Sulawesi Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 390 | Investigasi Perkara Sulawesi Barat | 1 Kegiatan | 600.000 | |
| | 391 | Penelitian Hukum Sulawesi Barat | 1 Kegiatan | 2.500.000 | |
| | 392 | Mediasi Sulawesi Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 393 | Negosiasi Sulawesi Barat | 1 Kegiatan | 1.050.000 | |
| | 394 | Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat | 1 Kegiatan | 4.140.000 | |
| | 395 | Pendampingan Di Luar Pengadilan Sulawesi Barat | 1 Kegiatan | 2.900.000 | |
| | 396 | Drafting Dokumen Hukum Sulawesi Barat | 1 Kegiatan | 500.000 | |
| 013.12 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia | | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | | |
| | 1 Diklat Berbasis Kompetensi Di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi APGAKUM Bagi Instansi Terkait | 30 Orang | | 275.750.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|-------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 015.01 | Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Laporan Pembinaan dan Pemeriksaan Akuntan, KJA, AP, KAP, PP, KJPP, Aktuaris, dan Kantor Jasa Aktuaris | | | |
| | 1 Laporan Pemeriksaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) | 77 Laporan | 3.058.415.000 | |
| | 2 Laporan Pemeriksaan Penilai Publik / Kantor Jasa Penilai Publik (PP/KJPP) | 96 Laporan | 2.767.566.000 | |
| 015.02 | Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Pengakuan Hukum yang Efektif | 4 Laporan | 4.426.658.000 | |
| | 2 Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJP | 4 Policy Recommendation | 5.079.390.000 | |
| | 3 Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJBC | 5 Policy Recommendation | 4.228.474.000 | |
| | 4 Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJPB dan DJPPR | 4 Policy Recommendation | 4.217.896.000 | |
| | 5 Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJKN dan BKIP | 4 Policy Recommendation | 4.218.174.000 | |
| | 6 Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJA, DJPK, dan Pelaksanaan Belanja Modal | 4 Policy Recommendation | 3.991.506.000 | |
| | 7 Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada Setjen dan BPPK | 4 Policy Recommendation | 4.358.800.000 | |
| | 8 Kebijakan Pengembangan Pengawasan Intern | 4 Laporan | 6.001.678.000 | |
| 015.03 | Direktorat Jenderal Anggaran SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Peraturan Bidang Penganggaran | | | |
| | 1 PMK Tata Cara Revisi Anggaran | 1 Peraturan | 1.038.510.000 | |
| | 2 PMK tentang Standar Biaya Masukan | 1 Peraturan | 1.544.198.000 | |
| | 3 PMK tentang Standar Biaya Keluaran | 1 Peraturan | 840.765.000 | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 4 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai | 680 Orang | 2.612.707.000 | |
| 015.04 | Direktorat Jenderal Pajak SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Wilayah Luar Jawa | | | |
| | 1 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan | 1 Berkas | 209.250.000 | |
| | Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Wilayah Jawa | | | |
| | 2 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan | 2 Berkas | 418.500.000 | |
| | Dokumen di Bidang Penyidikan | | | |
| | 3 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan | 40 Dokumen | 11.605.000.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 4 Penyanderaan (Gijzeling) | 1 Penanggung Pajak | 132.207.000 | |
| 015.05 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Laporan Hasil Audit | | | |
| | 1 Laporan Hasil Audit Penugasan Dalam Kota | 59 Dokumen | 806.884.000 | |
| | 2 Laporan Hasil Audit Penugasan Luar Kota 1 | 114 Dokumen | 4.550.766.000 | |
| | 3 Laporan Hasil Audit Penugasan Luar Kota 2 | 61 Dokumen | 3.779.011.000 | |
| | 4 Laporan Hasil Audit Penugasan Luar Kota 3 | 166 Dokumen | 17.347.000.000 | |
| 015.08 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) LKPP Tingkat Kuasa BUN | | | |
| | 1 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta VI | 12 Laporan | 180.724.000 | |
| | 2 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta V | 12 Laporan | 207.924.000 | |
| | 3 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta IV | 12 Laporan | 198.132.000 | |
| | 4 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta III | 12 Laporan | 195.684.000 | |
| | 5 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta II | 12 Laporan | 185.076.000 | |

L Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|---------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | 6 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta I | 12 | Laporan | 180.180.000 | |
| | 7 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah | 12 | Laporan | 195.684.000 | |
| | 8 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bandung I | 12 | Laporan | 171.266.000 | |
| | 9 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bandung II | 12 | Laporan | 147.158.000 | |
| | 10 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Cirebon | 12 | Laporan | 137.970.000 | |
| | 11 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bogor | 12 | Laporan | 153.554.000 | |
| | 12 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sukabumi | 12 | Laporan | 144.438.000 | |
| | 13 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tasikmalaya | 12 | Laporan | 163.590.000 | |
| | 14 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwakarta | 12 | Laporan | 119.618.000 | |
| | 15 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Karawang | 12 | Laporan | 110.642.000 | |
| | 16 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Garut | 12 | Laporan | 111.550.000 | |
| | 17 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sumedang | 12 | Laporan | 108.770.000 | |
| | 18 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kuningan | 12 | Laporan | 125.294.000 | |
| | 19 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta VII | 12 | Laporan | 194.868.000 | |
| | 20 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bekasi | 12 | Laporan | 117.786.000 | |
| | 21 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Banjarnegara | 12 | Laporan | 110.678.000 | |
| | 22 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwodadi | 12 | Laporan | 109.118.000 | |
| | 23 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sragen | 12 | Laporan | 114.506.000 | |
| | 24 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Klaten | 12 | Laporan | 118.886.000 | |
| | 25 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Cilacap | 12 | Laporan | 113.622.000 | |
| | 26 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pati | 12 | Laporan | 112.822.000 | |
| | 27 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purworejo | 12 | Laporan | 112.386.000 | |
| | 28 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tegal | 12 | Laporan | 142.014.000 | |
| | 29 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Magelang | 12 | Laporan | 134.382.000 | |
| | 30 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kudus | 12 | Laporan | 132.858.000 | |
| | 31 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pekalongan | 12 | Laporan | 128.194.000 | |
| | 32 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwokerto | 12 | Laporan | 129.542.000 | |
| | 33 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Surakarta | 12 | Laporan | 135.542.000 | |
| | 34 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Semarang II | 12 | Laporan | 141.194.000 | |
| | 35 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Semarang II | 12 | Laporan | 123.294.000 | |
| | 36 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Blitar | 12 | Laporan | 152.756.000 | |
| | 37 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tuban | 12 | Laporan | 106.852.000 | |
| | 38 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sidoarjo | 12 | Laporan | 121.136.000 | |
| | 39 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jember | 12 | Laporan | 121.556.000 | |
| | 40 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pacitan | 12 | Laporan | 107.156.000 | |
| | 41 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Mojokerto | 12 | Laporan | 124.268.000 | |
| | 42 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Banyuwangi | 12 | Laporan | 113.852.000 | |
| | 43 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bojonegoro | 12 | Laporan | 118.108.000 | |
| | 44 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pamekasan | 12 | Laporan | 150.772.000 | |
| | 45 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bondowoso | 12 | Laporan | 149.532.000 | |
| | 46 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Madiun | 12 | Laporan | 175.580.000 | |
| | 47 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kediri | 12 | Laporan | 150.868.000 | |
| | 48 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Malang | 12 | Laporan | 169.536.000 | |
| | 49 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Surabaya II | 12 | Laporan | 145.400.000 | |
| | 50 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Surabaya I | 12 | Laporan | 137.464.000 | |
| | 51 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Wonosari | 12 | Laporan | 113.760.000 | |
| | 52 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Wates | 12 | Laporan | 111.560.000 | |
| | 53 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Yogyakarta | 12 | Laporan | 183.000.000 | |
| | 54 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Lhokseumawe | 12 | Laporan | 169.106.000 | |
| | 55 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kutacane | 12 | Laporan | 118.802.000 | |
| | 56 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Takengon | 12 | Laporan | 124.222.000 | |

L Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tapak Tuan | 12 Laporan | 134.690.000 | |
| 58 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Langsa | 12 Laporan | 138.974.000 | |
| 59 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Meulaboh | 12 Laporan | 152.730.000 | |
| 60 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Banda Aceh | 12 Laporan | 252.326.000 | |
| 61 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Padang Sidempuan | 12 Laporan | 152.838.000 | |
| 62 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Balige | 12 Laporan | 124.222.000 | |
| 63 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tebing Tinggi | 12 Laporan | 120.974.000 | |
| 64 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sibolga | 12 Laporan | 115.298.000 | |
| 65 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sidikalang | 12 Laporan | 115.386.000 | |
| 66 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Rantau Prapat | 12 Laporan | 116.970.000 | |
| 67 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Balai | 12 Laporan | 120.234.000 | |
| 68 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Gunung Sitoli | 12 Laporan | 125.522.000 | |
| 69 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pematang Siantar | 12 Laporan | 114.370.000 | |
| 70 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Medan II | 12 Laporan | 157.330.000 | |
| 71 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Medan I | 12 Laporan | 133.146.000 | |
| 72 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Painan | 12 Laporan | 110.200.000 | |
| 73 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Lubuk Sikaping | 12 Laporan | 115.180.000 | |
| 74 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Solok | 12 Laporan | 119.900.000 | |
| 75 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sijunjung | 12 Laporan | 116.400.000 | |
| 76 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bukittinggi | 12 Laporan | 170.000.000 | |
| 77 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Padang | 12 Laporan | 193.940.000 | |
| 78 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sekayu | 12 Laporan | 115.462.000 | |
| 79 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Baturaja | 12 Laporan | 124.310.000 | |
| 80 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Lubuklinggau | 12 Laporan | 117.066.000 | |
| 81 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Lahat | 12 Laporan | 131.066.000 | |
| 82 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Palembang | 12 Laporan | 188.342.000 | |
| 83 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Dumai | 12 Laporan | 128.530.000 | |
| 84 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Rengat | 12 Laporan | 121.770.000 | |
| 85 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pekanbaru | 12 Laporan | 193.510.000 | |
| 86 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bangko | 12 Laporan | 113.552.000 | |
| 87 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kuala Tungkal | 12 Laporan | 111.732.000 | |
| 88 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Muara Bungo | 12 Laporan | 114.424.000 | |
| 89 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sungai Penuh | 12 Laporan | 111.152.000 | |
| 90 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jambi | 12 Laporan | 179.004.000 | |
| 91 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Metro | 12 Laporan | 119.900.000 | |
| 92 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Liwa | 12 Laporan | 104.780.000 | |
| 93 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bandar Lampung | 12 Laporan | 202.580.000 | |
| 94 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotabumi | 12 Laporan | 142.660.000 | |
| 95 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pontianak | 12 Laporan | 180.936.000 | |
| 96 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sintang | 12 Laporan | 108.448.000 | |
| 97 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ketapang | 12 Laporan | 123.812.000 | |
| 98 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Singkawang | 12 Laporan | 112.666.000 | |
| 99 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Putussibau | 12 Laporan | 106.780.000 | |
| 100 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sanggau | 12 Laporan | 114.982.000 | |
| 101 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Palangkaraya | 12 Laporan | 176.470.000 | |
| 102 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Buntok | 12 Laporan | 139.770.000 | |
| 103 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pangkalan Bun | 12 Laporan | 111.620.000 | |
| 104 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sampit | 12 Laporan | 122.130.000 | |
| 105 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Amlapura | 12 Laporan | 125.846.000 | |
| 106 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Singaraja | 12 Laporan | 127.350.000 | |
| 107 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Denpasar | 12 Laporan | 193.258.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 108 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sumbawa Besar | 12 Laporan | 123.808.000 | |
| 109 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bima | 12 Laporan | 129.396.000 | |
| 110 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Selong | 12 Laporan | 108.488.000 | |
| 111 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Mataram | 12 Laporan | 179.080.000 | |
| 112 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kupang | 12 Laporan | 187.296.000 | |
| 113 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Larantuka | 12 Laporan | 126.968.000 | |
| 114 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Atambua | 12 Laporan | 116.976.000 | |
| 115 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ruteng | 12 Laporan | 135.596.000 | |
| 116 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Waingapu | 12 Laporan | 120.988.000 | |
| 117 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ende | 12 Laporan | 135.076.000 | |
| 118 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Toli-Toli | 12 Laporan | 121.668.000 | |
| 119 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Poso | 12 Laporan | 120.884.000 | |
| 120 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Luwuk | 12 Laporan | 120.704.000 | |
| 121 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Palu | 12 Laporan | 180.472.000 | |
| 122 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sinjai | 12 Laporan | 108.690.000 | |
| 123 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Makale | 12 Laporan | 115.814.000 | |
| 124 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Benteng | 12 Laporan | 112.026.000 | |
| 125 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Watampone | 12 Laporan | 131.698.000 | |
| 126 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Palopo | 12 Laporan | 136.578.000 | |
| 127 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bantaeng | 12 Laporan | 130.794.000 | |
| 128 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pare-Pare | 12 Laporan | 149.546.000 | |
| 129 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Makassar II | 12 Laporan | 155.706.000 | |
| 130 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Makassar I | 12 Laporan | 159.562.000 | |
| 131 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Raha | 12 Laporan | 112.732.000 | |
| 132 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kolaka | 12 Laporan | 116.388.000 | |
| 133 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bau-Bau | 12 Laporan | 138.308.000 | |
| 134 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kendari | 12 Laporan | 189.528.000 | |
| 135 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jayapura | 12 Laporan | 243.866.000 | |
| 136 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Biak | 12 Laporan | 163.618.000 | |
| 137 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Merauke | 12 Laporan | 190.838.000 | |
| 138 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Nabire | 12 Laporan | 172.986.000 | |
| 139 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Wamena | 12 Laporan | 171.626.000 | |
| 140 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Serui | 12 Laporan | 159.882.000 | |
| 141 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Timika | 12 Laporan | 156.760.000 | |
| 142 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Muko-Muko | 12 Laporan | 108.140.000 | |
| 143 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Curup | 12 Laporan | 124.860.000 | |
| 144 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Manna | 12 Laporan | 125.120.000 | |
| 145 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bengkulu | 12 Laporan | 176.420.000 | |
| 146 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ternate | 12 Laporan | 228.656.000 | |
| 147 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tobelo | 12 Laporan | 133.560.000 | |
| 148 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pangkal Pinang | 12 Laporan | 196.372.000 | |
| 149 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Pandan | 12 Laporan | 113.888.000 | |
| 150 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Fak-Fak | 12 Laporan | 151.730.000 | |
| 151 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sorong | 12 Laporan | 189.770.000 | |
| 152 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Manokwari | 12 Laporan | 187.138.000 | |
| 153 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Mamuju | 12 Laporan | 157.586.000 | |
| 154 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Majene | 12 Laporan | 124.282.000 | |
| 155 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Masohi | 12 Laporan | 133.596.000 | |
| 156 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Saumlaki | 12 Laporan | 125.380.000 | |
| 157 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tual | 12 Laporan | 132.580.000 | |
| 158 | LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Ambon | 12 Laporan | 185.072.000 | |

Alan

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|---------------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 159 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bitung | 12 Laporan | 120.870.000 | |
| | 160 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotamubagu | 12 Laporan | 126.950.000 | |
| | 161 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahuna | 12 Laporan | 125.030.000 | |
| | 162 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Manado | 12 Laporan | 201.150.000 | |
| | 163 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Gorontalo | 12 Laporan | 177.264.000 | |
| | 164 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Marisa | 12 Laporan | 110.262.000 | |
| | 165 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Banjarmasin | 12 Laporan | 203.780.000 | |
| | 166 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Barabai | 12 Laporan | 145.660.000 | |
| | 167 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung | 12 Laporan | 148.040.000 | |
| | 168 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotabaru | 12 Laporan | 112.620.000 | |
| | 169 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pelaihari | 12 Laporan | 101.300.000 | |
| | 170 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Samarinda | 12 Laporan | 197.176.000 | |
| | 171 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Balikpapan | 12 Laporan | 157.248.000 | |
| | 172 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Redep | 12 Laporan | 113.844.000 | |
| | 173 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tarakan | 12 Laporan | 171.428.000 | |
| | 174 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Nunukan | 12 Laporan | 120.284.000 | |
| | 175 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Rangkasbitung | 12 Laporan | 108.446.000 | |
| | 176 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tangerang | 12 Laporan | 146.426.000 | |
| | 177 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Serang | 12 Laporan | 191.534.000 | |
| | 178 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Pinang | 12 Laporan | 154.424.000 | |
| | 179 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Batam | 12 Laporan | 138.704.000 | |
| 015.11 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Layanan Kediklatan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan | | | |
| | 1 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 3 s.d. 5 Hari | 1 Peserta | 2.455.300 | |
| | 2 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 6 s.d. 12 Hari | 1 Peserta | 4.800.066 | |
| | 3 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 13 s.d. 16 Hari | 1 Peserta | 5.761.033 | |
| | 4 Diklat Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Selama 17 s.d. 19 Hari | 1 Peserta | 7.087.700 | |
| | Layanan Kediklatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai | | | |
| | 5 Diklat Fungsional Pemeriksa Dokumen Bea dan Cukai | 1 Layanan | 10.609.166 | |
| | 6 Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai | 1 Layanan | 21.919.566 | |
| | 7 Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai (Di Luar Kantor) | 1 Layanan | 53.379.566 | |
| | 8 Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Kesamaptaan | 1 Layanan | 14.127.200 | |
| | 9 Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Kesamaptaan (Di Luar Kantor) | 1 Layanan | 24.956.366 | |
| | 10 Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Ketrampilan Senjata | 1 Layanan | 3.471.600 | |
| | 11 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Post Clearance Audit | 1 Layanan | 19.198.533 | |
| | 12 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Penindakan Kepabeanan dan Cukai | 1 Layanan | 19.387.166 | |
| | 13 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 24 s.d. 28 Hari | 1 Layanan | 10.438.800 | |
| | 14 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 20 s.d. 23 Hari | 1 Layanan | 8.484.066 | |
| | 15 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 16 s.d. 19 Hari | 1 Layanan | 6.849.800 | |
| | 16 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 13 s.d. 15 Hari (Dengan Praktek Kerja Lapangan) | 1 Layanan | 6.511.100 | |
| | 17 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bidang Bea dan Cukai Selama 13 s.d. 15 Hari (Tanpa Praktek Kerja Lapangan) | 1 Layanan | 5.158.433 | |
| | 18 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi/Diklat Teknis Umum Bidang Bea dan Cukai Selama 9 s.d. 12 Hari | 1 Layanan | 4.627.333 | |
| | 19 Workshop Bidang Bea dan Cukai (Di Luar Kantor) | 1 Layanan | 8.773.966 | |

ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Workshop Bidang Bea dan Cukai (Dengan Praktek Kerja Lapangan) | 1 Layanan | 2.625.100 | |
| 21 | Workshop Bidang Bea dan Cukai (Tanpa Praktek Kerja Lapangan) | 1 Layanan | 3.104.233 | |
| Layanan Kediklatan di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan | | | | |
| 22 | Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 3 s.d. 5 Hari (Tidak Diasramakan) | 1 Layanan | 1.661.733 | |
| 23 | Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 3 s.d. 5 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 2.353.566 | |
| 24 | Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 3 s.d. 5 Hari (Di Luar Kantor) | 1 Layanan | 3.296.900 | |
| 25 | Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 6 s.d. 10 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 3.487.733 | |
| 26 | Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 11 s.d. 20 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 6.445.700 | |
| 27 | Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 21 s.d. 25 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 9.025.600 | |
| 28 | Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 26 s.d. 29 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 12.117.466 | |
| 29 | Diklat Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Selama 31 s.d. 35 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 13.237.466 | |
| Layanan Kediklatan di Bidang Keuangan Umum | | | | |
| 30 | Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 3 s.d. 5 Hari | 1 Layanan | 2.468.066 | |
| 31 | Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 6 s.d. 10 Hari | 1 Layanan | 3.606.466 | |
| 32 | Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 11 s.d. 15 Hari | 1 Layanan | 5.243.100 | |
| 33 | Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 16 s.d. 20 Hari | 1 Layanan | 6.948.066 | |
| 34 | Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 3 s.d. 5 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 5.946.166 | |
| 35 | Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 6 s.d. 10 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 9.114.966 | |
| 36 | Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 11 s.d. 15 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 14.135.600 | |
| Layanan Kediklatan di Bidang Perpajakan | | | | |
| 37 | Diklat Bidang Perpajakan Selama 3 s.d. 5 Hari (Tidak Diasramakan) | 1 Layanan | 1.758.900 | |
| 38 | Diklat Bidang Perpajakan Selama 3 s.d. 5 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 2.569.233 | |
| 39 | Diklat Bidang Perpajakan Selama 3 s.d. 5 Hari (Di Luar Kantor) | 1 Layanan | 6.055.233 | |
| 40 | Diklat Bidang Perpajakan Selama 10 s.d. 12 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 4.766.666 | |
| 41 | Diklat Bidang Perpajakan Selama 10 s.d. 12 Hari Asrama Eksternal (Di Luar Kantor) | 1 Layanan | 11.430.900 | |
| 42 | Diklat Bidang Perpajakan Selama 15 s.d. 19 Hari (Diasramakan) | 1 Layanan | 7.294.133 | |
| 43 | Diklat Bidang Perpajakan Selama 15 s.d. 19 Hari (Di Luar Kantor) | 1 Layanan | 17.862.600 | |
| 44 | Diklat Bidang Perpajakan Orientasi | 1 Layanan | 6.475.566 | |
| 45 | Diklat Teknis Substantif Dasar Bidang Perpajakan Selama 22 Hari | 1 Layanan | 5.648.233 | |
| 46 | Diklat Teknis Substantif Dasar Bidang Perpajakan Selama 32 Hari | 1 Layanan | 7.509.733 | |
| Layanan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pasca Sarjana | | | | |
| 47 | Diklat Ujian Dinas | 1 Layanan | 2.568.300 | |
| 48 | Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) | 1 Layanan | 473.190 | |
| 49 | Diklat Bidang Pengembangan SDM <i>Capacity Building/In House Training</i> | 1 Layanan | 984.166 | |
| 50 | Diklat Bidang Pengembangan SDM Selama 3 s.d. 5 Hari | 1 Layanan | 3.677.333 | |
| 51 | Diklat Bidang Pengembangan SDM Persiapan Ke Luar Negeri | 1 Layanan | 57.937.800 | |
| Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan | | | | |
| 52 | Program Pendidikan Diploma I Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | 1 Layanan | 12.021.829 | |
| 53 | Program Pendidikan Diploma III Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | 1 Layanan | 13.611.426 | |
| 54 | Program Pendidikan Diploma IV Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | 1 Layanan | 14.381.291 | |

L DW

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Penelitian dan Pengembangan | | | |
| | 55 Kajian Akademis Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan | 1 Layanan | 183.510.000 | |
| | 56 Jurnal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan | 1 Layanan | 114.220.000 | |

↳ ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 018.01 | Sekretariat Jenderal | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Tersedianya Dokumen Anggaran dan Pelayanan Ketatausahaan Biro | | | |
| | 1 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2018 | 1 Dokumen | 836.039.000 | |
| | Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kinerja | | | |
| | 2 Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian | 1 Laporan | 155.550.000 | |
| | 3 Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian | 1 Laporan | 140.750.000 | |
| | Tersedianya Dukungan Kegiatan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian | | | |
| | 4 Publikasi Statistik Pertanian | 1 Dokumen | 174.616.000 | |
| 018.02 | Inspektorat Jenderal | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian | 170 Rekomendasi | 4.611.036.000 | |
| | 2 Rekomendasi Pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian | 7 Rekomendasi | 1.438.572.000 | |
| | 3 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta SAKIP Kementerian | 14 Rekomendasi | 541.952.000 | |
| | 4 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Laporan Keuangan Kementerian | 5 Rekomendasi | 742.114.000 | |
| | 5 Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | 126 Rekomendasi | 4.623.652.000 | |
| | 6 Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | 88 Rekomendasi | 1.438.572.000 | |
| | 7 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | 2 Rekomendasi | 415.832.000 | |
| | 8 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | 12 Rekomendasi | 457.752.000 | |
| | 9 Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan | 178 Rekomendasi | 4.631.076.000 | |
| | 10 Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan | 50 Rekomendasi | 1.438.572.000 | |
| | 11 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan | 3 Rekomendasi | 427.472.000 | |
| | 12 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan | 18 Rekomendasi | 447.094.000 | |
| | 13 Rekomendasi hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian | 150 Rekomendasi | 4.616.076.000 | |
| | 14 Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian | 36 Rekomendasi | 1.438.572.000 | |
| | 15 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian | 5 Rekomendasi | 412.472.000 | |
| | 16 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian | 10 Rekomendasi | 432.094.000 | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu | | | |
| | 17 Audit Tujuan Tertentu | 25 Rekomendasi | 1.453.264.000 | |
| | 18 Audit Investigasi | 211 Rekomendasi | 1.344.660.000 | |

Abm

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 018.03 | Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI | | | |
| | 1 Penerapan Penanganan DPI (Biopori) | 1 Hektar | 3.972.500 | |
| | 2 Penerapan Penanganan DPI (Biopori) Wilayah Khusus (NTT,Papua,Papua Barat,Maluku,Maluku Utara) | 1 Hektar | 4.432.500 | |
| | 3 Penerapan Penanganan DPI (Sumur Pantek) | 1 Hektar | 5.030.000 | |
| | 4 Penerapan Penanganan DPI (Sumur Pantek) Wilayah Khusus (NTT,Papua,Papua Barat,Maluku,Maluku Utara) | 1 Hektar | 6.270.000 | |
| 018.04 | Direktorat Jenderal Holtikultura | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 GAP Cabai | 1 Kelompok | 32.670.000 | |
| | 2 GAP Bawang Merah | 1 Kelompok | 32.670.000 | |
| | 3 GAP Sayuran dan Tanaman Obat | 1 Kelompok | 32.670.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | PHT | | | |
| | 4 PHT Wilayah Barat | 1 Kelompok | 40.516.000 | |
| | 5 PHT Wilayah Timur | 1 Kelompok | 46.767.000 | |
| | GAP Buah dan Florikultura | | | |
| | 6 GAP Buah | 1 Kelompok | 35.820.000 | |
| | 7 GAP Florikultura | 1 Kelompok | 38.000.000 | |
| | GHP Holtikultura | | | |
| | 8 GHP Buah | 1 Kelompok | 35.982.000 | |
| | 9 GHP Florikultura | 1 Kelompok | 26.417.000 | |
| | 10 GHP Sayuran | 1 Kelompok | 21.157.000 | |
| | 11 GHP Tanaman Obat | 1 Kelompok | 21.157.000 | |
| 018.05 | Direktorat Jenderal Perkebunan | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | SL-PHT Perkebunan | | | |
| | 1 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Barat | 1 KT | 100.300.000 | |
| | 2 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Tengah | 1 KT | 103.210.000 | |
| | 3 SL-PHT Perkebunan Provinsi D.I Yogyakarta | 1 KT | 102.010.000 | |
| | 4 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Timur | 1 KT | 100.900.000 | |
| | 5 SL-PHT Perkebunan Provinsi Aceh | 1 KT | 112.730.000 | |
| | 6 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Utara | 1 KT | 109.030.000 | |
| | 7 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Barat | 1 KT | 109.030.000 | |
| | 8 SL-PHT Perkebunan Provinsi Riau | 1 KT | 110.630.000 | |
| | 9 SL-PHT Perkebunan Provinsi Jambi | 1 KT | 103.920.000 | |
| | 10 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan | 1 KT | 106.620.000 | |
| | 11 SL-PHT Perkebunan Provinsi Lampung | 1 KT | 105.520.000 | |
| | 12 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat | 1 KT | 106.410.000 | |
| | 13 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah | 1 KT | 124.520.000 | |
| | 14 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | 1 KT | 105.210.000 | |
| | 15 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur | 1 KT | 114.720.000 | |
| | 16 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara | 1 KT | 110.830.000 | |
| | 17 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah | 1 KT | 113.030.000 | |
| | 18 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan | 1 KT | 115.030.000 | |
| | 19 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 KT | 109.030.000 | |
| | 20 SL-PHT Perkebunan Provinsi Maluku | 1 KT | 135.150.000 | |
| | 21 SL-PHT Perkebunan Provinsi Bali | 1 KT | 93.790.000 | |
| | 22 SL-PHT Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 KT | 100.170.000 | |
| | 23 SL-PHT Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 KT | 118.530.000 | |
| | 24 SL-PHT Perkebunan Provinsi Papua | 1 KT | 163.500.000 | |
| | 25 SL-PHT Perkebunan Provinsi Bengkulu | 1 KT | 104.070.000 | |
| | 26 SL-PHT Perkebunan Provinsi Maluku Utara | 1 KT | 141.060.000 | |
| | 27 SL-PHT Perkebunan Provinsi Banten | 1 KT | 99.700.000 | |
| | 28 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 KT | 111.830.000 | |
| | 29 SL-PHT Perkebunan Provinsi Gorontalo | 1 KT | 106.920.000 | |
| | 30 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kepulauan Riau | 1 KT | 113.530.000 | |
| | 31 SL-PHT Perkebunan Provinsi Papua Barat | 1 KT | 158.080.000 | |
| | 32 SL-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat | 1 KT | 111.030.000 | |
| | 33 SL-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Utara | 1 KT | 111.920.000 | |
| 018.06 | Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Pengembangan Kualitas SDM Bidang Pakan | | | |
| | 1 Bimtek Manajemen dan Teknologi Pakan di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi | 30 Orang | 57.247.000 | |
| | 2 Bimtek Manajemen dan Teknologi Pakan di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat | 30 Orang | 66.412.000 | |

h Agw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|---------------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB dan ATR | | | |
| | 3 Peningkatan Kapasitas Petugas IB | 1 Orang | 15.337.400 | |
| | 4 Peningkatan Kapasitas Petugas PKB/ATR | 1 Orang | 14.386.900 | |
| 018.08 | Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Mendukung Desa Organik | | | |
| | 1 Unit Pengolah Pupuk Organik Mendukung Desa Organik Wilayah Barat | 1 Unit | 311.500.000 | |
| | 2 Unit Pengolah Pupuk Organik Mendukung Desa Organik Wilayah Tengah | 1 Unit | 306.000.000 | |
| | 3 Unit Pengolah Pupuk Organik Mendukung Desa Organik Wilayah Timur | 1 Unit | 327.000.000 | |
| 018.09 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Rumusan Kebijakan Pengembangan Mektan | | | |
| | 1 Bahan Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi | 244.700.000 | |
| | Mikroba veteriner terkonservasi dan terkarakterisasi | | | |
| | 2 Mikroba veteriner terkonservasi dan terkarakterisasi | 100 Jenis | 213.967.000 | |
| | Bibit Sumber Ternak Unggulan | | | |
| | 3 Bibit Unggul Ternak Ayan KUB-1 | 48500 Ekor | 227.322.000 | |
| | 4 Bibit Unggul Ternak Itik Petelur | 50990 Ekor | 330.080.000 | |
| | 5 Bibit Unggul Ternak Domba Compass Agrinak | 137 Ekor | 213.125.000 | |
| | Publikasi yang Diterbitkan | | | |
| | 6 Penerbitan Publikasi Hasil Litbang Pertanian Berbahasa | 2 Judul | 275.530.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Komponen Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian) | | | |
| | 7 Penyusunan Satuan Biaya Penelitian Rumah Kaca | 1 Teknologi | 65.000.000 | |
| | Benih Sumber Kentang | | | |
| | 8 Benih Sumber Kentang | 1 GO | 3.458 | |
| | Benih Sumber Bawang Merah | | | |
| | 9 Benih Sumber Bawang Merah | 1 Ton | 23.150.000 | |
| | VUB Bibit tebu | | | |
| | 10 Bibit tebu G2 | 1 Budset | 321 | |
| | Benih sumber tanaman padi | | | |
| | 11 Produksi Benih Penjenis (BS) Padi | 1 Ton | 31.120.000 | |
| | 12 Produksi Benih Dasar (FS) Padi | 1 Ton | 20.850.000 | |
| | 13 Produksi Benih Sebar (SS) Padi (per ton) | 1 Ton | 14.854.000 | |
| | Benih sumber tanaman jagung | | | |
| | 14 Produksi Benih Penjenis Jagung (BS) | 1 Ton | 43.175.000 | |
| | 15 Produksi Benih Dasar Jagung (FS) | 1 Ton | 36.215.000 | |
| | 16 Produksi Benih Pokok Jagung (SS) | 1 Ton | 31.600.000 | |
| | Benih sumber tanaman kedelai | | | |
| | 17 Produksi Benih Penjenis Kedelai (BS) | 1 Ton | 27.017.000 | |
| | 18 Produksi Benih Dasar Kedelai (FS) | 1 Ton | 22.983.000 | |
| | 19 Produksi Benih Pokok Kedelai (SS) | 1 Ton | 17.464.000 | |
| | Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan | | | |
| | 20 Kerjasama Hasil Inovasi Balitbangtan | 1 Lisensi | 85.000.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 21 Rumusan alternatif kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian | 1 Rekomendasi | 103.588.000 | |
| 018.10 | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Pertanian | | | |
| | 1 Diklat Teknis Agribisnis Sapi Potong Wilayah Barat | 1 Orang | 5.109.333 | |
| | 2 Diklat Teknis Pemeriksaan Kesehatan Daging (Keurmaster) Bagi Petugas, Wilayah Barat | 1 Orang | 5.789.166 | |
| | 3 Diklat Teknis Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) pada Sapi Bagi Petugas, Wilayah Barat | 1 Orang | 9.162.766 | |
| | 4 Diklat Teknis Kesehatan Hewan Bagi Petugas, di Wilayah Barat | 1 Orang | 5.275.000 | |

AGN

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Diklat Teknis Pengolahan Limbah Ternak, Wilayah Barat. | 1 Orang | 5.640.833 | |
| 6 | Diklat Inseminasi Buatan Wilayah Barat. | 1 Orang | 12.508.500 | |
| 7 | Diklat Agribisnis Sapi Perah Wilayah Barat. | 1 Orang | 5.521.166 | |
| 8 | Diklat Pakan Ternak Wilayah Barat | 1 Orang | 5.640.833 | |
| 9 | Diklat Sapi Potong Wilayah Barat. | 1 Orang | 5.627.166 | |
| 10 | Diklat Pasca Panen dan Pengolahan Daging Wilayah Barat. | 1 Orang | 5.521.166 | |
| 11 | Diklat Pasca Panen dan Pengolahan Susu Wilayah Barat. | 1 Orang | 5.487.833 | |
| 12 | Diklat Butcher Wilayah Barat. | 1 Orang | 6.593.833 | |
| 13 | Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Pangan Wilayah Tengah. | 1 Orang | 6.473.000 | |
| 14 | Diklat Teknis Perlindungan Tanaman Perkebunan Wilayah Tengah. | 1 Orang | 6.473.000 | |
| 15 | Diklat Teknis Budidaya Kakao Wilayah Tengah | 1 Orang | 6.489.666 | |
| 16 | Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit Wilayah Tengah | 1 Orang | 6.489.666 | |
| 17 | Diklat Penanganan Pasca Panen Jagung Wilayah Tengah | 1 Orang | 6.456.333 | |
| 18 | Diklat Teknis Tata Guna Air (TGA) Wilayah Tengah | 1 Orang | 7.097.000 | |
| 19 | Diklat Penanganan Pasca Panen Kakao Wilayah Timur | 1 Orang | 6.258.333 | |
| 20 | Diklat Teknologi Budidaya Kakao Wilayah Timur | 1 Orang | 6.293.666 | |
| 21 | Diklat Teknologi Budidaya Melon Wilayah Timur | 1 Orang | 6.293.666 | |
| 22 | Diklat Pengolahan Limbah Pertanian dan Pupuk Organik Wilayah Timur | 1 Orang | 6.293.666 | |
| 23 | Diklat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Wilayah Timur | 1 Orang | 7.054.666 | |
| 24 | Diklat Penanganan Alat Mekanisasi Pertanian Wilayah Timur | 1 Orang | 7.057.000 | |
| 25 | Diklat Operator Mesin Pertanian Wilayah Timur | 1 Orang | 6.293.666 | |
| 26 | Diklat Bongkar Pasang Mesin Pertanian Wilayah Timur | 1 Orang | 6.293.666 | |
| 27 | Diklat Teknis Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Wilayah Timur | 1 Orang | 8.688.666 | |
| 28 | Diklat Teknis Pemeriksaan Kebuntingan Wilayah Timur | 1 Orang | 8.722.000 | |
| 29 | Diklat Agribisnis Sapi Potong Wilayah Timur | 1 Orang | 8.341.000 | |
| 30 | Diklat Pengolahan Hasil Ternak Wilayah Timur | 1 Orang | 6.990.000 | |
| 31 | Diklat Manajemen Hijauan Pakan Ternak Wilayah Timur | 1 Orang | 6.970.000 | |
| 32 | Diklat Perawatan Induk dan Pedet Wilayah Timur | 1 Orang | 6.970.000 | |
| 33 | Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak Wilayah Timur | 1 Orang | 6.960.000 | |
| 34 | Diklat Agribisnis Ternak Kambing Wilayah Timur | 1 Orang | 6.957.500 | |
| 35 | Diklat Teknis Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Wilayah Timur | 1 Orang | 6.867.666 | |
| 36 | Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Pangan Wilayah Barat | 1 Orang | 5.087.933 | |
| 37 | Diklat Teknis Terakreditasi Karet Wilayah Barat | 1 Orang | 5.107.133 | |
| 38 | Diklat Teknis Terakreditasi Kelapa Sawit Wilayah Barat | 1 Orang | 5.352.800 | |
| 39 | Diklat Teknis Terakreditasi Pasca Panen Kakao Wilayah Barat | 1 Orang | 5.112.966 | |
| 40 | Diklat Teknis Terakreditasi Budidaya Jamur Tiram Wilayah Barat | 1 Orang | 5.096.133 | |
| 41 | Diklat Teknis Terakreditasi Budidaya Buah Naga Wilayah Barat | 1 Orang | 5.099.633 | |
| 42 | Diklat Teknis Terakreditasi Budidaya Durian Wilayah Barat | 1 Orang | 5.112.966 | |
| 43 | Diklat Teknis Agribisnis Tebu Wilayah Barat | 1 Orang | 5.197.000 | |
| 44 | Diklat Teknis Agribisnis Sayuran Organik Wilayah Barat | 1 Orang | 5.197.000 | |
| 45 | Diklat Teknis Agribisnis Pisang Wilayah Barat | 1 Orang | 5.197.000 | |
| 46 | Diklat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Wilayah Timur | 1 Orang | 3.615.000 | |
| 47 | Diklat Budidaya Sayuran Bagi Petugas Wilayah Timur | 1 Orang | 3.615.000 | |
| 48 | Diklat Diversifikasi Pangan dan Gizi Bagi Petugas Wilayah Timur | 1 Orang | 3.785.000 | |
| 49 | Diklat Media Tercetak Bagi Penyuluh Wilayah Barat | 1 Orang | 5.799.333 | |
| 50 | Diklat Alat Bantu Presentasi Wilayah Barat | 1 Orang | 5.799.333 | |
| 51 | Diklat Pembuatan Display Pameran Wilayah Barat | 1 Orang | 5.799.333 | |
| 52 | Diklat Audio Visual Bagi Penyuluh Pertanian Wilayah Barat | 1 Orang | 5.799.333 | |
| 53 | Diklat Pembuatan Website Bagi Petugas Wilayah Barat | 1 Orang | 6.324.333 | |
| 54 | Diklat Penulisan Ilmiah Populer Wilayah Barat | 1 Orang | 5.799.333 | |
| 55 | Diklat Teknis Perencanaan Bagi Petugas Wilayah Barat | 1 Orang | 6.324.333 | |
| 56 | Diklat Keprotokoleran Bagi Petugas Wilayah Barat | 1 Orang | 5.919.333 | |
| 57 | Diklat Dasar Fungsional Pengawas Bibit Ternak Terampil Wilayah Barat | 1 Orang | 7.094.833 | |
| 58 | Diklat Alih Kelompok Bagi Fungsional Pengawas Bibit Ternak Wilayah Barat | 1 Orang | 6.954.833 | |

h
ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|---------------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 59 Diklat Dasar Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ternak Terampil Wilayah Barat | 1 Orang | 7.246.033 | |
| | 60 Diklat Alih Kelompok Bagi Pengawas Mutu Pakan Ternak Wilayah Barat | 1 Orang | 6.954.833 | |
| | 61 Diklat Dasar PMHP Ahli Wilayah Barat | 1 Orang | 12.217.666 | |
| | 62 Diklat Dasar POPT Terampil Wilayah Barat | 1 Orang | 11.127.666 | |
| | 63 Diklat Dasar IPP Terampil Wilayah Barat | 1 Orang | 11.394.333 | |
| | 64 Diklat Dasar POPT Ahli Wilayah Barat | 1 Orang | 12.901.000 | |
| | 65 Diklat Alih Kelompok Bagi PBT Wilayah Barat | 1 Orang | 9.743.666 | |
| | 66 Diklat Alih Kelompok Bagi PP Wilayah Barat | 1 Orang | 9.303.666 | |
| | 67 Diklat Dasar PBT Terampil Wilayah Barat | 1 Orang | 9.743.666 | |
| | 68 Diklat Pengawas Mutu Pakan Ahli Wilayah Barat | 1 Orang | 8.276.666 | |
| | 69 Diklat Pengawas Bibit Ternak Ahli Wilayah Barat | 1 Orang | 8.208.500 | |
| | 70 Diklat Fungsional Paramedik Veteriner Wilayah Barat | 1 Orang | 8.008.500 | |
| | 71 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Terampil Wilayah Tengah | 1 Orang | 10.516.333 | |
| | 72 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli Wilayah Tengah | 1 Orang | 10.516.333 | |
| | 73 Diklat Dasar Alih Kelompok Penyuluh Pertanian Wilayah Tengah | 1 Orang | 8.749.666 | |
| | 74 Diklat Dasar Terampil Pengawas Bibit Ternak Wilayah Tengah | 1 Orang | 9.067.000 | |
| | 75 Diklat Dasar Terampil Pengawas Mutu Pakan Wilayah Timur | 1 Orang | 8.733.000 | |
| | 76 Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Terampil Wilayah Timur | 1 Orang | 10.804.000 | |
| | 77 Diklat ATC Bagi Pelajar Wilayah Timur | 1 Orang | 5.167.666 | |
| | 78 Diklat Teknis Tematik di BP3K Wilayah Barat | 1 Orang | 3.160.000 | |
| | 79 Diklat Teknis Tematik di BP3K Wilayah Tengah | 1 Orang | 3.163.333 | |
| | 80 Diklat Teknis Tematik di BP3K Wilayah Timur | 1 Orang | 3.395.000 | |
| | 81 Diklat Teknis Tematik di BP3K Wilayah Kepulauan | 1 Orang | 4.298.333 | |
| | Aparatur dan Non Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan Pertanian | | | |
| | 82 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Medan | 1 Orang | 36.254.025 | |
| | 83 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Perkebunan di STPP Medan | 1 Orang | 36.404.025 | |
| | 84 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Bogor | 1 Orang | 36.682.125 | |
| | 85 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Bogor | 1 Orang | 37.080.625 | |
| | 86 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Magelang | 1 Orang | 38.016.400 | |
| | 87 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Magelang | 1 Orang | 39.205.825 | |
| | 88 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Malang | 1 Orang | 38.971.050 | |
| | 89 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Malang | 1 Orang | 39.471.050 | |
| | 90 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Gowa | 1 Orang | 43.261.450 | |
| | 91 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Gowa | 1 Orang | 43.561.450 | |
| | 92 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Manokwari | 1 Orang | 54.535.550 | |
| | 93 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Manowari | 1 Orang | 54.835.550 | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani | | | |
| | 94 Pembinaan Kelompok Tani oleh Penyuluh di Lokasi Sentra Pangan | 1 Unit | 7.500.000 | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | | | |
| | 95 Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di BP3K Wilayah Barat | 1 Unit | 61.200.000 | |
| | 96 Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di BP3K Wilayah Tengah | 1 Unit | 75.975.000 | |
| | 97 Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di BP3K Wilayah Timur | 1 Unit | 90.250.000 | |
| 018.11 | Badan Ketahanan Pangan | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | | | |
| | 1 Penanganan SKPG | 1 Lokasi | 50.000.000 | |

L
Aon

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|---------------|---|-------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penyusunan Rencana Program, Anggaran dan Kerja sama | | | |
| 2 | Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Barat | 1 Dokumen | 581.110.000 | |
| 3 | Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Wilayah Timur | 1 Dokumen | 692.490.000 | |
| 4 | Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi | 1 Dokumen | 459.430.000 | |
| 5 | Workshop Perencanaan Ketahanan Pangan (Pagu Anggaran) | 1 Dokumen | 482.245.000 | |
| 6 | Workshop Perencanaan Ketahanan Pangan (Pagu Alokasi Anggaran) | 1 Dokumen | 412.485.000 | |
| | Perumusan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan | | | |
| 7 | Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Tengah | 1 Rekomendasi Kebijakan | 852.045.000 | |
| 8 | Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Timur | 1 Rekomendasi Kebijakan | 720.177.000 | |
| 9 | Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Barat | 1 Rekomendasi Kebijakan | 697.634.000 | |
| 018.12 | Badan Karantina Pertanian | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | SDM Aparatur Sipil Negara Karantina Pertanian yang Kompeten dan Profesional | | | |
| 1 | Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Ahli | 1 Kegiatan | 2.543.492.000 | |
| 2 | Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Medik Veteriner | 1 Kegiatan | 2.543.492.000 | |
| 3 | Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Terampil | 1 Kegiatan | 2.821.894.000 | |
| 4 | Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Paramedik Veteriner | 1 Kegiatan | 2.821.894.000 | |
| | Pengembangan Teknik dan Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati | | | |
| 5 | Uji Terap Teknik dan Metode KP | 1 Dokumen | 120.932.000 | |
| | Pengembangan Teknik dan Metoda Pengujian Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati | | | |
| 6 | Pengembangan Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium | 1 Dokumen | 118.335.000 | |
| 7 | Validasi Metode Pengujian Laboratorium | 1 Dokumen | 110.085.000 | |
| 8 | Koleksi Standar HPH/HPIHK | 1 Dokumen | 25.500.000 | |
| 9 | Koleksi Standar OPT/OPTK | 1 Dokumen | 25.500.000 | |

6
Aan

Kementerian Negara/Lembaga: Perindustrian (019)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 019.01 | Sekretariat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 1 Penyelenggaraan Diklat Operator Mesin Industri Garmen Sistem 3 in 1 selama 20 Hari 2 Penyelenggaraan Diklat Operator Sektor Alas Kaki Sistem 3 in 1 selama 20 Hari | 1 Orang 1 Orang | 6.500.000 6.500.000 | |

6 An

Kementerian Negara/Lembaga: Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020.12 | Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Jumlah NSPK Diklat Yang Ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat ESDM | | | |
| 1 | Penyusunan, Pembakuan dan Penyempurnaan Materi Uji Kompetensi (MUK) | 40 Dokumen | 317.402.000 | |
| 2 | Penyusunan, Pembakuan dan Penyempurnaan Standar Operasi Prosedur (SOP) | 20 Dokumen | 139.522.000 | |
| 3 | Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi | 20 Dokumen | 274.485.000 | |
| 4 | Penyusunan dan Penyempurnaan Bahan Ajar dan Kurikulum Diklat Bidang Migas | 20 Dokumen | 513.682.000 | |
| 5 | Penyusunan Modul Diklat Aparatur Bidang Migas | 20 Dokumen | 350.454.000 | |
| 6 | Penyusunan Modul Diklat Industri Bidang Migas | 30 Dokumen | 441.947.000 | |
| | Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi | | | |
| 7 | Diklat Teknis Bidang Minerba Durasi 5 Hari di Bandung | 1 Diklat | 96.200.000 | |
| 8 | Diklat Fungsional Inspektur Tambang Pertama di Bandung | 1 Diklat | 1.349.140.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi | | | |
| 9 | Iptek Bagi Masyarakat | 1 Laporan | 63.161.000 | |
| 10 | Iptek Bagi Kewirausahaan | 1 Laporan | 90.833.000 | |
| | Lulusan Mahasiswa STEM Akamigas | | | |
| 11 | Lulusan Mahasiswa STEM Akamigas | 1 Orang | 75.408.431 | |
| | Penelitian Yang Dilaksanakan | | | |
| 12 | Penelitian Dosen Pemula | 1 Judul | 14.964.000 | |
| 13 | Penelitian Fundamental | 1 Judul | 73.949.000 | |
| 14 | Penelitian Unggulan | 1 Judul | 104.245.000 | |
| | Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Dalam Satu Tahun | | | |
| 15 | Diklat Teknis 48 JP Koridor Kantor Pusdiklat KEBTKE | 1 Diklat | 119.882.000 | |
| 16 | Diklat Teknis 96 JP Koridor Kantor Pusdiklat KEBTKE | 1 Diklat | 193.866.000 | |

4 Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Perhubungan (022)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 022.11 | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Laporan Hasil Kajian Kelompok | | | |
| | 1 Studi Sedang Transportasi Antarmoda | 1 Laporan | 565.591.000 | Dilaksanakan 6 Bulan Kalender |
| | Laporan Hasil Kajian Perorangan | | | |
| | 2 Studi Kecil Transportasi Antarmoda | 1 Laporan | 80.000.000 | Dilaksanakan 3 Bulan Kalender |
| | Laporan Hasil Penelitian Swakelola | | | |
| | 3 Studi Besar Transportasi Antarmoda | 1 Laporan | 999.441.000 | Dilaksanakan 10 Bulan Kalender |
| | Laporan Hasil Kajian Kelompok | | | |
| | 4 Studi Sedang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 1 Laporan | 565.591.000 | Dilaksanakan 6 Bulan Kalender |
| | Laporan Hasil Kajian Perorangan | | | |
| | 5 Studi Kecil Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 1 Laporan | 80.000.000 | Dilaksanakan 3 Bulan Kalender |
| | Laporan Hasil Penelitian Swakelola | | | |
| | 6 Studi Besar Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 1 Laporan | 999.441.000 | Dilaksanakan 10 Bulan Kalender |
| | Laporan Hasil Kajian Kelompok | | | |
| | 7 Studi Sedang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan | 1 Laporan | 565.591.000 | Dilaksanakan 6 Bulan Kalender |
| | Laporan Hasil Kajian Perorangan | | | |
| | 8 Studi Kecil Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan | 1 Laporan | 80.000.000 | Dilaksanakan 3 Bulan Kalender |
| | Laporan Hasil Penelitian Swakelola | | | |
| | 9 Studi Besar Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan | 1 Laporan | 999.441.000 | Dilaksanakan 10 Bulan Kalender |
| | Laporan Kajian Kelompok | | | |
| | 10 Studi Sedang Transportasi Udara | 1 Laporan | 565.591.000 | Dilaksanakan 6 Bulan Kalender |
| | Laporan Kajian Perorangan | | | |
| | 11 Studi Kecil Transportasi Udara | 1 Laporan | 80.000.000 | Dilaksanakan 3 Bulan Kalender |
| | Laporan Penelitian Swakelola | | | |
| | 12 Studi Besar Transportasi Udara | 1 Laporan | 999.441.000 | Dilaksanakan 10 Bulan Kalender |
| 022.12 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Lulusan Diklat Teknis | | | |
| | 1 Diklat Calon Purna Bhakti PNS Kementerian Perhubungan - Jawa Barat | 30 Orang | 258.968.000 | 1 Angkatan 10 Hari |
| | 2 Diklat Teknis Transportasi Tingkat IV - Jawa Barat | 30 Orang | 261.614.000 | 1 Angkatan 12 Hari |
| | 3 Diklat Teknis Transportasi Tingkat III - Jawa Barat | 30 Orang | 267.216.000 | 1 Angkatan 12 Hari |
| | 4 Diklat Budaya Keselamatan Transportasi - Jawa Barat | 30 Orang | 263.466.000 | 1 Angkatan 12 Hari |
| | 5 Diklat Evakuasi Keadaan Darurat - Jawa Barat | 30 Orang | 299.036.000 | 1 Angkatan 10 Hari |
| | 6 Diklat Manajemen Alam Terbuka SDM - Jawa Barat | 30 Orang | 33.108.000 | 1 Angkatan 1 Hari |
| | 7 Diklat Manajemen Alam Terbuka SDM Transportasi Tingkat Manajerial - Jawa Barat | 30 Orang | 231.794.000 | 1 Angkatan 3 Hari |
| | 8 Diklat Manajemen Alam Terbuka SDM Transportasi Tingkat Pelaksana - Jawa Barat | 30 Orang | 310.188.000 | 1 Angkatan 6 Hari |
| | 9 Diklat Masa Dasar Pembentukan Karakter Taruna Tingkat SLTP BPSIDM - Jawa Barat | 30 Orang | 307.450.000 | 1 Angkatan 15 Hari |

Abw

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 025.02 | Inspektorat Jenderal | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Audit Inspektorat Investigasi | | | |
| | 1 Audit Investigasi Wilayah DKI Jakarta | 1 Laporan | 1.461.660.000 | |
| | 2 Audit Investigasi Wilayah Luar DKI Jakarta (dalam pulau jawa) | 1 Laporan | 5.486.496.000 | |
| | 3 Audit Investigasi Wilayah Luar DKI Jakarta (luar pulau jawa) | 1 Laporan | 5.984.406.000 | |
| 025.11 | Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang disusun pada Keluaran (Out put) | | | |
| | 1 Dokumen Pentashihan Mushaf Al-Our'an | 3 Dokumen | 2.536.151.000 | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Laporan Penelitian Kehidupan Keagamaan | | | |
| | 2 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan kehidupan Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 761.794.000 | |
| | 3 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Kehidupan Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 722.038.000 | |
| | 4 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Kehidupan Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 374.866.000 | |
| | 5 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Kehidupan Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 634.201.000 | |
| | 6 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Kehidupan Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 634.201.000 | |
| | 7 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Kehidupan Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 230.968.000 | |
| | Laporan Penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan | | | |
| | 8 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Lektur dan Khazanah Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 761.794.000 | |
| | 9 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Lektur dan Khazanah Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 722.038.000 | |
| | 10 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Lektur dan Khazanah Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 374.866.000 | |
| | 11 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Lektur dan Khazanah Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 634.201.000 | |
| | 12 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Lektur dan Khazanah Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 634.201.000 | |
| | 13 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Lektur dan Khazanah Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 230.968.000 | |
| | Laporan Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan | | | |
| | 14 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 761.794.000 | |
| | 15 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 722.038.000 | |
| | 16 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Pendidikan Agama dan Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 374.866.000 | |
| | 17 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 634.201.000 | |
| | 18 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 634.201.000 | |
| | 19 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Pendidikan Agama dan Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 230.968.000 | |
| | 20 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kualitatif | 1 Laporan | 1.176.615.000 | |
| | 21 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kuantitatif | 1 Laporan | 1.266.780.000 | |
| | 22 Laporan Penelitian Evaluasi Bahan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kualitatif | 1 Laporan | 1.176.615.000 | |
| | 23 Laporan Penelitian Evaluasi Bahan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kuantitatif | 1 Laporan | 1.266.780.000 | |
| | 24 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Pendidikan Agama dan Keagamaan | 1 Laporan | 1.787.241.000 | |
| | Laporan Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan | | | |
| | 25 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 761.794.000 | |
| | 26 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 722.038.000 | |
| | 27 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (BLA Jakarta) | 1 Laporan | 374.866.000 | |
| | 28 Laporan Penelitian Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 634.201.000 | |
| | 29 Laporan Penelitian Evaluasi Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 634.201.000 | |
| | 30 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (BLA Makassar) | 1 Laporan | 230.968.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Alumni Diklat Tenaga Administrasi | | | |
| | 31 Diklat Teknis Administrasi selama 6 Hari (Pusdiklat Administrasi) | 1 Orang | 6.600.500 | |

AGW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 32 Diklat Teknis Administrasi selama 10 Hari (Pusdiklat Administrasi) | 1 Orang | 8.111.333 | |
| | 33 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 12 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 5.447.333 | |
| | 34 DDTK Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administasi 4 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 3.380.000 | |
| | 35 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 10 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 4.732.000 | |
| | 36 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 8 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 4.016.666 | |
| | 37 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 3.189.666 | |
| | 38 Alumni Diklat Tenaga Administrasi 12 Hari (BDK Medan) | 1 Orang | 5.161.733 | |
| | 39 Alumni Diklat Tenaga Administrasi 7 Hari (BDK Medan) | 1 Orang | 3.199.733 | |
| | 40 Alumni Diklat Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Medan) | 1 Orang | 3.453.866 | |
| | 41 Alumni Diklat Administrasi 7 Hari (BDK Palembang) | 1 Orang | 3.585.428 | |
| | 42 Alumni Diklat Administrasi 6 Hari (BDK Palembang) | 1 Orang | 3.211.142 | |
| | 43 Diklat Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 2.916.428 | |
| | 44 Diklat Tenaga Administrasi 10 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 4.187.857 | |
| | 45 Diklat Teknis Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (BDK Denpasar) | 1 Orang | 5.041.818 | |
| | 46 Diklat Di Tempat Kerja 4 Hari Di Prov. Bali (BDK Denpasar) | 1 Orang | 2.195.142 | |
| | 47 Diklat Di Tempat Kerja 4 Hari Di Prov. NTB (BDK Denpasar) | 1 Orang | 2.546.571 | |
| | 48 Diklat Di Tempat Kerja 4 Hari Di Prov. NTT (BDK Denpasar) | 1 Orang | 2.886.571 | |
| | 49 Diklat Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 4.787.700 | |
| | 50 Diklat Tenaga Administrasi 7 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 5.750.500 | |
| | 51 Diklat Tenaga Administrasi 10 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 5.776.200 | |
| | 52 Diklat Tenaga Administrasi 4 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 3.054.333 | |
| | 53 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 10 Hari (BDK Makassar) | 1 Orang | 6.650.500 | |
| | 54 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 6 Hari (BDK Makassar) | 1 Orang | 4.812.200 | |
| | 55 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 8 Hari (BDK Makassar) | 1 Orang | 5.684.700 | |
| | 56 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Sulsel (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.142.000 | |
| | 57 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Sulteng (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.351.500 | |
| | 58 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Sultra (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.257.750 | |
| | 59 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Sulbar (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.175.250 | |
| | 60 Alumni Diklat dan Ujian Sertifikasi Pbjp (BDK Makassar) | 1 Orang | 5.861.666 | |
| | 61 Alumni Diklat Reguler Tenaga Teknis Administrasi (BDK Manado) | 1 Orang | 8.697.500 | |
| | 62 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 12 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 7.102.000 | |
| | 63 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 10 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 6.465.333 | |
| | 64 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 8 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 5.815.333 | |
| | 65 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 6 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 4.735.000 | |
| | 66 Alumni Diklat Di Tempat Kerja (ddtk) (BDK Ambon) | 1 Orang | 4.251.333 | |
| | 67 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 13 Hari (BDK Padang) | 1 Orang | 5.936.000 | |
| | 68 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 10 Hari (BDK Padang) | 1 Orang | 5.106.000 | |
| | 69 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 8 Hari (BDK Padang) | 1 Orang | 4.409.333 | |
| | 70 Diklat Tenaga Teknis Administrasi Di Tempat Kerja 4 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 1.837.857 | |
| | 71 Diklat Barang dan Jasa 6 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 3.831.428 | |
| | 72 Diklat Tenaga Administrasi 6 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 2.869.666 | |
| | 73 Diklat Tenaga Administrasi 10 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 4.119.666 | |
| | Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan | | | |
| | 74 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 7 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 4.505.333 | |
| | 75 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 10 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 5.578.333 | |
| | 76 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 12 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 6.293.666 | |
| | 77 DDTK Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 7 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 5.572.666 | |
| | 78 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 14 Hari (BDK Medan) | 1 Orang | 5.872.133 | |
| | 79 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 10 Hari (BDK Medan) | 1 Orang | 4.159.666 | |
| | 80 Alumni Diklat Fungsional Keagamaan 15 Hari (BDK Palembang) | 1 Orang | 5.900.857 | |
| | 81 Diklat Teknis Keagamaan Substantif 10 Hari (BDK Palembang) | 1 Orang | 4.586.571 | |
| | 82 Alumni Diklat Teknis Fungsional Keagamaan Berjenjang Di Dalam Kampus 17 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 8.136.000 | |
| | 83 Alumni Diklat Teknis Fungsional Kegamaan Berjenjang Di Dalam Kampus 14 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 6.858.000 | |

Abu

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 84 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Dalam Kampus 11 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 5.901.333 | |
| | 85 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Dalam Kampus 8 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 4.623.333 | |
| | 86 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Wilayah Kerja Prov. DKI Jakarta 5 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 2.615.666 | |
| | 87 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Wilayah Kerja Prov. Banten 5 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 2.990.666 | |
| | 88 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Wilayah Kerja Prov. Kalimantan Barat 5 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 3.674.000 | |
| | 89 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Pertama 15 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 5.716.428 | |
| | 90 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Muda 12 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 4.745.000 | |
| | 91 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 10 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 4.187.857 | |
| | 92 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan Di Wilayah Kerja 5 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 2.229.428 | |
| | 93 Alumni Diklat Fungsional Keagamaan 15 Hari (BDK Denpasar) | 1 Orang | 8.182.285 | |
| | 94 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Keagamaan 10 Hari (BDK Denpasar) | 1 Orang | 6.796.571 | |
| | 95 Diklat Teknis Fungsional 10 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 6.243.000 | |
| | 96 Diklat Teknis Fungsional 12 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 6.589.666 | |
| | 97 Diklat Teknis Fungsional 15 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 7.395.233 | |
| | 98 Diklat Teknis Substantif 10 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 6.243.000 | |
| | 99 Diklat Teknis Substantif 12 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 6.589.666 | |
| | 100 Diklat Teknis Substantif 15 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 7.395.233 | |
| | 101 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 7 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 5.408.133 | |
| | 102 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 10 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 6.748.100 | |
| | 103 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 12 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 7.463.100 | |
| | 104 Diklat Di Tempat Kerja Teknis Keagamaan Di Prov. Sulsel (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.500.750 | |
| | 105 Diklat Di Tempat Kerja Teknis Keagamaan Di Prov. Sulteng (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.702.750 | |
| | 106 Diklat Di Tempat Kerja Teknis Keagamaan Di Prov. Sultra (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.610.250 | |
| | 107 Diklat Di Tempat Kerja Teknis Keagamaan Di Prov. Sulbar (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.531.500 | |
| | 108 Diklat Tenaga Teknis Fungsional Keagamaan Tingkat Dasar (BDK Manado) | 1 Orang | 10.455.833 | |
| | 109 Diklat Tenaga Teknis Fungsional Keagamaan Tingkat Menengah (BDK Manado) | 1 Orang | 9.209.166 | |
| | 110 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 10 Hari (BDK Manado) | 1 Orang | 8.697.500 | |
| | 111 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 7 Hari (BDK Manado) | 1 Orang | 7.596.666 | |
| | 112 Alumni Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Keagamaan (BDK Ambon) | 1 Orang | 9.318.333 | |
| | 113 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang 15 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 7.900.000 | |
| | 114 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang (10 Hari) (BDK Ambon) | 1 Orang | 6.220.000 | |
| | 115 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan (10 Hari) (BDK Ambon) | 1 Orang | 6.213.333 | |
| | 116 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang 12 Hari (BDK Padang) | 1 Orang | 5.526.666 | |
| | 117 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang 15 Hari (BDK Padang) | 1 Orang | 6.656.666 | |
| | 118 Diklat Teknis Fungsional Keagamaan 15 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 5.568.000 | |
| | 119 Diklat Teknis Fungsional Keagamaan 10 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 4.074.285 | |
| | 120 Diklat Teknis Substantif Keagamaan 10 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 3.980.000 | |
| | 121 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Pertama 15 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 5.603.000 | |
| | 122 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Muda 12 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 4.703.000 | |
| | 123 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 10 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 4.119.666 | |
| | 124 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan Di Luar Kampus 5 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 2.545.500 | |
| | Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan | | | |
| | 125 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan 7 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 4.505.333 | |
| | 126 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan 10 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 5.578.333 | |
| | 127 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan 12 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 6.293.666 | |
| | 128 DITK Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan 7 Hari (BDK Aceh) | 1 Orang | 5.572.666 | |
| | 129 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 15 Hari (BDK Medan) | 1 Orang | 6.192.333 | |
| | 130 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 12 Hari (BDK Medan) | 1 Orang | 5.136.733 | |
| | 131 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 10 Hari (BDK Medan) | 1 Orang | 4.459.666 | |
| | 132 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 7 Hari (BDK Medan) | 1 Orang | 3.203.066 | |
| | 133 Alumni Diklat Teknis Pendidikan Fungsional 12 Hari (BDK Palembang) | 1 Orang | 5.120.857 | |
| | 134 Diklat Teknis Fungsional Pendidikan 10 Hari (BDK Palembang) | 1 Orang | 4.586.571 | |
| | 135 Diklat Teknis Pendidikan Substantif 10 Hari (BDK Palembang) | 1 Orang | 4.586.571 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 136 Diklat Substantif Pendidikan 7 Hari (BDK Palembang) | 1 Orang | 3.978.000 | |
| | 137 Diklat Teknis Pendidikan Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Lampung (BDK Palembang) | 1 Orang | 3.069.714 | |
| | 138 Diklat Teknis Pendidikan Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Bengkulu (BDK Palembang) | 1 Orang | 3.204.028 | |
| | 139 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Bangka Belitung (BDK Palembang) | 1 Orang | 3.439.714 | |
| | 140 Diklat Teknis Pendidikan Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Sumatera Selatan (BDK Palembang) | 1 Orang | 2.916.857 | |
| | 141 Alumni Diklat Teknis Fungsional Pendidikan Berjenjang Di Dalam Kampus 17 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 8.136.000 | |
| | 142 Alumni Diklat Teknis Fungsional Pendidikan Berjenjang Di Dalam Kampus 14 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 6.858.000 | |
| | 143 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Dalam Kampus 11 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 5.901.333 | |
| | 144 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Wilayah Kerja Prov. DKI Jakarta 5 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 2.615.666 | |
| | 145 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Wilayah Kerja Kota Adm. Kepulauan Seribu 5 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 3.015.666 | |
| | 146 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Wilayah Kerja Prov. Banten 5 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 3.024.000 | |
| | 147 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Wilayah Kerja Prov. Kalimantan Barat 5 Hari (BDK Jakarta) | 1 Orang | 3.690.666 | |
| | 148 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Dasar 12 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 4.745.000 | |
| | 149 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Menengah 10 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 4.187.857 | |
| | 150 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 10 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 4.187.857 | |
| | 151 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Di Wilayah Kerja 5 Hari (BDK Surabaya) | 1 Orang | 2.229.428 | |
| | 152 Alumni Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Kependidikan 12 Hari (BDK Denpasar) | 1 Orang | 7.419.428 | |
| | 153 Alumni Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Kependidikan 10 Hari (BDK Denpasar) | 1 Orang | 6.796.571 | |
| | 154 Alumni Diklat Teknis Substantif Penugasan Tambahan 10 Hari (BDK Denpasar) | 1 Orang | 6.796.571 | |
| | 155 Alumni Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 7 Hari (BDK Denpasar) | 1 Orang | 5.375.142 | |
| | 156 Alumni Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Di Prov. Bali (BDK Denpasar) | 1 Orang | 2.529.500 | |
| | 157 Alumni Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Di Prov. NTB (BDK Denpasar) | 1 Orang | 3.024.500 | |
| | 158 Alumni Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Di Prov. NTT (BDK Denpasar) | 1 Orang | 3.399.500 | |
| | 159 Diklat Teknis Fungsional 10 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 6.130.533 | |
| | 160 Diklat Teknis Fungsional 12 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 7.253.666 | |
| | 161 Diklat Tenaga Teknis Substantif 5 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 3.881.666 | |
| | 162 Diklat Tenaga Teknis Substantif 7 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 5.025.333 | |
| | 163 Diklat Teknis Substantif 10 Hari (BDK Banjarmasin) | 1 Orang | 5.775.333 | |
| | 164 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 7 Hari (BDK) | 1 Orang | 5.408.133 | |
| | 165 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 10 Hari (BDK) | 1 Orang | 6.748.100 | |
| | 166 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan Di Prov. Sulsel (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.500.750 | |
| | 167 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan Di Prov. Sulteng (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.702.750 | |
| | 168 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan Di Prov. Sultra (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.610.250 | |
| | 169 Alumni Diklat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan Di Prov. Sulbar (BDK Makassar) | 1 Orang | 2.531.500 | |
| | 170 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 12 Hari (BDK) | 1 Orang | 7.463.100 | |
| | 171 Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang Tingkat Dasar (BDK Manado) | 1 Orang | 9.209.166 | |
| | 172 Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang Tingkat Menengah (BDK Manado) | 1 Orang | 8.697.500 | |
| | 173 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 10 Hari (BDK Manado) | 1 Orang | 8.697.500 | |
| | 174 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 7 Hari (BDK Manado) | 1 Orang | 7.596.666 | |
| | 175 Alumni Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pendidikan 15 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 8.080.333 | |
| | 176 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 12 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 7.075.333 | |
| | 177 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 10 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 6.548.666 | |
| | 178 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 7 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 5.128.333 | |
| | 179 Alumni Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidik 10 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 6.520.333 | |
| | 180 Alumni Diklat Di Wilayah Kerja (DDWK) 5 Hari (BDK Ambon) | 1 Orang | 4.834.666 | |
| | 181 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 10 Hari (BDK Padang) | 1 Orang | 5.073.333 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 182 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 12 Hari (BDK Padang) | 1 Orang | 5.526.666 | |
| | 183 Alumni Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidik 7 Hari (BDK Padang) | 1 Orang | 4.182.666 | |
| | 184 Diklat Teknis Fungsional Pendidikan 12 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 4.733.142 | |
| | 185 Diklat Teknis Fungsional Pendidikan 10 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 4.065.714 | |
| | 186 Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidikan 10 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 3.894.285 | |
| | 187 Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidikan 7 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 2.654.000 | |
| | 188 Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidikan Di Wilayah Kerja 5 Hari (BDK Semarang) | 1 Orang | 2.129.285 | |
| | 189 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Dasar 12 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 4.703.000 | |
| | 190 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Menengah 10 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 4.124.666 | |
| | 191 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 10 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 4.124.666 | |
| | 192 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Di Luar Kampus 5 Hari (BDK Bandung) | 1 Orang | 2.548.833 | |

CA Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Ketenagakerjaan (026)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|---------------------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 026.04 | Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Pemberdayaan Melalui Kegiatan Padat Karya | | | |
| | 1 Padat Karya Produktif Wilayah Barat dan Tengah | 1 Orang | 1.201.666 | 1 Paket 66 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik dan bantuan sarana usaha |
| | 2 Padat Karya Produktif Wilayah Timur | 1 Orang | 1.279.393 | 1 Paket 66 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik dan bantuan sarana usaha |
| | 3 Padat Karya Infrastruktur Wilayah Barat | 1 Orang | 1.681.022 | 1 Paket 88 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik |
| | 4 Padat Karya Infrastruktur Wilayah Tengah | 1 Orang | 1.803.750 | 1 Paket 88 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik |
| | 5 Padat Karya Infrastruktur Wilayah Timur | 1 Orang | 1.984.090 | 1 Paket 88 Orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik |
| | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kerja Mandiri Untuk Penciptaan Wirausaha Baru | | | |
| | 6 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kerja Mandiri Untuk Penciptaan Wirausaha Baru | 1 Orang | 1.635.000 | 1 Angkatan 20 Orang, tidak termasuk Bantuan Peserta Program |
| | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Tentang Sektor Jasa dan Industri Kreatif Untuk Masyarakat Penganggur dan Setengah Menganggur | | | |
| | 7 Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Terapan Tentang Sektor Jasa dan Industri Kreatif Untuk Masyarakat Penganggur dan Setengah Menganggur | 1 Orang | 2.120.000 | 1 Angkatan 20 Orang, tidak termasuk Bantuan Sarana Usaha |
| | 8 Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Terapan Tentang Sektor Pertanian dan Maritim Untuk Masyarakat Penganggur dan Setengah Menganggur | 1 Orang | 2.120.000 | 1 Angkatan 20 Orang, tidak termasuk Bantuan Sarana Usaha |
| 026.05 | Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam penyelesaian perselisihan HI | 1 Perjanjian Bersama (PB) | 3.500.000 | |
| 026.13 | Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | LSP Terlisensi | | | |
| | 1 Asesmen | 1 Lembaga | 7.552.000 | |
| | 2 Witness LSP | 1 Lembaga | 7.552.000 | |
| | Peserta Pemagangan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi | | | |
| | 3 Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri | 1 Orang | 6.183.000 | 1 Angkatan untuk 10 Orang |

AGW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 027.04 | Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | 1 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumut | 1 Orang | 21.600.000 | |
| | 2 Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Pamardi Putra "Galih Pakuan" Bogor | 1 Orang | 21.605.184 | |
| | 3 Penyandang Disabilitas Sensorik yang menerima Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Melati" Jakarta | 1 Orang | 20.459.875 | |
| | 4 Penyandang Disabilitas Sensorik yang menerima Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata" Kupang | 1 Orang | 24.341.400 | |
| | 5 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu | 1 Orang | 15.703.125 | |
| | 6 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras "Phala Martha" Sukabumi | 1 Orang | 16.531.572 | |
| | 7 Penyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarbaru | 1 Orang | 17.373.428 | |
| | 8 Penyandang Disabilitas Sensorik Yang Memperoleh Rehabilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Bina Netra "Wiyata Guna" Bandung | 1 Orang | 15.367.674 | |
| | 9 Penyandang Disabilitas Sensorik Yang Memperoleh Rehabilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Bina Netra "Tan Miyat" Bekasi | 1 Orang | 16.528.823 | |
| | 10 Penyandang Disabilitas Sensorik Yang Memperoleh Rehabilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Bina Netra "Tu Mou Tou" Manado | 1 Orang | 17.063.240 | |
| | 11 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Netra "Mahatmiya" Tabanan Bali | 1 Orang | 16.645.000 | |
| | 12 Penyandang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Grahita "Ciungwanara" Bogor | 1 Orang | 17.974.000 | |
| | 13 Penyandang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" Temanggung | 1 Orang | 15.925.886 | |
| | 14 Penyandang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe" Palu | 1 Orang | 20.408.542 | |
| | 15 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa "Cibinong" Bogor | 1 Orang | 24.626.317 | |
| | 16 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. DR. Soeharso" Surakarta | 1 Orang | 18.289.483 | |
| | 17 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa" Palembang | 1 Orang | 21.118.035 | |
| | 18 Penyandang Disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Daksa "Wirajaya" Makassar | 1 Orang | 16.257.591 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 19 Penyandang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Meohai" Kendari | 1 Orang | 23.178.142 | |
| | 20 Wanita Tuna Sosial Yang Mendapatkan Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya" Jakarta | 1 Orang | 14.970.437 | |
| | 21 Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi (SBK) | 1 Orang | 8.514.110 | |
| | 22 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Handayani" Jakarta | 1 Orang | 16.429.341 | |
| | 23 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang | 1 Orang | 16.593.571 | |
| | 24 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Toddopuli" Makassar | 1 Orang | 18.103.000 | |
| | 25 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Marsudi Putra "Paramita" Mataram | 1 Orang | 15.327.928 | |
| | 26 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri di Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus" Jakarta | 1 Orang | 9.448.818 | |
| | 27 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri di Panti Sosial Bina Remaja "Rumbai" Pekanbaru | 1 Orang | 10.786.928 | |
| | 28 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri di Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat" Kupang | 1 Orang | 14.544.750 | |
| | 29 Anak terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Asuhan Anak "Alyatama" Jambi | 1 Orang | 15.867.000 | |
| | 30 Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Panti Sosial Asuhan Anak "Darussa'adah" Aceh | 1 Orang | 15.703.500 | |
| | 31 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha "Budhi Dharma" Bekasi | 1 Orang | 15.989.054 | |
| | 32 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha "Gau Maba'ji" Gowa | 1 Orang | 17.854.873 | |
| | 33 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia pada Panti Sosial Tresna Werdha "Minaula" Kendari | 1 Orang | 19.247.957 | |
| 027.11 | Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Laporan Hasil Penelitian Terapan | | | |
| | 1 Laporan Hasil Penelitian Terapan Kajian/Evaluasi Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 1 Laporan | 1.293.770.000 | |
| | 2 Laporan Hasil Penelitian Terapan <i>Research and Development</i> Tahap I | 1 Laporan | 1.432.020.000 | |
| | 3 Laporan Hasil Penelitian Terapan <i>Research and Development</i> Tahap II | 1 Laporan | 1.501.700.000 | |
| | 4 Laporan Hasil Penelitian Terapan Diseminasi Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 1 Laporan | 1.069.790.000 | |
| | Laporan Hasil Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial | | | |
| | 5 Laporan Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial | 1 Laporan | 934.260.000 | |
| | 6 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial | 1 Laporan | 965.780.000 | |
| | 7 Laporan Penelitian <i>Quick Survei</i> Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial | 1 Laporan | 194.584.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang | | | |
| | 8 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (40 jpl/5 hari) | 1 Orang | 4.866.533 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 9 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (60 jpl/7 hari) | 1 Orang | 5.939.733 | |
| | 10 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (80 jpl/10 hari) | 1 Orang | 8.543.533 | |
| | 11 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (100 jpl/12 hari) | 1 Orang | 9.746.066 | |
| | 12 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (120 jpl/14 hari) | 1 Orang | 10.906.266 | |
| | 13 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (145 jpl/16 hari) | 1 Orang | 11.240.966 | |
| | 14 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (190 jpl/23 hari) | 1 Orang | 15.550.333 | |
| | 15 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang (210 jpl/25 hari) | 1 Orang | 16.749.866 | |
| | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Bandung | | | |
| | 16 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (104 jpl/12 hari) | 1 Orang | 8.637.233 | |
| | 17 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (40jpl/5 hari) | 1 Orang | 4.558.333 | |
| | 18 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (80 jpl/10 hari) | 1 Orang | 7.747.100 | |
| | 19 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (100 jpl/12 hari) | 1 Orang | 8.471.900 | |
| | 20 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (120 jpl/14 hari) | 1 Orang | 9.350.366 | |
| | 21 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (210 jpl/25 hari) | 1 Orang | 15.954.300 | |
| | 22 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Regional II Bandung (145 jpl/17 hari) | 1 Orang | 13.032.500 | |
| | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta | | | |
| | 23 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 100 jpl, 12 hari | 1 Orang | 8.756.633 | |
| | 24 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 80 jpl, 10 hari | 1 Orang | 7.927.766 | |
| | 25 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 210 jpl, 25 hari | 1 Orang | 16.336.000 | |
| | 26 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 120 jpl, 16 hari | 1 Orang | 10.146.033 | |
| | 27 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 40 jpl, 5 hari | 1 Orang | 5.219.100 | |
| | 28 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 145 jpl, 17 hari | 1 Orang | 13.187.133 | |
| | 29 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 60 jpl, 7 hari | 1 Orang | 6.017.966 | |
| | 30 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta, 80 jpl, 10 hari | 1 Orang | 8.431.633 | |
| | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Banjarmasin | | | |
| | 31 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (40 Jamlat/5 Hari) | 1 Orang | 6.326.166 | |
| | 32 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (60 Jamlat/7 Hari) | 1 Orang | 7.465.500 | |
| | 33 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (80 Jamlat/10 Hari) | 1 Orang | 8.836.000 | |

h
Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (100 Jamlat / 12 Hari) | 1 Orang | 9.646.333 | |
| 35 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (120 Jamlat / 14 Hari) | 1 Orang | 10.456.666 | |
| 36 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (145 Jamlat / 17 Hari) | 1 Orang | 14.049.666 | |
| 37 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (210 Jamlat / 25 Hari) | 1 Orang | 15.841.500 | |
| | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Makassar | | | |
| 38 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (210 jpl/25 hari) | 1 Orang | 18.965.933 | |
| 39 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (145 jpl/ 17 hari) | 1 Orang | 13.573.166 | |
| 40 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (120 jpl/ 15 hari) | 1 Orang | 11.619.266 | |
| 41 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (100 jpl/ 12 hari) | 1 Orang | 10.354.333 | |
| 42 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (80 jpl/ 10 hari) | 1 Orang | 9.449.933 | |
| 43 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (60 jpl / 7 hari) | 1 Orang | 8.021.333 | |
| 44 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (60 jpl/7 hari/ pra) | 1 Orang | 11.664.133 | |
| 45 | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS Makassar (40 jpl/5 hari) | 1 Orang | 7.101.933 | |
| | Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura | | | |
| 46 | Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (210 jamlat/25 hari) | 1 Orang | 25.944.166 | |
| 47 | Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (100 jamlat/ 12 hari) | 1 Orang | 15.479.433 | |
| 48 | Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (80 jamlat/ 10 hari) | 1 Orang | 14.225.833 | |
| 49 | Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (60 jamlat/7 hari) | 1 Orang | 12.637.100 | |
| 50 | Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (40 jamlat/5 hari) | 1 Orang | 10.764.166 | |
| 51 | Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura (145 jamlat/ 17 hari) | 1 Orang | 18.940.933 | |
| | Pekerja Sosial yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan TOT Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial | | | |
| 52 | TOT Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 1 Orang | 14.578.933 | |
| 53 | TOF Pendamping PKH | 1 Orang | 14.973.266 | |
| 54 | TOF Operator PKH | 1 Orang | 14.093.666 | |
| 55 | TOF FDS PKH | 1 Orang | 23.786.800 | |
| | Pegawai dan TKSK yang Telah Mengikuti Diklat Kesejahteraan Sosial | | | |
| 56 | Pegawai dan TKSK Yang Telah Mengikuti Diklat Operator / Pendamping PKH | 1 Orang | 9.138.933 | |

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Sertifikasi | | | |
| 57 | Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Mendapatkan Sertifikasi | 1 Orang | 6.128.750 | |
| | Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Akreditasi | | | |
| 58 | Lembaga Kesejahteraan Sosial Mendapatkan Akreditasi | 1 Lembaga | 17.540.000 | |
| | Mahasiswa Program D.IV Pekerjaan Sosial | | | |
| 59 | Mahasiswa Program D.IV Pekerjaan Sosial | 1 Orang | 5.975.171 | |
| | Mahasiswa Program Pasca Sarjana Pekerjaan Sosial | | | |
| 60 | Mahasiswa Program Pascasarjana (SP-1) Pekerjaan Sosial | 1 Orang | 18.037.840 | |
| | Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Sosial | | | |
| 61 | Penyuluhan Sosial Keliling Penyelenggaraan Program Kesos (<i>car free day</i>) | 1 Lokasi | 23.081.500 | |

C. *ASW*

Kementerian Negara/Lembaga: Pariwisata (040)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 040.01 | Kementerian Pariwisata Deputi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) 1 Penelitian Individu 2 Penelitian Kelompok 3 Penelitian Lembaga/Institusi 4 Sertifikasi Profesi | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Orang | 12.314.000 147.773.000 443.982.000 403.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 054.01 | Badan Pusat Statistik SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Laporan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS di Wilayah I | 68 Laporan | 2.860.879.000 | |
| | 2 Laporan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS di Wilayah II | 69 Laporan | 3.062.382.000 | |
| | 3 Laporan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS di Wilayah III | 68 laporan | 2.765.689.000 | |

6 am

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 056.01 | Sekretariat Jenderal | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Sertipikat Hak Atas Tanah | | | |
| | 1 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori I | 1 Bidang | 688.000 | Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara |
| | 2 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori II | 1 Bidang | 585.000 | Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Bangka Belitung |
| | 3 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori III | 1 Bidang | 483.000 | Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo |
| | 4 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV | 1 Bidang | 375.000 | Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung |
| | 5 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori V | 1 Bidang | 268.000 | Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali |
| | 6 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori VI | 1 Bidang | 808.000 | Wilayah Kepulauan |
| | 7 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori VII | 1 Bidang | 1.258.000 | Daerah Terpencil/Terluar |
| | 8 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori I luas 1 s/d 25.000 M ² | 1 Bidang | 1.582.000 | Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara |
| | 9 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori II luas 1 s/d 25.000 M ² | 1 Bidang | 1.327.000 | Sulteng, Sultra, Sulut, NTB, Kepri, Bangka Belitung |
| | 10 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori III luas 1 s/d 25.000 M ² | 1 Bidang | 1.072.000 | Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo |
| | 11 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori IV luas 1 s/d 25.000 M ² | 1 Bidang | 802.000 | Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung |
| | 12 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori V luas 1 s/d 25.000 M ² | 1 Bidang | 532.000 | Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali |
| | 13 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori I luas 25.001 s/d 100.000 M ² | 1 Bidang | 3.277.000 | Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara |
| | 14 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori II luas 25.001 s/d 100.000 M ² | 1 Bidang | 2.733.000 | Sulteng, Sultra, Sulut, NTB, Kepri, Bangka Belitung |
| | 15 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori III luas 25.001 s/d 100.000 M ² | 1 Bidang | 2.189.000 | Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo |
| | 16 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori IV luas 25.001 s/d 100.000 M ² | 1 Bidang | 1.613.000 | Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung |
| | 17 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori V luas 25.001 s/d 100.000 M ² | 1 Bidang | 1.037.000 | Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Sertipikat Redistribusi Tanah | | | |
| 18 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori I | 1 Bidang | 917.480 | Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara |
| 19 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori II | 1 Bidang | 771.727 | Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau |
| 20 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori III | 1 Bidang | 652.317 | Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar |
| 21 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori IV | 1 Bidang | 530.402 | Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo |
| 22 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori V | 1 Bidang | 401.180 | Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten |
| 23 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori I | 1 Bidang | 1.145.650 | Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara |
| 24 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori II | 1 Bidang | 962.549 | Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau |
| 25 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori III | 1 Bidang | 803.549 | Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar |
| 26 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori IV | 1 Bidang | 646.649 | Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo |
| 27 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori V | 1 Bidang | 479.150 | Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten |
| 28 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori I | 1 Bidang | 1.295.462 | Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara |
| 29 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori II | 1 Bidang | 1.090.401 | Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau |
| 30 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori III | 1 Bidang | 915.526 | Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar |
| 31 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori IV | 1 Bidang | 735.551 | Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo |
| 32 | Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori V | 1 Bidang | 547.407 | Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten |
| | Bidang Tanah Yang Diinventarisasi | | | |
| 33 | Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori I | 1 Bidang | 173.908 | NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Kabupaten Kepulauan |
| 34 | Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori II | 1 Bidang | 136.084 | Kep. Babel, Kepri, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut dan Sultra |

L. An

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 35 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori III | 1 Bidang | 108.125 | Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar dan Sulsel |
| | 36 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori IV | 1 Bidang | 103.177 | Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Bali |
| | 37 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori I | 1 Bidang | 266.400 | NTT, Maluku, Maluku, Papua Barat, Papua dan Kabupaten Kepulauan |
| | 38 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori II | 1 Bidang | 213.700 | Kep. Babel, Kepri, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut dan Sultra |
| | 39 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori III | 1 Bidang | 202.800 | Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar dan Sulsel |
| | 40 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori IV | 1 Bidang | 209.000 | Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Bali |
| | Neraca Penatagunaan Tanah | | | |
| | 41 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota Kategori I | 1 Neraca | 118.350.000 | Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara |
| | 42 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota Kategori II | 1 Neraca | 98.388.000 | NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sulsel dan Sultra |
| | 43 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota Kategori III | 1 Neraca | 93.160.000 | Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung |
| | 44 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota Kategori IV | 1 Neraca | 103.826.000 | Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali |
| | 45 Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori I | 1 Neraca | 70.500.000 | Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara |
| | 46 Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori II | 1 Neraca | 62.600.000 | Sulut, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NTT, NTB, Gorontalo |
| | 47 Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori III | 1 Neraca | 61.750.000 | Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, Lampung |
| | 48 Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori IV | 1 Neraca | 61.950.000 | Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali |

Handwritten signature/initials

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Sertipikat Konsolidasi Tanah | | | |
| 49 | Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori I | 1 Bidang | 2.046.120 | Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara |
| 50 | Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori II | 1 Bidang | 1.735.900 | Sulut,Sulteng, Sultra, NTB, Kepri,Babel |
| 51 | Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori III | 1 Bidang | 1.597.900 | Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng |
| 52 | Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori IV | 1 Bidang | 1.398.660 | Kalsel,Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Gorontalo |
| 53 | Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori V | 1 Bidang | 1.302.120 | Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali |
| 54 | Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori VI | 1 Bidang | 2.486.380 | Wilayah Kepulauan |
| | Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah | | | |
| 55 | Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori I | 1 Bidang | 114.831.000 | Maluku, Maluku Utara, Papua Barat,Papua |
| 56 | Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori II | 1 Bidang | 95.322.000 | NTT, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra |
| 57 | Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori III | 1 Bidang | 93.717.000 | Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Babel |
| 58 | Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori IV | 1 Bidang | 88.302.000 | Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali |

 Abn

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 059.03 | Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Jakarta | | | |
| | 1 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Jakarta) | 1 Dokumen | 6.700.000 | |
| | 2 Observasi dan Monitoring dan Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 57.928.000 | |
| | 3 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 22.100.000 | |
| | 4 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 61.178.000 | |
| | 5 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.700.000 | |
| | 6 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 58.278.000 | |
| | 7 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.700.000 | |
| | 8 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 13.290.000 | |
| | 9 Tindaklanjuti Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 6.700.000 | |
| | 10 Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 37.460.000 | |
| | 11 Joint Measurement & Inspeksi Di Pelabuhan Penggunaan Frekuensi Maritim Dengan Ditjen Hubla / Otoritas Pelabuhan | 1 Dokumen | 20.155.000 | |
| | 12 Joint Measurement & Inspeksi Di Bandara Halim Penggunaan Frekuensi Penerbangan Dengan Ditjen Hubud / Otoritas Bandara | 1 Dokumen | 20.120.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Medan | | | |
| | 13 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.440.000 | |
| | 14 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 17.800.000 | |
| | 15 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 10.140.000 | |
| | 16 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 32.615.000 | |
| | 17 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.515.000 | |
| | 18 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.336.000 | |
| | 19 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.336.000 | |
| | 20 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota | 1 Dokumen | 9.740.000 | |
| | 21 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota | 1 Dokumen | 20.775.000 | |
| | 22 Ujian Amatir Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 33.690.000 | |
| | 23 Ujian Amatir Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 85.275.000 | |
| | 24 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara) | 1 Dokumen | 33.802.000 | |
| | 25 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara) | 1 Dokumen | 33.802.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Bandung | | | |
| | 26 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio [Dalam Kota] | 1 Dokumen | 5.899.000 | |
| | 27 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio [Luar Kota] | 1 Dokumen | 24.870.000 | |
| | 28 Penertiban Frekuensi Radio [Dalam Kota] | 1 Dokumen | 25.056.000 | |
| | 29 Penertiban Frekuensi Radio [Luar Kota] | 1 Dokumen | 66.560.000 | |
| | 30 Validasi Data Frekuensi Radio [Dalam Kota] | 1 Dokumen | 4.570.000 | |
| | 31 Validasi Data Frekuensi Radio [Luar Kota] | 1 Dokumen | 29.367.000 | |
| | 32 Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 24.845.000 | |
| | 33 Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 29.729.000 | |
| | 34 Ujian Negara Amatir Radio [UNAR] | 1 Dokumen | 62.898.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Semarang | | | |
| | 35 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang) | 1 Dokumen | 4.824.000 | |
| | 36 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang) | 1 Dokumen | 20.596.000 | |
| | 37 Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang) | 1 Dokumen | 19.450.000 | |
| | 38 Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang) | 1 Dokumen | 52.100.000 | |
| | 39 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang) | 1 Dokumen | 4.824.000 | |
| | 40 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang) | 1 Dokumen | 20.596.000 | |
| | 41 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.824.000 | |
| | 42 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.596.000 | |
| | 43 Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 31.924.000 | |
| | 44 Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 62.323.000 | |

AGW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Surabaya | | | |
| 45 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.312.000 | |
| 46 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 22.700.000 | |
| 47 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jatim) | 1 Dokumen | 22.165.000 | |
| 48 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Jatim) | 1 Dokumen | 76.850.000 | |
| 49 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 32.135.000 | |
| 50 | Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota (Jatim) | 1 Dokumen | 5.792.000 | |
| 51 | Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota (Jatim) | 1 Dokumen | 21.660.000 | |
| 52 | Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 93.125.000 | |
| 53 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 5.825.000 | |
| 54 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 21.725.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Samarinda | | | |
| 55 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda | 1 Dokumen | 6.200.000 | |
| 56 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Darat | 1 Dokumen | 27.750.000 | |
| 57 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Udara | 1 Dokumen | 38.830.000 | |
| 58 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Laut dan Udara | 1 Dokumen | 41.830.000 | |
| 59 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda | 1 Dokumen | 19.749.000 | |
| 60 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 82.763.000 | |
| 61 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda | 1 Dokumen | 6.200.000 | |
| 62 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat | 1 Dokumen | 27.750.000 | |
| 63 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Udara | 1 Dokumen | 38.830.000 | |
| 64 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Laut dan Udara | 1 Dokumen | 41.830.000 | |
| 65 | Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda | 1 Dokumen | 6.200.000 | |
| 66 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda | 1 Dokumen | 38.830.000 | |
| 67 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 18.531.000 | |
| 68 | Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 60.705.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Makassar | | | |
| 69 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota Makassar | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| 70 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Makassar Transportasi Laut | 1 Dokumen | 24.400.000 | |
| 71 | Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 21.400.000 | |
| 72 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar | 1 Dokumen | 16.520.000 | |
| 73 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat | 1 Dokumen | 66.790.000 | |
| 74 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar | 1 Dokumen | 5.155.000 | |
| 75 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut | 1 Dokumen | 22.900.000 | |
| 76 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat | 1 Dokumen | 21.400.000 | |
| 77 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut | 1 Dokumen | 22.900.000 | |
| 78 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat | 1 Dokumen | 21.400.000 | |
| 79 | Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| 80 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 14.500.000 | |
| 81 | Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 100.500.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pekanbaru | | | |
| 82 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.825.000 | |
| 83 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 24.187.000 | |
| 84 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota | 1 Dokumen | 20.175.000 | |
| 85 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 67.205.000 | |
| 86 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 23.810.000 | |
| 87 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 20.400.000 | |
| 88 | Validasi Data Pengguna Frekuensi di Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.720.000 | |
| 89 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 19.750.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Luar Kota Transportasi Laut | 1 Dokumen | 117.010.000 | |
| 91 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Di Luar Kota Transportasi Laut | 1 Dokumen | 44.750.000 | |
| 92 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut | 1 Dokumen | 29.230.000 | |
| 93 | Pengukuran Rekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.175.000 | |
| 94 | Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut | 1 Dokumen | 44.750.000 | |
| 95 | Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 92.560.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Palembang | | | |
| 96 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota (Palembang) | 1 Dokumen | 5.575.000 | |
| 97 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota (Palembang) | 1 Dokumen | 19.325.000 | |
| 98 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Palembang) | 1 Dokumen | 21.440.000 | |
| 99 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Palembang) | 1 Dokumen | 65.250.000 | |
| 100 | Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.250.000 | |
| 101 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 19.000.000 | |
| 102 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 19.325.000 | |
| 103 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 59.816.000 | |
| 104 | Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 53.170.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Yogyakarta | | | |
| 105 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota (D.I. Yogyakarta) | 1 Dokumen | 4.510.000 | |
| 106 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (D.I. Yogyakarta) | 1 Dokumen | 10.163.000 | |
| 107 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (D.I.Yogyakarta) | 1 Dokumen | 19.788.000 | |
| 108 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (D.I.Yogyakarta) | 1 Dokumen | 34.788.000 | |
| 109 | Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota (D.I.Yogyakarta) | 1 Dokumen | 3.840.000 | |
| 110 | Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota (D.I.Yogyakarta) | 1 Dokumen | 8.240.000 | |
| 111 | Pengukuran Frekuensi Radio (D.I. Yogyakarta) | 1 Dokumen | 12.260.000 | |
| 112 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban (D.I. Yogyakarta) | 1 Dokumen | 31.900.000 | |
| 113 | Ujian Negara Amatir Radio (D.I.Yogyakarta) | 1 Dokumen | 30.056.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Denpasar | | | |
| 114 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung) | 1 Dokumen | 6.560.000 | |
| 115 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota (Badung) | 1 Dokumen | 27.635.000 | |
| 116 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung) | 1 Dokumen | 24.565.000 | |
| 117 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Badung) | 1 Dokumen | 83.123.000 | |
| 118 | Validasi Data Frekuensi Dalam Kota (Badung) | 1 Dokumen | 6.875.000 | |
| 119 | Validasi Data Frekuensi Luar Kota (Badung) | 1 Dokumen | 28.510.000 | |
| 120 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 31.820.000 | |
| 121 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 65.410.000 | |
| 122 | Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) | 1 Dokumen | 46.815.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Kupang | | | |
| 123 | Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.600.000 | |
| 124 | Observasi Monitoring Luar Kota Transportasi Darat | 1 Dokumen | 23.750.000 | |
| 125 | Observasi Monitoring Luar Kota Transportasi Udara NTT | 1 Dokumen | 38.300.000 | |
| 126 | Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang | 1 Dokumen | 20.570.000 | |
| 127 | Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT | 1 Dokumen | 30.670.000 | |
| 128 | Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT | 1 Dokumen | 48.120.000 | |
| 129 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang | 1 Dokumen | 5.900.000 | |
| 130 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT | 1 Dokumen | 23.400.000 | |
| 131 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara | 1 Dokumen | 38.300.000 | |
| 132 | Pengukuran Stasiun Radio Dalam Kota Kupang | 1 Dokumen | 5.900.000 | |

Abu

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 133 Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat | 1 Dokumen | 34.900.000 | |
| | 134 Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT | 1 Dokumen | 38.300.000 | |
| | 135 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota Kupang | 1 Dokumen | 9.670.000 | |
| | 136 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Darat NTT | 1 Dokumen | 18.620.000 | |
| | 137 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Udara NTT | 1 Dokumen | 25.790.000 | |
| | 138 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Manado | 1 Dokumen | 99.980.000 | |
| | 139 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekrad Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.950.000 | |
| | 140 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekrad Luar Kota | 1 Dokumen | 44.200.000 | |
| | 141 Operasi Penertiban Frekrad Dalam Kota | 1 Dokumen | 24.275.000 | |
| | 142 Operasi Penertiban Frekrad Luar Kota | 1 Dokumen | 68.270.000 | |
| | 143 Validasi Data Pengguna Frekrad Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.950.000 | |
| | 144 Validasi Data Pengguna Frekrad Luar Kota | 1 Dokumen | 23.465.000 | |
| | 145 Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 20.680.000 | |
| | 146 Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 35.400.000 | |
| | 147 Ujian Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Jayapura | 1 Dokumen | 33.685.000 | |
| | 148 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Dalam Kota (Papua) | 1 Dokumen | 7.402.000 | |
| | 149 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua) | 1 Dokumen | 16.360.000 | |
| | 150 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua) | 1 Dokumen | 50.240.000 | |
| | 151 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua) | 1 Dokumen | 53.824.000 | |
| | 152 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua) | 1 Dokumen | 20.730.000 | |
| | 153 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Papua) | 1 Dokumen | 110.524.000 | |
| | 154 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua) | 1 Dokumen | 7.402.000 | |
| | 155 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua) | 1 Dokumen | 16.360.000 | |
| | 156 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua) | 1 Dokumen | 50.240.000 | |
| | 157 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua) | 1 Dokumen | 53.825.000 | |
| | 158 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua) | 1 Dokumen | 7.527.000 | |
| | 159 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Papua) | 1 Dokumen | 48.650.000 | |
| | 160 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota (Papua) | 1 Dokumen | 14.805.000 | |
| | 161 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota (Papua) | 1 Dokumen | 71.425.000 | |
| | 162 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota (Papua) | 1 Dokumen | 12.810.000 | |
| | 163 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota (Papua) | 1 Dokumen | 46.745.000 | |
| | 164 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua) Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Banda Aceh | 1 Dokumen | 23.860.000 | |
| | 165 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 4.350.000 | |
| | 166 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 21.150.000 | |
| | 167 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Menggunakan Transportasi Kapal Laut (Aceh) | 1 Dokumen | 22.085.000 | |
| | 168 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 53.378.000 | |
| | 169 Validasi dan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Dalam Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 4.200.000 | |
| | 170 Validasi dan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 31.087.000 | |
| | 171 Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 4.350.000 | |
| | 172 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 21.330.000 | |
| | 173 Tindak Lanjut Hasil Penertiban (Aceh) | 1 Dokumen | 35.278.000 | |
| | 174 Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 34.417.000 | |
| | 175 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 20.300.000 | |
| | 176 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Menggunakan Kapal Laut (Aceh) | 1 Dokumen | 21.570.000 | |

Abw

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Batam | | | |
| 177 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Menggunakan BBM | 1 Dokumen | 3.412.000 | |
| 178 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut | 1 Dokumen | 18.648.000 | |
| 179 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara | 1 Dokumen | 33.648.000 | |
| 180 | Monitoring Bordercomm (UPT Perbatasan) | 1 Dokumen | 18.648.000 | |
| 181 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 27.120.000 | |
| 182 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 60.826.000 | |
| 183 | Validasi Data Pengguna dan Penggudangan Frekuensi Radio Dalam Kota Menggunakan BBM | 1 Dokumen | 4.950.000 | |
| 184 | Validasi Data Pengguna dan Penggudangan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut | 1 Dokumen | 24.374.000 | |
| 185 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara | 1 Dokumen | 33.124.000 | |
| 186 | Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 3.900.000 | |
| 187 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut | 1 Dokumen | 18.648.000 | |
| 188 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara | 1 Dokumen | 33.648.000 | |
| 189 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 39.360.000 | |
| 190 | Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 37.063.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Padang | | | |
| 191 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Padang | 1 Dokumen | 4.450.000 | |
| 192 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Padang | 1 Dokumen | 17.740.000 | |
| 193 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Padang | 1 Dokumen | 12.260.000 | |
| 194 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 29.340.000 | |
| 195 | Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Padang | 1 Dokumen | 2.970.000 | |
| 196 | Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Padang | 1 Dokumen | 17.640.000 | |
| 197 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 14.298.000 | |
| 198 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 27.570.000 | |
| 199 | Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 26.770.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Jambi | | | |
| 200 | Observasi dan Monitoring Dalam Kota (Jambi) | 1 Dokumen | 5.720.000 | |
| 201 | Observasi dan Monitoring Luar Kota (Jambi) | 1 Dokumen | 19.300.000 | |
| 202 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi) | 1 Dokumen | 18.152.000 | |
| 203 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Jambi) | 1 Dokumen | 42.172.000 | |
| 204 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi) | 1 Dokumen | 5.720.000 | |
| 205 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Jambi) | 1 Dokumen | 19.300.000 | |
| 206 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 19.300.000 | |
| 207 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 8.390.000 | |
| 208 | Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 56.550.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Bengkulu | | | |
| 209 | Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu | 1 Dokumen | 4.550.000 | |
| 210 | Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu | 1 Dokumen | 18.000.000 | |
| 211 | Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara) Bengkulu | 1 Dokumen | 23.730.000 | |
| 212 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 18.190.000 | |
| 213 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu | 1 Dokumen | 42.650.000 | |
| 214 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban Bengkulu | 1 Dokumen | 10.195.000 | |
| 215 | Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu | 1 Dokumen | 4.550.000 | |
| 216 | Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu | 1 Dokumen | 18.000.000 | |
| 217 | Pengukuran Frekuensi Radio Bengkulu | 1 Dokumen | 18.000.000 | |
| 218 | Ujian Amatir Radio Dalam Kota Bengkulu | 1 Dokumen | 31.200.000 | |
| 219 | Ujian Amatir Radio Luar Kota Bengkulu | 1 Dokumen | 53.200.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Lampung | | | |
| 220 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.150.000 | |
| 221 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 18.380.000 | |
| 222 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 11.340.000 | |
| 223 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 30.426.000 | |

Abm

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 224 | Validasi Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.695.000 | |
| 225 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 18.380.000 | |
| 226 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 18.380.000 | |
| 227 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 6.292.000 | |
| 228 | Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 25.360.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pontianak | | | |
| 229 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota Pontianak | 1 Dokumen | 5.910.000 | |
| 230 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak | 1 Dokumen | 20.660.000 | |
| 231 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Udara | 1 Dokumen | 34.545.000 | |
| 232 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Sungai | 1 Dokumen | 23.160.000 | |
| 233 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota Pontianak | 1 Dokumen | 24.455.000 | |
| 234 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak | 1 Dokumen | 62.225.000 | |
| 235 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Pontianak | 1 Dokumen | 5.910.000 | |
| 236 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak | 1 Dokumen | 20.660.000 | |
| 237 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Sungai | 1 Dokumen | 23.160.000 | |
| 238 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Udara dan Darat | 1 Dokumen | 34.545.000 | |
| 239 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 20.660.000 | |
| 240 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 10.660.000 | |
| 241 | Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 60.052.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Banjarmasin | | | |
| 242 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam Kota Banjarmasin | 1 Dokumen | 5.550.000 | |
| 243 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota Banjarmasin | 1 Dokumen | 22.435.000 | |
| 244 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota Banjarmasin | 1 Dokumen | 17.980.000 | |
| 245 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota Banjarmasin | 1 Dokumen | 43.212.000 | |
| 246 | Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota Banjarmasin | 1 Dokumen | 5.550.000 | |
| 247 | Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota Banjarmasin | 1 Dokumen | 22.435.000 | |
| 248 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 22.255.000 | |
| 249 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 19.230.000 | |
| 250 | Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 59.550.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palangkaraya | | | |
| 251 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota (Kalteng) | 1 Dokumen | 3.447.000 | |
| 252 | Observasi Monitoring Bergerak Frekuensi di Luar Kota (Kalteng) | 1 Dokumen | 32.425.000 | |
| 253 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota (Kalteng) | 1 Dokumen | 23.700.000 | |
| 254 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Kalteng) | 1 Dokumen | 81.440.000 | |
| 255 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Dalam Kota (Kalteng) | 1 Dokumen | 3.180.000 | |
| 256 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota (Kalteng) | 1 Dokumen | 24.845.000 | |
| 257 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 24.845.000 | |
| 258 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 5.350.000 | |
| 259 | Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 76.525.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mataram | | | |
| 260 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] | 1 Dokumen | 5.760.000 | |
| 261 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] | 1 Dokumen | 22.456.000 | |
| 262 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut | 1 Dokumen | 23.258.000 | |
| 263 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] | 1 Dokumen | 24.981.000 | |
| 264 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] | 1 Dokumen | 59.608.000 | |
| 265 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air /Laut | 1 Dokumen | 56.422.000 | |
| 266 | Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] | 1 Dokumen | 5.760.000 | |

AGW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 267 | Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] | 1 Dokumen | 22.456.000 | |
| 268 | Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] | 1 Dokumen | 23.188.000 | |
| 269 | Transportasi Penyeberangan Air/Laut | | | |
| 269 | Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] | 1 Dokumen | 5.760.000 | |
| 270 | Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] | 1 Dokumen | 22.456.000 | |
| 271 | Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/Laut | 1 Dokumen | 23.188.000 | |
| 272 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban [NTB] | 1 Dokumen | 47.019.000 | |
| 273 | Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok [NTB] | 1 Dokumen | 60.542.000 | |
| 274 | Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa [NTB] | 1 Dokumen | 57.796.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Balikpapan | | | |
| 275 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.275.000 | |
| 276 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 25.850.000 | |
| 277 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota | 1 Dokumen | 22.605.000 | |
| 278 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 79.780.000 | |
| 279 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.335.000 | |
| 280 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 25.850.000 | |
| 281 | Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.275.000 | |
| 282 | Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 25.850.000 | |
| 283 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Dalam Kota | 1 Dokumen | 16.470.000 | |
| 284 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Luar Kota | 1 Dokumen | 39.780.000 | |
| 285 | Ujian Amatir Radio di Dalam Kota | 1 Dokumen | 32.494.000 | |
| 286 | Ujian Amatir Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 57.204.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palu | | | |
| 287 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.330.000 | |
| 288 | Monitoring Observasi Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 21.430.000 | |
| 289 | Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Laut | 1 Dokumen | 27.430.000 | |
| 290 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 61.250.000 | |
| 291 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.330.000 | |
| 292 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 21.430.000 | |
| 293 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 46.580.000 | |
| 294 | Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.330.000 | |
| 295 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 21.430.000 | |
| 296 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut | 1 Dokumen | 27.430.000 | |
| 297 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 40.830.000 | |
| 298 | Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 71.502.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Kendari | | | |
| 299 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.050.000 | |
| 300 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 21.800.000 | |
| 301 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Laut | 1 Dokumen | 23.400.000 | |
| 302 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Melalui Udara | 1 Dokumen | 32.050.000 | |
| 303 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 28.860.000 | |
| 304 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 37.680.000 | |
| 305 | Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.050.000 | |
| 306 | Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Sultra Melalui Darat | 1 Dokumen | 19.700.000 | |
| 307 | Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Sultra Melalui | 1 Dokumen | 25.680.000 | |
| 308 | Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Udara | 1 Dokumen | 32.350.000 | |
| 309 | Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.050.000 | |
| 310 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Darat | 1 Dokumen | 21.800.000 | |
| 311 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Laut | 1 Dokumen | 23.800.000 | |
| 312 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Udara | 1 Dokumen | 30.300.000 | |
| 313 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 13.730.000 | |
| 314 | Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) | 1 Dokumen | 55.030.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Merauke | | | |
| 315 | Observasi dan Monitoring Dalam Kota Merauke | 1 Dokumen | 8.800.000 | |
| 316 | Observasi dan Monitoring Luar Kota Merauke | 1 Dokumen | 48.375.000 | |
| 317 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Merauke | 1 Dokumen | 38.600.000 | |
| 318 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Merauke | 1 Dokumen | 148.300.000 | |

Abw

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 319 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Merauke | 1 Dokumen | 8.800.000 | |
| 320 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 48.375.000 | |
| 321 | Pengukuran Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 57.175.000 | |
| 322 | Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 171.820.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ambon | | | |
| 323 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Dalam Kota Ambon | 1 Dokumen | 4.200.000 | |
| 324 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut | 1 Dokumen | 23.870.000 | |
| 325 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara | 1 Dokumen | 21.605.000 | |
| 326 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon | 1 Dokumen | 17.300.000 | |
| 327 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut | 1 Dokumen | 27.674.000 | |
| 328 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara | 1 Dokumen | 38.310.000 | |
| 329 | Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon | 1 Dokumen | 4.200.000 | |
| 330 | Validasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut | 1 Dokumen | 23.130.000 | |
| 331 | Validasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara | 1 Dokumen | 21.605.000 | |
| 332 | Pengukuran Parameter Teknis Dalam Kota Ambon | 1 Dokumen | 4.200.000 | |
| 333 | Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon Transportasi Laut | 1 Dokumen | 12.336.000 | |
| 334 | Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon Transportasi Udara | 1 Dokumen | 21.605.000 | |
| 335 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 7.580.000 | |
| 336 | Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon | 1 Dokumen | 35.510.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ternate | | | |
| 337 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Ternate | 1 Dokumen | 6.312.000 | |
| 338 | Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Kapal Ferry Maluku Utara | 1 Dokumen | 24.200.000 | |
| 339 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Kepulauan Maluku Utara | 1 Dokumen | 29.300.000 | |
| 340 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 29.840.000 | |
| 341 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 68.840.000 | |
| 342 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.725.000 | |
| 343 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Kapal Ferry | 1 Dokumen | 24.200.000 | |
| 344 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Kepulauan Maluku Utara | 1 Dokumen | 30.150.000 | |
| 345 | Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Kapal Ferry Maluku Utara | 1 Dokumen | 24.200.000 | |
| 346 | Pengukuran Frekuensi Radio Kepulauan Maluku Utara | 1 Dokumen | 29.150.000 | |
| 347 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 5.025.000 | |
| 348 | Ujian Amatir Radio | 1 Dokumen | 43.750.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Pangkal Pinang | | | |
| 349 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.975.000 | |
| 350 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 16.487.000 | |
| 351 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara | 1 Dokumen | 21.900.000 | |
| 352 | Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.975.000 | |
| 353 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 16.487.000 | |
| 354 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara | 1 Dokumen | 21.900.000 | |
| 355 | Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.975.000 | |
| 356 | Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 16.487.000 | |
| 357 | Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara | 1 Dokumen | 21.900.000 | |
| 358 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 7.550.000 | |
| 359 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 19.025.000 | |
| 360 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara | 1 Dokumen | 21.900.000 | |
| 361 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 8.560.000 | |
| 362 | Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 38.750.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Gorontalo | | | |
| 363 | Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Gorontalo | 1 Dokumen | 5.350.000 | |
| 364 | Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 17.850.000 | |

h AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 365 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 26.560.000 | |
| | 366 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 67.960.000 | |
| | 367 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.350.000 | |
| | 368 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 17.850.000 | |
| | 369 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.350.000 | |
| | 370 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 17.850.000 | |
| | 371 Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 5.735.000 | |
| | 372 Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 24.540.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Tangerang | | | |
| | 373 Observasi Dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.890.000 | |
| | 374 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.540.000 | |
| | 375 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 16.726.000 | |
| | 376 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 56.036.000 | |
| | 377 Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 7.780.000 | |
| | 378 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.180.000 | |
| | 379 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.335.000 | |
| | 380 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.310.000 | |
| | 381 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 58.920.000 | |
| | 382 Ujian Amatir Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 23.840.000 | |
| | 383 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.100.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Pos Sorong | | | |
| | 384 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.969.000 | |
| | 385 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota dengan Transportasi Laut | 1 Dokumen | 46.350.000 | |
| | 386 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota dengan Sarana Transportasi Darat | 1 Dokumen | 31.148.000 | |
| | 387 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 30.695.000 | |
| | 388 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota | 1 Dokumen | 60.095.000 | |
| | 389 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.969.000 | |
| | 390 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.180.000 | |
| | 391 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.969.000 | |
| | 392 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 10.987.000 | |
| | 393 Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 66.051.000 | |
| | 394 Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 62.095.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Tahuna | | | |
| | 395 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.860.000 | |
| | 396 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 31.530.000 | |
| | 397 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 22.900.000 | |
| | 398 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 68.620.000 | |
| | 399 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 8.440.000 | |
| | 400 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 41.160.000 | |
| | 401 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 41.160.000 | |
| | 402 Tindak Lanjut Hasil Penertiban | 1 Dokumen | 81.240.000 | |
| | 403 Ujian Negara Amatir Radio | 1 Dokumen | 90.325.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Manokwari | | | |
| | 404 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.500.000 | |
| | 405 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 46.040.000 | |
| | 406 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat | 1 Dokumen | 24.800.000 | |
| | 407 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 18.150.000 | |
| | 408 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 87.046.000 | |
| | 409 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.500.000 | |
| | 410 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 46.020.000 | |
| | 411 Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.500.000 | |
| | 412 Pengukuran Frekuensi Radio Di Luar Kota | 1 Dokumen | 46.020.000 | |

AGW

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 413 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Di Dalam Kota | 1 Dokumen | 14.330.000 | |
| 414 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Di Luar Kota | 1 Dokumen | 63.910.000 | |
| 415 | Ujian Negara Amatir Radio Di Dalam Kota | 1 Dokumen | 39.490.000 | |
| 416 | Ujian Negara Amatir Radio Di Luar Kota | 1 Dokumen | 94.294.000 | |
| | Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mamuju | | | |
| 417 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju | 1 Dokumen | 5.430.000 | |
| 418 | Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju | 1 Dokumen | 19.800.000 | |
| 419 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju | 1 Dokumen | 23.636.000 | |
| 420 | Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju | 1 Dokumen | 52.470.000 | |
| 421 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju | 1 Dokumen | 5.430.000 | |
| 422 | Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju | 1 Dokumen | 19.680.000 | |
| 423 | Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju | 1 Dokumen | 5.430.000 | |
| 424 | Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju | 1 Dokumen | 19.680.000 | |
| 425 | Tindak Lanjut Hasil Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju | 1 Dokumen | 6.960.000 | |
| 426 | Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota Mamuju | 1 Dokumen | 52.410.000 | |
| 427 | Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Mamuju | 1 Dokumen | 68.390.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Jakarta | | | |
| 428 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.700.000 | |
| 429 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 9.310.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Medan | | | |
| 430 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.440.000 | |
| 431 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.336.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Bandung | | | |
| 432 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 32.875.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Semarang | | | |
| 433 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.187.000 | |
| 434 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.959.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Surabaya | | | |
| 435 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.950.000 | |
| 436 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 22.700.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Samarinda | | | |
| 437 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda | 1 Dokumen | 6.200.000 | |
| 438 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda | 1 Dokumen | 38.830.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Makassar | | | |
| 439 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 21.400.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pekanbaru | | | |
| 440 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.825.000 | |
| 441 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.075.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palembang | | | |
| 442 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 5.575.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Yogyakarta | | | |
| 443 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 17.360.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Denpasar | | | |
| 444 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 7.365.000 | |
| 445 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 19.130.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Kupang | | | |
| 446 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang | 1 Dokumen | 5.900.000 | |
| 447 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat | 1 Dokumen | 23.400.000 | |
| 448 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara | 1 Dokumen | 38.300.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Manado | | | |
| 449 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 20.855.000 | |

Abw

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Jayapura | | | |
| 450 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua) | 1 Dokumen | 7.402.000 | |
| 451 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua) | 1 Dokumen | 48.650.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banda Aceh | | | |
| 452 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 4.350.000 | |
| 453 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh) | 1 Dokumen | 20.550.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Batam | | | |
| 454 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 3.900.000 | |
| 455 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 22.799.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Padang | | | |
| 456 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 10.565.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Jambi | | | |
| 457 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 19.300.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Bengkulu | | | |
| 458 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Bengkulu | 1 Dokumen | 18.000.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Lampung | | | |
| 459 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 18.380.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pontianak | | | |
| 460 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.910.000 | |
| 461 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.660.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Banjarmasin | | | |
| 462 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 22.600.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palangkaraya | | | |
| 463 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 22.370.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mataram | | | |
| 464 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.835.000 | |
| 465 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 23.090.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Balikpapan | | | |
| 466 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.275.000 | |
| 467 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 25.850.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palu | | | |
| 468 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio | 1 Dokumen | 21.430.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari | | | |
| 469 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 6.050.000 | |
| 470 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 21.800.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Merauke | | | |
| 471 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 7.500.000 | |
| 472 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 48.275.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari | | | |
| 473 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.850.000 | |
| 474 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 27.856.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju | | | |
| 475 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Mamui | 1 Dokumen | 5.430.000 | |
| 476 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 19.680.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon | | | |
| 477 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.200.000 | |
| 478 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 21.320.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate | | | |
| 479 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.795.000 | |
| 480 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 31.925.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal Pinang | | | |
| 481 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.975.000 | |
| 482 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 16.487.000 | |
| 483 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara | 1 Dokumen | 21.900.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo | | | |
| 484 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.350.000 | |
| 485 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 17.850.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Tangerang | | | |
| 486 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 4.960.000 | |
| 487 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 20.275.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Posmon Sorong | | | |
| 488 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 2.582.000 | |
| 489 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 23.128.000 | |
| | Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Tahuna | | | |
| 490 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota | 1 Dokumen | 5.110.000 | |
| 491 | Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota | 1 Dokumen | 34.810.000 | |

6 *AW*

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|---------------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 063.01 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan | | | |
| 1 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Jakarta | 1 Perkara | 54.950.733 | |
| 2 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Bandung | 1 Perkara | 55.542.428 | |
| 3 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Bandung | 1 Perkara | 93.054.000 | |
| 4 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Semarang | 1 Perkara | 52.187.000 | |
| 5 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Semarang | 1 Perkara | 83.844.000 | |
| 6 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Yogyakarta | 1 Perkara | 55.970.000 | |
| 7 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Yogyakarta | 1 Perkara | 90.120.000 | |
| 8 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Surabaya | 1 Perkara | 54.214.000 | |
| 9 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Surabaya | 1 Perkara | 85.181.000 | |
| 10 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Banda Aceh | 1 Perkara | 54.632.000 | |
| 11 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Banda Aceh | 1 Perkara | 87.034.000 | |
| 12 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Medan | 1 Perkara | 52.766.000 | |
| 13 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Medan | 1 Perkara | 80.374.307 | |
| 14 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Padang | 1 Perkara | 52.880.000 | |
| 15 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Padang | 1 Perkara | 81.030.000 | |
| 16 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Pekanbaru | 1 Perkara | 54.110.000 | |
| 17 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Pekanbaru | 1 Perkara | 87.810.000 | |
| 18 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Jambi | 1 Perkara | 52.974.000 | |
| 19 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Jambi | 1 Perkara | 80.528.000 | |
| 20 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Palembang | 1 Perkara | 53.292.000 | |
| 21 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Palembang | 1 Perkara | 82.685.428 | |
| 22 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Bandar Lampung | 1 Perkara | 53.586.000 | |
| 23 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Bandar Lampung | 1 Perkara | 83.995.000 | |
| 24 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Pontianak | 1 Perkara | 54.372.000 | |
| 25 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Pontianak | 1 Perkara | 88.344.000 | |
| 26 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Palangkaraya | 1 Perkara | 55.510.000 | |
| 27 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Palangkaraya | 1 Perkara | 83.581.333 | |
| 28 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Banjarmasin | 1 Perkara | 53.540.000 | |
| 29 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Banjarmasin | 1 Perkara | 88.980.000 | |
| 30 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Samarinda | 1 Perkara | 59.778.000 | |

6 ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Samarinda | 1 Perkara | 120.376.000 | |
| 32 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Manado | 1 Perkara | 55.370.000 | |
| 33 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Manado | 1 Perkara | 91.850.000 | |
| 34 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Palu | 1 Perkara | 54.744.000 | |
| 35 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Palu | 1 Perkara | 96.874.000 | |
| 36 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Makassar | 1 Perkara | 56.193.250 | |
| 37 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Makassar | 1 Perkara | 91.866.000 | |
| 38 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Kendari | 1 Perkara | 55.003.000 | |
| 39 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Kendari | 1 Perkara | 91.566.000 | |
| 40 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Ambon | 1 Perkara | 61.487.000 | |
| 41 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) Ambon | 1 Perkara | 130.898.000 | |
| 42 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Denpasar | 1 Perkara | 58.739.666 | |
| 43 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Denpasar | 1 Perkara | 104.793.000 | |
| 44 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Mataram | 1 Perkara | 57.828.000 | |
| 45 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Mataram | 1 Perkara | 95.408.200 | |
| 46 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Kupang | 1 Perkara | 60.947.000 | |
| 47 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Kupang | 1 Perkara | 127.845.500 | |
| 48 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Jayapura | 1 Perkara | 76.479.000 | |
| 49 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Jayapura | 1 Perkara | 184.643.000 | |
| 50 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Bengkulu | 1 Perkara | 53.890.000 | |
| 51 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Bengkulu | 1 Perkara | 81.130.000 | |
| 52 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Serang | 1 Perkara | 54.971.000 | |
| 53 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Serang | 1 Perkara | 85.126.000 | |
| 54 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Batam | 1 Perkara | 57.673.333 | |
| 55 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Batam | 1 Perkara | 106.558.000 | |
| 56 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Pangkal Pinang | 1 Perkara | 55.952.000 | |
| 57 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Pangkal Pinang | 1 Perkara | 90.694.000 | |
| 58 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Gorontalo | 1 Perkara | 53.935.500 | |
| 59 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Gorontalo | 1 Perkara | 82.974.000 | |
| 60 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Manokwari | 1 Perkara | 69.934.500 | |
| 61 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Manokwari | 1 Perkara | 158.956.000 | |
| 62 | Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Luar Kota) di Sofifi | 1 Perkara | 100.918.000 | |

6 2011

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Sub Output) | | | |
| 63 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Jakarta | 1 Sampel | 517.135 | |
| 64 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Bandung | 1 Sampel | 529.812 | |
| 65 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Semarang | 1 Sampel | 531.068 | |
| 66 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Yogyakarta | 1 Sampel | 532.963 | |
| 67 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Surabaya | 1 Sampel | 527.984 | |
| 68 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Banda Aceh | 1 Sampel | 543.077 | |
| 69 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Medan | 1 Sampel | 532.797 | |
| 70 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Padang | 1 Sampel | 537.620 | |
| 71 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Pekanbaru | 1 Sampel | 539.753 | |
| 72 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Jambi | 1 Sampel | 547.143 | |
| 73 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Palembang | 1 Sampel | 543.207 | |
| 74 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Bandar Lampung | 1 Sampel | 541.922 | |
| 75 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Pontianak | 1 Sampel | 547.444 | |
| 76 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Palangkaraya | 1 Sampel | 545.524 | |
| 77 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Banjarmasin | 1 Sampel | 543.585 | |
| 78 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Samarinda | 1 Sampel | 570.740 | |
| 79 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Manado | 1 Sampel | 547.207 | |
| 80 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Palu | 1 Sampel | 556.790 | |
| 81 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Makassar | 1 Sampel | 530.918 | |
| 82 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Kendari | 1 Sampel | 554.900 | |
| 83 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Ambon | 1 Sampel | 593.502 | |
| 84 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Denpasar | 1 Sampel | 539.540 | |
| 85 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Mataram | 1 Sampel | 544.233 | |
| 86 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Kupang | 1 Sampel | 631.220 | |
| 87 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Javapura | 1 Sampel | 625.022 | |
| 88 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Bengkulu | 1 Sampel | 548.126 | |
| 89 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Serang | 1 Sampel | 599.052 | |
| 90 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Batam | 1 Sampel | 685.500 | |
| 91 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Pangkal Pinang | 1 Sampel | 617.140 | |
| 92 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Gorontalo | 1 Sampel | 604.180 | |
| 93 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Manokwari | 1 Sampel | 798.300 | |
| 94 | Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Sofifi | 1 Sampel | 771.700 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 066.01 | Badan Narkotika Nasional | | | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Laporan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya | 1 Laporan Pemeriksaan | 280.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi BNN | | | |
| | 2 Program Rehabilitasi 6 Bulan | 1 Orang | 21.737.736 | |
| | 3 Program Rehabilitasi 4 Bulan | 1 Orang | 15.405.650 | |
| | 4 Program Rehabilitasi Rawat Jalan | 1 Orang | 2.150.000 | |
| | Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah | | | |
| | 5 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan | 1 Orang | 14.343.425 | |
| | 6 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan | 1 Orang | 19.792.575 | |
| | 7 Layanan Rawat Jalan | 1 Orang | 1.200.000 | |
| | Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka | | | |
| | 8 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan | 1 Orang | 15.027.340 | |
| | 9 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan | 1 Orang | 23.042.786 | |
| | 10 Layanan Rawat Jalan | 1 Orang | 1.200.000 | |
| | Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam | | | |
| | 11 Rehabilitasi 4 Bulan Loka Rehabilitasi Batam | 1 Orang | 14.468.425 | |
| | 12 Rehabilitasi 6 Bulan Loka Rehabilitasi Batam | 1 Orang | 19.974.825 | |
| | 13 Rehabilitasi Rawat Jalan Loka Rehabilitasi Batam | 1 Orang | 1.200.000 | |
| | Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda | | | |
| | 14 Rehabilitasi 4 Bulan Loka Rehabilitasi Kalianda-Lampung | 1 Orang | 16.795.350 | |
| | 15 Rehabilitasi 6 Bulan Loka Rehabilitasi Kalianda-Lampung | 1 Orang | 20.235.450 | |
| | 16 Rehabilitasi Rawat Jalan Loka Rehabilitasi Kalianda-Lampung | 1 Orang | 1.200.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (075)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 075.01 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Layanan Informasi Geopotensial dan Tanda Waktu 1 Layanan Informasi Tanda Waktu | 1 Layanan Informasi | 298.000.000 | |

1
4 ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Konstitusi (077)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 077.01 | Mahkamah Konstitusi RI SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya | 1 Perkara | 49.057.000 | |
| | 2 Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PI-IPU Gubernur, PI-IPU Bupati, PHPU Walikota | 1 Perkara | 383.014.000 | |

Handwritten signature/initials

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 079.01 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal Yang Efektif dan Efisien | | | |
| | 1 Laporan Hasil Reviu | 1 Laporan, Dokumen | 213.211.000 | |
| | Pembinaan Peneliti Nasional | | | |
| | 2 Akreditasi Jurnal Ilmiah | 50 Dokumen | 390.390.000 | |
| | 3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti | 1800 Dokumen | 1.390.187.000 | |
| | Konsep Pengelolaan serta Mitigasi dan Adaptasi Bencana dan Perubahan Iklim Global pada Sumber Daya Perairan Darat | | | |
| | 4 Kajian Pengelolaan Danau Berbasis Daya Dukung Ekosistem | 5 Prototipe, Laporan | 2.250.000.000 | |
| | SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal Yang Efektif dan Efisien | | | |
| | 5 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah II Lampung (Kategori III) | 1 Laporan, Dokumen | 45.020.000 | |
| | 6 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah III Banten (Kategori II) | 1 Laporan, Dokumen | 38.923.000 | |
| | 7 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IV DKI Jakarta (Kategori I) | 1 Laporan, Dokumen | 29.640.000 | |
| | 8 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IV DKI Jakarta (Kategori II-A) | 1 Laporan, Dokumen | 18.335.000 | |
| | 9 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IV DKI Jakarta (Kategori II-B) | 1 Laporan, Dokumen | 25.985.000 | |
| | 10 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IV DKI Jakarta (Kategori III) | 1 Laporan, Dokumen | 20.520.000 | |
| | 11 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah V Jawa Barat (Kategori II-A) | 1 Laporan, Dokumen | 46.555.000 | |
| | 12 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah V Jawa Barat (Kategori II-B) | 1 Laporan, Dokumen | 60.515.000 | |
| | 13 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah V Jawa Barat (Kategori III) | 1 Laporan, Dokumen | 44.930.000 | |
| | 14 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah VI Jawa Tengah (Kategori III) | 1 Laporan, Dokumen | 49.030.000 | |
| | 15 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah VII Yogyakarta (Kategori II) | 1 Laporan, Dokumen | 82.615.000 | |
| | 16 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah VIII Jawa Timur (Kategori II) | 1 Laporan, Dokumen | 74.695.000 | |
| | 17 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah IX Bali (Kategori II) | 1 Laporan, Dokumen | 97.115.000 | |
| | 18 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah X Nusa Tenggara Barat (Kategori III) | 1 Laporan, Dokumen | 60.640.000 | |
| | 19 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah XI Sulawesi Utara (Kategori III) | 1 Laporan, Dokumen | 63.950.000 | |
| | 20 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah XII Maluku (Kategori II) | 1 Laporan, Dokumen | 111.285.000 | |
| | 21 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah XII Maluku (Kategori III) | 1 Laporan, Dokumen | 104.140.000 | |
| | 22 Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIPI Wilayah XIII Papua (Kategori III) | 1 Laporan, Dokumen | 83.780.000 | |

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 080.01 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | | | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) | | | |
| | 1 Laporan Data Dosis Radiasi Eksternal dan Data Dosis Radiasi Internal yang Diterima Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong | 1 Laporan | 99.709.000 | |
| | 2 Laporan Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong | 1 Laporan | 91.673.000 | |
| | 3 Laporan Hasil Uji Profesiensi Laboratorium Pengukuran Radioaktivitas di Lingkungan BATAN | 1 Laporan | 221.326.000 | |
| | 4 Laporan Pemantauan Tingkat Radioaktivitas Air Hujan di Wilayah Indonesia | 1 Laporan | 266.268.000 | |
| | SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Laporan Hasil Pengelolaan Limbah Radioaktif, Limbah B3, dan Bahan Bakar Nuklir Bekas | | | |
| | 5 Pengolahan Limbah Radioaktif Semi Cair/Resin Bekas | 1 Laporan | 277.648.000 | |
| | 6 Pengolahan Limbah Radioaktif Padat | 1 Laporan | 306.248.000 | |
| | 7 Pengolahan Limbah Radioaktif Cair | 1 Laporan | 504.230.000 | |

Abn

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (081)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 081.01 | <p>Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi</p> <p>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</p> <p>Layanan Jasa Teknologi Polimer (PNBP)</p> <p>1 Layanan Jasa Pelatihan Teknologi Polimer</p> <p>Pembinaan Nasional Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Litkayasa</p> <p>2 Penilaian Angka Kredit JFP Tingkat Pusat</p> <p>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</p> <p>Layanan Jasa Teknologi (PNBP)</p> <p>3 Audit Internal Sistem Mutu</p> | <p>14 Layanan Jasa</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 Layanan Jasa</p> | <p>284.620.000</p> <p>370.400.000</p> <p>109.338.250</p> | |

Handwritten signature and mark.

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 082.01 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) 1 Data Antariksa dan Atmosfer (Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang) 2 Data Antariksa dan Atmosfer (Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam) | 37 GB 461 GB | 86.240.000 232.200.000 | |

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Informasi Geospasial (083)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 083.01 | Badan Informasi Geospasial SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) 1 Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi | 20 Titik | 964.291.000 | |

L Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 089.01 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) | | | |
| | Jumlah Pegawai Terdiklat | | | |
| | 1 Diklat Sertifikasi JFA Penjurangan Auditor Utama BPKP | 1 Orang | 8.186.967 | |
| | 2 Diklat Sertifikasi JFA Penjurangan Auditor Madya BPKP | 1 Orang | 8.273.400 | |
| | 3 Diklat Sertifikasi JFA Penjurangan Auditor Muda BPKP | 1 Orang | 9.144.000 | |
| | 4 Diklat Sertifikasi JFA Auditor Ahli BPKP | 1 Orang | 11.634.900 | |
| | 5 Diklat Sertifikasi JFA Auditor Terampil BPKP | 1 Orang | 9.930.600 | |
| | 6 Diklat Teknis Substansi Bagi Pegawai BPKP 5 Hari | 1 Orang | 5.470.667 | |
| | 7 Diklat Teknis Substansi Bagi Pegawai BPKP 4 Hari | 1 Orang | 5.089.800 | |
| | 8 Diklat JFA Penjurangan Pengendali Teknis (Non BPKP) | 1 Orang | 3.544.767 | |
| | 9 Diklat JFA Penjurangan Ketua Tim (Non BPKP) | 1 Orang | 3.977.833 | |
| | 10 Diklat JFA Pembentukan Auditor Ahli (Non BPKP) | 1 Orang | 5.026.267 | |
| | 11 Diklat JFA Pembentukan Auditor Terampil (Non BPKP) | 1 Orang | 4.167.033 | |
| | 12 Diklat Teknis Substansi Auditor 5 Hari (Non BPKP) | 1 Orang | 2.022.133 | |
| | 13 Diklat Teknis Substansi Auditor 4 Hari (Non BPKP) | 1 Orang | 1.836.333 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Bengkulu | | | |
| | 14 LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu | 1 Laporan | 59.415.000 | |
| | 15 LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu | 1 Laporan | 28.865.000 | |
| | 16 LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu | 1 Laporan | 38.406.000 | |
| | 17 LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu | 1 Laporan | 30.745.000 | |
| | 18 LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu | 1 Laporan | 7.596.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | | | |
| | 19 LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 63.872.000 | |
| | 20 LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 31.447.000 | |
| | 21 LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 41.298.000 | |
| | 22 LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 33.327.000 | |
| | 23 LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 8.613.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi DKI Jakarta | | | |
| | 24 LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 26.070.000 | |
| | 25 LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 14.890.000 | |
| | 26 LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 16.110.000 | |
| | 27 LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 16.350.000 | |
| | 28 LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 7.370.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Barat | | | |
| | 29 LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat | 1 Laporan | 59.688.000 | |
| | 30 LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat | 1 Laporan | 30.455.000 | |
| | 31 LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat | 1 Laporan | 37.445.000 | |
| | 32 LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat | 1 Laporan | 32.635.000 | |
| | 33 LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat | 1 Laporan | 7.852.000 | |

ASW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 34 | LIIP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah | 1 Laporan | 60.708.000 | |
| 35 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah | 1 Laporan | 25.920.000 | |
| 36 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah | 1 Laporan | 42.094.000 | |
| 37 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah | 1 Laporan | 27.740.000 | |
| 38 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah | 1 Laporan | 7.066.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta | | | |
| 39 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta | 1 Laporan | 70.755.000 | |
| 40 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta | 1 Laporan | 35.101.000 | |
| 41 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. | 1 Laporan | 44.595.000 | |
| 42 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta | 1 Laporan | 37.221.000 | |
| 43 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta | 1 Laporan | 8.601.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Timur | | | |
| 44 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur | 1 Laporan | 60.974.000 | |
| 45 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur | 1 Laporan | 29.586.000 | |
| 46 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur | 1 Laporan | 39.349.000 | |
| 47 | LIIP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur | 1 Laporan | 31.646.000 | |
| 48 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur | 1 Laporan | 7.641.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi D.I. Aceh | | | |
| 49 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh | 1 Laporan | 60.582.000 | |
| 50 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh | 1 Laporan | 28.543.000 | |
| 51 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh | 1 Laporan | 39.951.000 | |
| 52 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh | 1 Laporan | 30.303.000 | |
| 53 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh | 1 Laporan | 7.692.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Utara | | | |
| 54 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | 58.698.000 | |
| 55 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | 27.745.000 | |
| 56 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | 38.677.000 | |
| 57 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | 29.565.000 | |
| 58 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | 7.485.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Selatan | | | |
| 59 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan | 1 Laporan | 57.325.000 | |
| 60 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan | 1 Laporan | 27.897.000 | |
| 61 | LIIP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan | 1 Laporan | 37.105.000 | |
| 62 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan | 1 Laporan | 29.777.000 | |
| 63 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan | 1 Laporan | 7.417.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Barat | | | |
| 64 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat | 1 Laporan | 57.928.000 | |
| 65 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat | 1 Laporan | 27.765.000 | |
| 66 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat | 1 Laporan | 37.787.000 | |
| 67 | LIIP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat | 1 Laporan | 29.645.000 | |
| 68 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat | 1 Laporan | 7.364.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Barat | | | |
| 69 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat | 1 Laporan | 59.408.000 | |
| 70 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat | 1 Laporan | 28.831.000 | |
| 71 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat | 1 Laporan | 38.534.000 | |
| 72 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat | 1 Laporan | 30.710.000 | |
| 73 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat | 1 Laporan | 7.696.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | | | |
| 74 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | 1 Laporan | 58.687.000 | |
| 75 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | 1 Laporan | 28.248.000 | |
| 76 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | 1 Laporan | 38.152.000 | |
| 77 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | 1 Laporan | 30.128.000 | |
| 78 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | 1 Laporan | 7.453.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Utara | | | |
| 79 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara | 1 Laporan | 61.128.000 | |
| 80 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara | 1 Laporan | 28.454.000 | |
| 81 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara | 1 Laporan | 40.476.000 | |
| 82 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara | 1 Laporan | 30.274.000 | |
| 83 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara | 1 Laporan | 7.560.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan | | | |
| 84 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan | 1 Laporan | 64.695.000 | |
| 85 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan | 1 Laporan | 31.033.000 | |
| 86 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan | 1 Laporan | 42.002.000 | |
| 87 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan | 1 Laporan | 33.213.000 | |
| 88 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan | 1 Laporan | 7.979.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Maluku | | | |
| 89 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku | 1 Laporan | 93.365.000 | |
| 90 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku | 1 Laporan | 46.738.000 | |
| 91 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku | 1 Laporan | 61.076.000 | |
| 92 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku | 1 Laporan | 48.617.000 | |
| 93 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku | 1 Laporan | 14.189.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Bali | | | |
| 94 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali | 1 Laporan | 80.693.000 | |
| 95 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali | 1 Laporan | 39.902.000 | |
| 96 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali | 1 Laporan | 50.734.000 | |
| 97 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali | 1 Laporan | 42.382.000 | |
| 98 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali | 1 Laporan | 9.482.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Irian Jaya | | | |
| 99 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya | 1 Laporan | 108.855.000 | |
| 100 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya | 1 Laporan | 55.046.000 | |
| 101 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya | 1 Laporan | 84.882.000 | |
| 102 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya | 1 Laporan | 58.126.000 | |
| 103 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya | 1 Laporan | 16.600.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Riau | | | |
| 104 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau | 1 Laporan | 55.327.000 | |
| 105 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau | 1 Laporan | 26.562.000 | |
| 106 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau | 1 Laporan | 36.328.000 | |
| 107 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau | 1 Laporan | 28.382.000 | |
| 108 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau | 1 Laporan | 7.323.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Lampung | | | |
| 109 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung | 1 Laporan | 51.450.000 | |
| 110 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung | 1 Laporan | 25.093.000 | |
| 111 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung | 1 Laporan | 33.536.000 | |
| 112 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung | 1 Laporan | 26.973.000 | |
| 113 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung | 1 Laporan | 6.920.000 | |

Handwritten signature/initials

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Timur | | | |
| 114 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur | 1 Laporan | 80.721.000 | |
| 115 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur | 1 Laporan | 40.731.000 | |
| 116 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur | 1 Laporan | 51.646.000 | |
| 117 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur | 1 Laporan | 42.911.000 | |
| 118 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur | 1 Laporan | 11.297.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jambi | | | |
| 119 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi | 1 Laporan | 55.931.000 | |
| 120 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi | 1 Laporan | 27.037.000 | |
| 121 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi | 1 Laporan | 36.387.000 | |
| 122 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi | 1 Laporan | 28.857.000 | |
| 123 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi | 1 Laporan | 7.253.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | | | |
| 124 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Laporan | 65.629.000 | |
| 125 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Laporan | 30.915.000 | |
| 126 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Laporan | 42.978.000 | |
| 127 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Laporan | 32.735.000 | |
| 128 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Laporan | 8.024.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| 129 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT | 1 Laporan | 76.048.000 | |
| 130 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT | 1 Laporan | 37.543.000 | |
| 131 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT | 1 Laporan | 49.604.000 | |
| 132 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT | 1 Laporan | 39.723.000 | |
| 133 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT | 1 Laporan | 10.739.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Banten | | | |
| 134 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten | 1 Laporan | 58.864.000 | |
| 135 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten | 1 Laporan | 31.994.000 | |
| 136 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten | 1 Laporan | 35.212.000 | |
| 137 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten | 1 Laporan | 33.814.000 | |
| 138 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten | 1 Laporan | 8.102.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan Riau | | | |
| 139 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau | 1 Laporan | 70.301.000 | |
| 140 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau | 1 Laporan | 35.216.000 | |
| 141 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau | 1 Laporan | 45.132.000 | |
| 142 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau | 1 Laporan | 37.039.000 | |
| 143 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau | 1 Laporan | 9.808.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | |
| 144 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | 53.864.000 | |
| 145 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | 26.181.000 | |
| 146 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | 35.130.000 | |
| 147 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | 28.241.000 | |
| 148 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | 7.126.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | |
| 149 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 Laporan | 64.290.000 | |
| 150 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 Laporan | 31.021.000 | |
| 151 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 Laporan | 41.547.000 | |
| 152 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 Laporan | 33.261.000 | |
| 153 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 Laporan | 7.898.000 | |

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah | | | |
| 154 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Laporan | 63.579.000 | |
| 155 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah | 1 Laporan | 30.958.000 | |
| 156 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Laporan | 40.911.000 | |
| 157 | LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Laporan | 32.718.000 | |
| 158 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Laporan | 8.070.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Barat | | | |
| 159 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat | 1 Laporan | 56.906.000 | |
| 160 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat | 1 Laporan | 26.218.000 | |
| 161 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat | 1 Laporan | 38.149.000 | |
| 162 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat | 1 Laporan | 28.278.000 | |
| 163 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat | 1 Laporan | 7.141.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Gorontalo | | | |
| 164 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 58.228.000 | |
| 165 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 26.964.000 | |
| 166 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 38.837.000 | |
| 167 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 28.784.000 | |
| 168 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 7.333.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Maluku Utara | | | |
| 169 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara | 1 Laporan | 70.271.000 | |
| 170 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara | 1 Laporan | 33.097.000 | |
| 171 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara | 1 Laporan | 46.859.000 | |
| 172 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara | 1 Laporan | 35.277.000 | |
| 173 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara | 1 Laporan | 9.325.000 | |
| | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Papua Barat | | | |
| 174 | LHP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat | 1 Laporan | 91.062.000 | |
| 175 | LHP Pemantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat | 1 Laporan | 42.825.000 | |
| 176 | LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat | 1 Laporan | 60.909.000 | |
| 177 | LHP Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat | 1 Laporan | 45.305.000 | |
| 178 | LHP Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat | 1 Laporan | 12.212.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Bengkulu | | | |
| 179 | LHP Pembinaan SPIP BPKP Propinsi Bengkulu | 1 Laporan | 30.111.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | | | |
| 180 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 33.704.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi DKI Jakarta | | | |
| 181 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 15.090.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Barat | | | |
| 182 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat | 1 Laporan | 31.657.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 183 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah | 1 Laporan | 26.916.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta | | | |
| 184 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta | 1 Laporan | 36.656.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Timur | | | |
| 185 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur | 1 Laporan | 30.691.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi D.I. Aceh | | | |
| 186 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh | 1 Laporan | 30.033.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Utara | | | |
| 187 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | 29.039.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Selatan | | | |
| 188 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan | 1 Laporan | 29.044.000 | |

6 Abu

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Barat | | | |
| 189 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat | 1 Laporan | 28.859.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Barat | | | |
| 190 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat | 1 Laporan | 30.221.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | | | |
| 191 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | 1 Laporan | 29.390.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Utara | | | |
| 192 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara | 1 Laporan | 29.742.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan | | | |
| 193 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan | 1 Laporan | 32.322.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Maluku | | | |
| 194 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi | 1 Laporan | 54.361.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Bali | | | |
| 195 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali | 1 Laporan | 41.755.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Irian Jaya | | | |
| 196 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya | 1 Laporan | 64.116.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Riau | | | |
| 197 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau | 1 Laporan | 27.815.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Lampung | | | |
| 198 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi | 1 Laporan | 25.982.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Timur | | | |
| 199 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur | 1 Laporan | 45.122.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jambi | | | |
| 200 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi | 1 Laporan | 28.120.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | | | |
| 201 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Laporan | 31.169.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| 202 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT | 1 Laporan | 41.652.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Banten | | | |
| 203 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi | 1 Laporan | 33.490.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kepulauan Riau | | | |
| 204 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau | 1 Laporan | 38.577.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | |
| 205 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | 27.097.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | |
| 206 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 Laporan | 32.169.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Tengah | | | |
| 207 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Laporan | 32.600.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Barat | | | |
| 208 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat | 1 Laporan | 27.149.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Gorontalo | | | |
| 209 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi | 1 Laporan | 28.169.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Maluku Utara | | | |
| 210 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara | 1 Laporan | 35.932.000 | |
| | LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Papua Barat | | | |
| 211 | LHP Pembinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat | 1 Laporan | 48.007.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Bengkulu | | | |
| 212 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu | 1 Laporan | 28.066.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | | | |
| 213 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 Laporan | 30.654.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi DKI Jakarta | | | |
| 214 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan | 13.650.000 | |

Handwritten signature/initials

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|---|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Barat | | | |
| 215 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Tengah | 1 Laporan | 29.455.000 | |
| 216 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta | 1 Laporan | 24.941.000 | |
| 217 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Timur | 1 Laporan | 34.598.000 | |
| 218 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi D.I. Aceh | 1 Laporan | 28.673.000 | |
| 219 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sumatera Utara | 1 Laporan | 27.795.000 | |
| 220 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sumatera Selatan | 1 Laporan | 26.885.000 | |
| 221 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sumatera Barat | 1 Laporan | 27.017.000 | |
| 222 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Barat | 1 Laporan | 26.886.000 | |
| 223 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | 1 Laporan | 27.986.000 | |
| 224 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Utara | 1 Laporan | 27.407.000 | |
| 225 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan | 1 Laporan | 27.673.000 | |
| 226 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Maluku | 1 Laporan | 30.072.000 | |
| 227 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Bali | 1 Laporan | 46.152.000 | |
| 228 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Irian Jaya | 1 Laporan | 39.382.000 | |
| 229 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau | 1 Laporan | 53.427.000 | |
| 230 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Lampung | 1 Laporan | 25.582.000 | |
| 231 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Timur | 1 Laporan | 23.974.000 | |
| 232 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jambi | 1 Laporan | 39.988.000 | |
| 233 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Laporan | 26.157.000 | |
| 234 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Laporan | 30.335.000 | |

Lu An

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| 235 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT | 1 Laporan | 36.524.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Banten | | | |
| 236 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten | 1 Laporan | 31.550.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kepulauan Riau | | | |
| 237 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau | 1 Laporan | 34.612.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | |
| 238 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | 24.941.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | |
| 239 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 Laporan | 30.022.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Tengah | | | |
| 240 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Laporan | 30.437.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Barat | | | |
| 241 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat | 1 Laporan | 24.979.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Gorontalo | | | |
| 242 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 26.043.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Maluku Utara | | | |
| 243 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara | 1 Laporan | 31.937.000 | |
| | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Papua Barat | | | |
| 244 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat | 1 Laporan | 41.705.000 | |

Abu

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial (100)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100.01 | Komisi Yudisial SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Laporan Investigasi Hakim 1 Laporan Investigasi Pendalaman Kasus 2 Laporan Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Laporan Investigasi Hakim 3 Laporan investigasi di pengadilan tingkat pertama/banding/Mahkamah Agung | 45 Laporan 6 Laporan 1 Laporan | 1.905.345.000 672.120.000 4.900.000 | |

L
Agung

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (106)

(dalam rupiah)

| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|---|------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 106.01 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) 1 Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah | 218 Penyelenggaraan | 3.125.730.000 | |

Alan



| Kode | Uraian | Volume dan Satuan Ukur | Besaran | Keterangan |
|--------|--|------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 116.01 | Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Program, Produksi dan Pengembangan Siaran Internasional | | | |
| | 1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio | 1 Paket | 3.360.000 | |
| | 2 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio | 1 Paket | 4.596.000 | |
| | 3 Program Produksi SPOT | 1 Paket | 191.000 | |
| | 4 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita | 1 Paket | 763.000 | |
| | 5 Program Produksi <i>Feature</i> | 1 Paket | 641.000 | |
| | 6 Program Produksi Laporan Mendalam | 1 Paket | 943.000 | |
| | 7 Program Siaran Langsung Reportase | 1 Paket | 1.606.000 | |
| | 8 Program Produksi Majalah Udara | 1 Paket | 897.000 | |
| | 9 Program Siaran KUIS | 1 Paket | 381.000 | |
| | 10 Program Produksi Sandiwara Radio | 1 Paket | 1.645.000 | |
| | 11 Program Siaran Pagelaran | 1 Paket | 12.255.000 | |
| | 12 Program Produksi Komentar | 1 Paket | 438.000 | |
| | 13 Program Produksi Dokumenter | 1 Paket | 1.331.000 | |
| | 14 Program Produksi Kaleidoskop | 1 Paket | 1.412.000 | |
| | 15 Program Siaran Obrolan | 1 Paket | 449.000 | |
| | 16 Program Produksi <i>Filler</i> | 1 Paket | 318.000 | |
| | 17 Program Siaran <i>Report On The Spot (ROS)</i> | 1 Paket | 69.000 | |
| | 18 Program Siaran <i>Flash News</i> | 1 Paket | 21.000 | |
| | 19 Program Siaran Wawancara | 1 Paket | 495.000 | |
| | 20 Program Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i> | 1 Paket | 2.541.000 | |
| | 21 Program Produksi Adlibs Program, Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional | 1 Paket | 130.000 | |
| | 22 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio | 1 Paket | 1.025.000 | |
| | 23 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio | 1 Paket | 3.973.000 | |
| | 24 Program Produksi SPOT | 1 Paket | 165.000 | |
| | 25 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita | 1 Paket | 737.000 | |
| | 26 Program Siaran Produksi <i>Feature</i> | 1 Paket | 566.000 | |
| | 27 Program Produksi Laporan Mendalam | 1 Paket | 840.000 | |
| | 28 Program Siaran Langsung Reportase | 1 Paket | 1.606.000 | |
| | 29 Program Produksi Majalah Udara | 1 Paket | 789.000 | |
| | 30 Program Siaran KUIS | 1 Paket | 344.000 | |
| | 31 Program Produksi Sandiwara Radio | 1 Paket | 1.537.000 | |
| | 32 Program Siaran Pagelaran | 1 Paket | 12.255.000 | |
| | 33 Program Produksi Komentar | 1 Paket | 387.000 | |
| | 34 Program Produksi Dokumenter | 1 Paket | 1.223.000 | |
| | 35 Program Produksi Kaleidoskop | 1 Paket | 1.304.000 | |
| | 36 Program Siaran Obrolan | 1 Paket | 396.000 | |
| | 37 Program Produksi <i>Filler</i> | 1 Paket | 282.000 | |
| | 38 Program Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i> | 1 Paket | 69.000 | |
| | 39 Program Produksi Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i> | 1 Paket | 2.541.000 | |
| | 40 Program Siaran Wawancara Penyelenggaraan Siaran Pemberitaan | 1 Paket | 495.000 | |
| | 41 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio | 1 Paket | 3.982.000 | |
| | 42 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio | 1 Paket | 5.218.000 | |
| | 43 Program Produksi SPOT | 1 Paket | 435.000 | |
| | 44 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita | 1 Paket | 735.000 | |
| | 45 Program Produksi <i>Feature</i> | 1 Paket | 565.000 | |
| | 46 Program Produksi Laporan Mendalam | 1 Paket | 840.000 | |
| | 47 Program Siaran Langsung Reportase | 1 Paket | 1.605.000 | |
| | 48 Program Produksi Majalah Udara | 1 Paket | 789.000 | |
| | 49 Program Siaran KUIS | 1 Paket | 344.000 | |
| | 50 Program Produksi Komentar | 1 Paket | 387.000 | |
| | 51 Program Produksi Dokumenter | 1 Paket acara | 1.223.000 | |
| | 52 Program Produksi Kaleidoskop | 1 Paket acara | 1.304.000 | |
| | 53 Program Siaran Obrolan | 1 Paket acara | 396.000 | |
| | 54 Program Produksi <i>Filler</i> | 1 Paket acara | 282.000 | |
| | 55 Program Siaran <i>Report On The Spot (ROS)</i> | 1 Paket acara | 69.000 | |
| | 56 Program Siaran <i>Flash News</i> | 1 Paket acara | 21.000 | |
| | 57 Program Siaran Wawancara | 1 Paket acara | 495.000 | |
| | 58 Program Produksi Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i> | 1 Paket acara | 4.270.000 | |
| | 59 Program Produksi Adlibs | 1 Paket acara | 130.000 | |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u. b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001